Miftachul Huda, M.Si.

ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Paradigma dan Teori

Pengantar:
Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag.
Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Paradigma dan Teori)

Miftachul Huda

Ilmu Kesejahteraan Sosial
(Paradigma dan Teori)

-Yogyakarta: Samudra Biru, Cetakan I, November 2012
xx+ 134 hlm, 140 x 210 mm

Penulis : Miftachul Huda
Editor : Kasyadi
Desain Sampul : Muttakhidul Fahmi
Tata Letak : Maryono Ahmad

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Samudra Biru
Jomblangan, Gg. Ontosesno No. B 15 Rt 12/30
Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta
Email/fb: psambiru@gmail.com
Phone: (0274) 9494558

ISBN: 978-602-9276-09-1

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Oleh:
Waryono [Abdul Ghafur]*

Ketika penulis buku ini menghubungi saya agar memberikan kata pengantar, saya meresponnya dengan ragu. Bagaimana tidak ragu, bidang kajian saya selama ini lebih banyak berkaitan dengan salah satu ilmu-ilmu Islam tradisional, yaitu Ulumul Qur'an dan Tafsir.[1]

*Staff Pengajar dan kini sedang mendapat tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[1] Para ulama atau tepatnya para filosof memiliki klasifikasi ilmu yang berbeda-beda. Al-Ghazali –sebagaimana dikemukakan oleh Osman Bakar- mengemukakan beberapa pembagian ilmu secara dikotomis. Pembagian *pertama*, ilmu diklasifikasi menjadi ilmu teoritis dan praktis; *kedua*, ilmu pengetahuan yang dihadirkan (*hudluri*) dan pengetahuan yang dicapai (*hushuli*); *ketiga*, ilmu-ilmu religius (*al-'ulum an-naqliyyah*) dan ilmu-ilmu intelektual (*al-ulum al-'aqliyyah*), dan *keempat*, ilmu *fardlu 'ain* dan ilmu *fardlu kifayah*. Lebih lanjut dalam Osman Bakar, ***Hierarki Ilmu Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu Menurut al-Farabi, al-Ghazali, dan Quthb al-Din al-Syirazi***, terj. Purwanto (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 231-4. Di samping itu juga ada pembagian *al-'ulum an-naqliyyah* (ilmu-ilmu

Sedangkan buku yang ada di hadapan pembaca ini berkaitan dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan atau Pekerjaan Sosial, ilmu yang baru buat saya dan mungkin untuk sebagian civitas akademika yang menuntut ilmu di PTAI. Meskipun demikian, saya merasa beruntung, karena pernah menjadi ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (periode 2009-2012), sehingga praktis saya terlibat dalam diskusi yang intens dengan teman-teman dosen yang memang ahli di bidang ini dan mendorong saya untuk membuka wawasan tentang keilmuan tersebut. Dari situlah saya sedikit memberanikan diri untuk mengiyakan kepada penulis buku ini untuk sekedar memberi pengantar. Karena itu, kalau di sana sini ada kekurangtepatan, mohon dimaklumi.

Memang, sebagaimana dikemukakan penulis buku ini (h. iv), ia terdorong untuk menulis buku dalam tema kesejahteraan dan atau pekerjaan social, karena masih langkanya buku tentang kesejahteraan atau pekerjaan social yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukkan untuk pembelajar warga Indonesia serta dalam konteks ke-Indonesiaan. Hal ini dapat dimaklumi, karena meskipun mungkin secara praktis-empirik, ilmu ini sudah menjadi bagian dari praktik hidup pegiat pengembang, pendamping, dan konsultan serta konselor bagi masyarakat, namun secara teoritis, ilmu ini berkembang terlebih dahulu di dunia Barat. Karena itu, buku-buku dalam bidang ini masih lebih banyak ditulis dalam bahasa Inggris dan karena itu pula konteksnya pun adalah Barat, sehingga boleh jadi kurang pas atau sesuai bila diterapkan begitu saja di lingkungan Indonesia, apatah lagi untuk komunitas Muslim, yang sebagiannya masih enggan bersentuhan dengan hal-hal

tradisional) dan *al-'ulum al-'aqliyyah* (ilmu-ilmu rasional). Lihat Muhammad Taqi Misbah Yazdi, ***Buku Daras Filsafat Islam***, terj. Musa Kazhim & Saleh Bagir (Bandung: Mizan, 2003), hlm. xvi dan "Prakata penulis", hlm. xxxiii.

yang berbau barat.

Namun ada yang lebih penting dari sekedar kurang tersedianya buku daras dimaksud yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan, kehadiran buku ini, seperti dinyatakan oleh penulis (h. 12-13) juga untuk meluruskan salah paham atas pekerjaan social yang selama ini dipahami sebagai sebuah aktivitas kemanusiaan biasa yang tidak membutuhkan keahlian khusus, karenanya tidak memerlukan bekal pendidikan ataupun pengalaman. Menurut penulis buku ini, pekerja sosial bukanlah sukarelawan yang bekerja asal ada kemauan, tapi sebuah aktivitas profesional untuk mangatasi masalah sosial dan karenanya pekerjaan sosial adalah disiplin ilmu, sebagaimana dokter, guru, psikolog, dan lain-lain. Sesuai dengan nama dan aktivitasnya, ilmu ini termasuk dalam ilmu sosial terapan[2] yang berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti Sosiologi. Oleh karena itu, buku ini dapat ditempatkan sebagai karya yang melakukan kritik konstruktif atas praktek-praktek sosial yang mengklaim sebagai praktek pekerjaan sosial.

Karena itu saya sangat mengapreasiasi usaha penulis ini. Mudah-mudahan, usaha penulisan buku serupa terus tumbuh, seiring semakin meningkatnya peminat

[2] Dalam diskursus kajian Islam, mungkin Mohammed Arkoun adalah pemikir Islam pertama yang memperkenalkan istilah Islamologi Terapan. Islamologi Terapan adalah sebuah disiplin dan praktek ilmiah pluridisipliner yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan dalam membebaskan pemikiran Islam dari berbagai tatanan using dan mitologi-mitologi yang menyesatkan. M. Natsir Tamara, "Mohammed Arkoun dan Islamologi Terapan", dalam ***Ulumul Qur'an No. 3***, h. 45-58. Social Work sebagai Ilmu Sosial Terapan juga ilmu yang prudisipliner atau lebih dikenal sebagai interdisipliner yang secara teoritik dan praktis bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat dalam mencapai keberfungsian social (*social function*) atau membebaskan masyarakat, baik sebagai individu, keluarga maupun komunitas dari berbagai macam pelabelan negative, ketertindasan, dan kekerasan.

studi dalam bidang ini di PTAI, termasuk di UIN Sunan Kalijaga. Meningkatnya peminat dan problem sosial yang unik sekaligus kompleks, tentu harus disertai dengan penguatan kapasitas keilmuan, sehingga penanganan masalah sosial benar-benar untuk mengatasi masalah, bukan malah melahirkan masalah baru (h.6).

Manusia dan Permasalahannya

Sebagaimana ilmu-ilmu sosial pada umumnya, Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan ilmu yang fokusnya adalah manusia yang secara empiris-sosiologis lahir, tumbuh dan berkembang secara dinamis dan sering menampakkan "wajah" yang dikotomis dan berbeda secara diametral. Realitas menunjukkan bahwa ada individu atau kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat yang dalam ilmu sosial disebut masyarakat penyandang masalah sosial,[3] baik karena faktor internal maupun karena faktor eksternal. Mereka seperti orang yang terkena bencana alam seperti gempa, korban gunung berapi, anak jalanan, anak terlantar, para manula, buruh migrant, narapidana, pecandu narkoba, dan lain-lain. Dalam bahasa al-Qur'an, mereka yang termasuk dalam kategori tersebut disebutkan dengan menggunakan beberapa istilah seperti *faqir*, *miskin*, *sa'ilin* (para peminta-minta), mu'allaf, *riqab* (budak atau orang yang terikat dengan paksa dengan orang lain),

[3] Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur- unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Senada dengan pendapat tersebut, Rubington dan Winberg (1999) mendifinisikan masalah sosial sebagai berikut : " *Social problems as an alleged situation that is incompaible with the values of significant number of people who agree that action is needed to alter the situation*". Definisi tersebut menyebutkan bahwa masalah sosial adalah yang diduga dan dianggap oleh banyak orang bertentangan dengan nilai, sehingga mereka setuju adanya tindakan untuk mengatasi atau menghilangkan situasi tersebut.Seperti dikutip dari *http://hotib n-ebink.blogspot.com/2010/11/konsepsi-masalah-sosial.html.*

al-mahrum (orang yang terhalang aksesnya terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik), dan lain-lain.

Dalam bahasa agama, situasi tersebut bersifat kodrati, artinya selalu ada dan melekat pada manusia. Namun, adanya manusia yang memiliki problem sosial tersebut bukan dimaksudkan untuk "dipamerkan" dan didiamkan atau dibiarkan begitu saja. Problem sosial yang dialami dan dirasakan sebagian masyarakat tersebut perlu diatasi dan dicarikan jalan keluarnya, sehingga yang bersangkutan tidak terus-menerus dalam situasi yang tidak atau kurang menguntungkan, sebagai akibatnya ia kurang fungsional dan maksimal mengemban amanah sebagai khalifah.

Untuk dapat mengatasi problem sosial tersebut, tentu membutuhkan seperangkat modal pengetahuan yang memadai, agar masalah tersebut teratasi dengan baik. Pada tataran inilah dibutuhkan paradigma dan teori mengenai pekerjaan atau kesejahteraan sosial. Permasalahannya, sebagaimana dikemukakan penulis, paradigma dan teori yang tersedia masih produk Barat, yang meskipun belum tentu buruk, namun juga belum tentu relevan. Lantas pertanyaannya, apakah Islam menyediakan separangkat paradigma dan teori pekerjaan atau kesejahteraan sosial?

Islam, Pembebasan dan Pencerahan: Mencari Paradigma Kesejahteraan Sosial

Islam, sebagaimana agama-agama lain, merupakan agama yang mendasarkan pada kitab suci. Namun, mungkin agak berbeda dengan agama lain, meski al-Qur'an berisi banyak hal, seperti persoalan eskatologis, kosmologis, teologis, dan lain-lain, semuanya dimaksudkan sebagai "petunjuk bagi manusia". Al-Qur'an, tegas Fazlur Rahman adalah sebuah dokumen untuk umat manusia.[4]

[4] Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), h.1.

Oleh karena itu untuk mendapatkan "potret" menganai manusia dan mencari solusi atas masalahnya, dapat ditemukan atau dicarikan dalam al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an misalnya, manusia disebut dengan empat ungkapan; an-nas, al-ins, al-insan dan basyar. Empat ungkapan atau kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda, meski dalam terjemahan sama. Keempatnya menggambarkan manusia sebagai makhluk tiga dimensi, yaitu dimensi jasadi-badani (fisik), ruhi dan nafsani. Ketiga dimensi inilah yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang utuh dan sempurna sehingga berbeda dengan makhluk mana pun. Ketika salah satu dimensi dari manusia itu terganggu atau bahkan hilang, maka manusia akan mengalami masalah. Dengan demikian, manusia yang bermasalah, bukan hanya ia yang kelaparan, tapi juga yang teralienasi atau mengalienasikan diri, tidak percaya diri, split personality, bodoh, dan penyakit mental, jiwa dan sosial lainnya.

Melalui al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.Islam hadir untuk mengubah tata nilai lama yang tidak manusiawi ke dalam tata nilai baru yang membebaskan dan mencerahkan. Al-Qur'an menawarkan cara dan strategi bagaimana masalah yang dihadapi manusia, akibat tidak terpenuhinya ketiga dimensi manusia tersebut. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang intinya menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepedulian dan kesatuan. Orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib orang lain yang memiliki problem social dan tidak mendorongnya berbuat sesuatu yang baik dan produktif, bahkan diskriminatif dicap oleh al-Qur'an sebagai pendusta agama. Orang seperti ini, beragama tapi palsu (QS. al-Ma'un [107]: 1- 7).

Lebih jauh al-Qur'an menjelaskan bahwa *raison d'etre* kehadiran wahyu dan para nabi, termasuk Nabi Muhammad adalah bukan semata-mata membawa pesan

teologis, tapi justeru membawa misi sosial. Kehadirannya, menurut Ziaul Haque, secara umum memiliki tiga tujuan, pertama, untuk menyatakan kebenaran; kedua, untuk berperang melawan kepalsuan (batil) dan penindasan (zulm); dan ketiga, untuk membangun sebuah komunitas atau persaudaraan berdasarkan kesetaraan sosial, kebaikan, keadilan, dan kasih sayang.[5] Itulah mengapa seluruh narasi cerita para nabi adalah mengingatkan dan melakukan kritik terhadap semua kekuatan *rulling class* dan elit yang menindas pada satu sisi dan mendampingi, melakukan penguatan serta advokasi pada mereka yang miskin, lemah, para budak, difabel, para pekerja yang tertindas, janda-janda, anak-anak yatim dan manusia-manusia yang tidak berdaya lainnya, pada sisi lain. Semua itu dilakukan dalam upaya membangun *hayatan toyyibah* (QS. an-Nahl [16]: 97), kehidupan yang baik dan tertata, sehingga tidak ada orang yang menderita dan tersiksa selama hidupnya. Dalam konteks inilah, betapa sangat mulianya pekerja sosial professional, karena ia mengemban dan melakukan misi profetik, sebagaimana dilakukan oleh para nabi. Para pekerja sosial professional adalah "nabi-nabi baru" yang berjuang untuk tegaknya keadilan, melawan kekuatan-kekuatan yang memecah belah manusia ke dalam faksi-faksi, kelas-kelas, dan kelompok-kelompok. Sebagaimana para nabi, pekerja sosial profesional bekerja membebaskan mereka yang menderita baik karena factor alam maupun sosial, by design atau pun tidak; perbudakan oleh orang-orang zalim, orang-orang yang mengeksploitasi orang lain dan berusaha mengangkat harkat manusia dari jurang kelemahan dan ketidakberdayaan yang boleh jadi diakibatkan oleh nafsu yang liar, egoism, dan nafsu kebendaan.

Bagaimana atau upaya apa yang dilakukan para nabi

[5] Ziaul Haque, *Wahyu dan Revolusi*, terj. E. Setiyawati al-Khattab (Yogyakarta: LKiS, 2000), 33.

dalam kerangka tersebut? Secara paradigmatik, ada tiga upaya yang dilakukan para nabi, yaitu *islah*; melakukan reformasi dari dalam dengan menata kepercayaan atau ruang batin masyarakat. Hal ini karena boleh jadi masalah itu timbul bukan dari luar atau faktor ekternal, tapi karena faktor internal. Atau masalah itu dari luar, namun bila ada kesiapan internal, maka tidak akan menjadi masalah. Pada tataran inilah kita mengerti mengapa sejak awal al-Qur'an tidak berbicara mengenai hukum, tapi justru membenahi *world view* yang benar, terutama kepada Tuhan dan diri sendiri. Manusia diingatkan bahwa mereka ada, tumbuh, berkembang, dan pada akahirnya akan berakhir bukan karena dirinya, tapi karena Tuhan dan diingatkan pula bahwa ia adalah makhluk *interdepedensi* atau makhluk sosial. Kedua pandangan yang benar terhadap keduanya tersebut menjadi dasar untuk menata dan membangun relasi antar manusia, bahwa mereka harus saling menyayangi, mencintai, kerjasama dan berusaha untuk menjadi *problem solver* serta menjadi bagian masyarakat yang kontributif untuk reformasi eksternal.

Kedua, setelah reformasi kedalam benar dan kuat serta implementatif ke luar, upaya berikutnya adalah menghidupkan prinsip dan suasana tidak saling menyakiti dan taat pada kontrak social (*salam*), baik tertulis maupun tidak. Manusia itu berbeda dan beragam (heterogen), namun bukan untuk dibeda-bedakan dan dinafikan. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita agar memandang secara positif dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyaataan tersebut (QS. al-Hujurat [49]: 13). Perbedaan dan keragaman harus dipandang sebagai anugerah. Karena itu, sikap yang tepat terhadap keragaman dan perbedaan kemanusiaan tersebut adalah sikap apresiatif, menghargai, dan membantu.

Ketiga, sebagai kelanjutan dari keduanya adalah

menjamin ketersediaan sumber daya dan jaminan keamanan sosial, sehingga manusia, sesuai dengan kapasitasnya menjadi *al-amin* dan *al-'amid* (sebagai yang terpercaya dan penyangga) keberlangsungan kehidupan yang berkeadaban, sehingga tercapai kebersamaan dalam kesetaraan.

Demikian, sekedar pengantar, semoga manfaat. Tiada gading yang tak retak. Begitupun buku ini. Anggap saja, kekurangan yang ada, justru peluang bagi pembaca untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Yogyakarta, 23 Oktober 2012

TEBITKAN BUKUMU DI SINI
SAMUDRA BIRU

Sekapur Sirih

Tiap kali mendengar kesulitan mahasiswa kesejahteraan sosial mengenai referensi perkuliahan, saya selalu tergugah untuk menulis buku. Tahun 2009 lalu saya telah menulis *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar.* Meski banyak mendapatkan apresiasi positif, buku ini masih bersifat umum. Semacam memenuhi kebutuhan generalis bagi para pegiat kesejahteraan sosial. Sedangkan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat spesifik, masih belum dibahas dalam buku tersebut. Untuk itulah, saya tergerak untuk menulis buku ini, *Ilmu Kesejahteraan Sosial: Paradigma dan Teori.*

Secara khusus buku ini ditujukan untuk memenuhi referensi tentang mata kuliah teori kesejahteraan sosial. Walaupun, buku ini juga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami secara lebih jauh tentang ilmu kesejahteraan sosial, khususnya dalam konteks

paradigma maupun teori. Paradigma maupun teori ini merupakan persoalan paling pokok dalam kesejahteraan sosial. Karena wilayah inilah yang menentukan model praktik pekerjaan sosial.

Pengetahuan-pengetahuan yang spesifik dan spesialis dalam ilmu kesejahteraan sosial belum banyak dibahas dalam sebuah buku utuh khususnya yang berbahasa Indonesia. Misalnya, advokasi, pendampingan sosial, penelitian kesejahteraan sosial, konseling, terapi kelompok, nilai dan etika, dan seterusnya. Mudah-mudahan buku ini disusul dengan penulisan buku-buku referensi lainnya yang tentu berguna bagi para pekerja sosial atau yang berminat terhadap ilmu kesejahteraan sosial.

Buku ini memang masih bersifat deskriptif dengan menggambarkan beberapa paradigma maupun teori yang sudah ada dan berkembang. Namun lebih dari itu buku ini juga dimaksudkan membuka alam pikiran pembaca agar kritis dengan dimungkinkan adanya perubahan dan perumusan paradigma maupun teori baru yang lebih relevan dengan konteks Indonesia. Sebab, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku ini ilmu kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini sedikit-banyak masih dipengaruhi oleh negara asalnya yang ada di Barat seperti di Inggris ataupun Amerika Serikat. Walhasil, paradigma maupun teori yang diimplementasikan di Indonesia lebih banyak tidak berhasil menyelesaikan masalah dengan sempurna. Ini disebabkan realitas sosial dan budaya di Indonesia berbeda dengan yang ada di Barat. Untuk itulah setidaknya buku ini dapat menjadi penggugah kesadaran bagi para pekerja sosial dalam rangka merumuskan ulang ilmu kesejahteraan sosial, khususnya dalam wilayah paradigmatis.

Karya ini sudah pasti masih jauh dari kata sempurna. Tetapi, setidaknya ini adalah bagian dari upaya untuk memasyarakatkan ilmu kesejahteraan sosial di tengah

publik yang masih awam dengan ilmu ini. Seperti ungkapan indah yang terkenal, "Lebih baik menyalakan lilin daripada mengumpat di tengah kegelapan." Selain itu saya juga kerap memberikan motivasi kepada para penulis pemula untuk menulis buku, "seburuk" apapun isinya. *Toh*, seperti slogan yang juga kerap saya kutip, "Seburuk-buruk gagasan yang ditulis, jauh lebih baik daripada gagasan cerdas namun tidak ditulis." Semoga buku ini ada manfaatnya!

Miftachul Huda
Jomblangan, 05 Oktober 2012

TERBITKAN BUKUMU DI SINI
SAMUDRABIRU.CO.ID
MELAYANI JASA CETAK
SEGALA MACAM
PRODUK CETAKAN
SAMUDRABIRU.CO.ID

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Sekapur Sirih xiii

BAB I KESEJAHTERAAN SOSIAL 1
A. Pembuka 1
B. Kesejahteraan Sosial 2
1. Pengertian dan Istilah 2
2. Kritik Definisi 8
3. Ruang Lingkup 9
4. Disiplin Ilmu 11
C. Kategori Ilmu Praktis 13
D. Penelitian Kesejahteraan Sosial 14
E. Kesejahteraan Sosial di Indonesia: Quo Vadis? 18
F. Penutup 25

BAB II PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL 27
A. Pembuka 27
B. Memahami Paradigma 28

1. Pengertian 28
2. Paradigma Membentuk Teori 30
3. Revolusi Ilmu 32
C. Mengenal Beberapa Paradigma dalam Kesejahteraan Sosial 34
1. Neo-Konservatif 36
2. Liberal 39
3. Demokrasi Sosial 43
4. Marxist 46
D. Krisis-Krisis Paradigma 50
E. Penutup 58

BAB III TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL 61
A. Pembuka 61
B. Memahami Teori 62
1. Pengertian 62
2. Empat Fungsi Teori 65
3. Hubungan Teori dengan Paradigma 66
C. Konstruksi Teori dalam "Celana Dalam" Gus Dur 68
D. Mengenal Beberapa Teori dalam Kesejahteraan Sosial 71
1. Teori Psikodinamika 72
2. Teori Humanis 76
3. Teori *Social and Community Development* *79*
4. Teori Ekosistem 83
5. Teori Radikal 87
6. Teori *Anti-Oppressive* 90
E. Penutup 95

BAB IV REVOLUSI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL: SEBUAH KENISCAYAAN? 97
A. Pembuka 97
B. Problem Paradigmatis 98
C. Anomali-Anomali 104
D. Keniscayaan Revolusi Ilmu 109

E. Penutup 114

Daftar Pustaka 115
Indeks 121

Berutur tentang Kehidupan **127**

Terbitkan Bukumu di sini
SAMUDRABIRU.CO.ID
PROMOSI DAN PENJUALAN PADA MULTI PLATFORM
SAMUDRABIRU.CO.ID

BAB I
KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pembuka

Sebelum membahas lebih jauh mengenai paradigma maupun teori kesejahteraan sosial, bab ini terlebih dahulu menguraikan konsep kesejahteraan sosial. Penekanan pada bab ini adalah kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu dan kategorinya sebagai ilmu praktis. Meskipun ada juga penjelasan lainnya yang bisa membantu pembaca sebelum lebih jauh mengulas tentang paradigma maupun teori kesejahteraan sosial. Penekanan kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu akan relevan jika dihubungkan dengan kajian paradigmatis. Sebab, kajian paradigma kerapkali melekat pada suatu entitas keilmuan.

Sedang penekanan pada kesejahteraan sosial sebagai ilmu praktik akan memberikan pemahaman yang terang bahwa sebuah praktik membutuhkan paradigma maupun teori yang tepat – untuk tidak mengatakan yang benar, sebab paradigma maupun teori bukan persoalan benar

atau salah. Meski demikian, penjelasan-penjelasan lain dalam bab ini juga penting untuk disimak karena juga berkaitan dengan bab-bab selanjutnya.

Seperti halnya penjelasan mengenai penelitian kesejahteraan sosial. Penelitian kesejahteraan sosial jelas membutuhkan paradigma dan teori. Dan hal ini saya kira sangat diperlukan oleh seorang mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial. Sebuah penelitian misalnya, tidak akan mampu menjelaskan dengan baik suatu fenomena kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat jika tidak memakai teori-teori yang relevan dengan ilmu kesejahteraan sosial. Inilah setidaknya yang akan dibahas di Bab I yang diberi judul *Kesejahteraan Sosial* ini.

B. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian dan Istilah

Istilah Pekerjaan Sosial (*social work*) sering dipertukarkan dengan Kesejahteraan Sosial (*social welfare*). Bahkan, tidak sedikit orang yang kebingungan dengan kedua istilah ini. Dalam acara bedah buku saya berjudul *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar* pada bulan Ramadhan tahun 2009 di kampus UIN Jogja ada seorang mahasiswa yang bertanya. Padahal mahasiswa tersebut bukan mahasiswa baru lagi, namun pertanyaannya masih seputar penggunaan kedua istilah tersebut. Setidaknya ini menjadi bukti bahwa penggunaan kedua istilah itu memang kerap membingungkan.

Ada pengalaman menarik ketika saya menyunting buku berjudul *Pekerjaan Sosial di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangan* (Samudra Biru, 2011). Buku ini adalah kumpulan makalah yang pernah dipresentasikan pada acara *Social Work Update I* di STKS Bandung, 15-17 Januari 2010. Oleh karenanya, para penulisnya termasuk dari berbagai kalangan yang ahli di bidangnya.

Pengalaman yang penulis bicarakan adalah ketika menyunting sebuah tulisan dari Bapak Holil Soelaiman. Beliau adalah ilmuan pekerjaan sosial yang sangat senior. Bagi mantan Direktur STKS Bandung (1975-1989) ini pengalaman dan pengetahuan di bidang pekerjaan sosial sudah tidak diragukan lagi. Karena tulisannya saat itu masih dalam bentuk *pointers*, saya harus menarasikan dalam bentuk kalimat yang runtut dan mudah dibaca. Namun karena tidak ingin merubah substansinya, saya secara intens berkomunikasi dengan Bapak Holil berkait hasil suntingannya.

Tulisan beliau saya masukkan dalam Bab berjudul *Sejarah dan Kontekstualisasi Ilmu Pekerjaan Sosial di Indonesia.* Pada saat penulis mengirimkan hasil suntingan dengan judul Bab tersebut *via* e-mail, ada komentar menarik dari beliau. Agar jelas, saya kutipkan secara lengkap komentar beliau tersebut: "*..Sebaiknya tidak menggunakan kata "ilmu pekerjaan sosial." Pekerjaan Sosial bukan ilmu tetapi profesi. Profesi bukan ilmu tetapi berdasarkan ilmu, ilmu bukan profesi.*" Mungkin argumen inilah yang menjadi dasar penamaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di Bandung.

Saat membaca komentar Bapak Holil tersebut, tentu kening saya sedikit berkerut. Sebab dalam beberapa kesempatan, saya tidak terlalu membedakan antara istilah Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Keduanya saya pahami sebagai sebuah disiplin ilmu. Bedanya, kesejahteraan sosial dalam konteks tertentu bisa menggambarkan sebuah kondisi sosial di samping sebagai disiplin ilmu. Namun secara umum keduanya menurut saya adalah dua istilah yang bisa digunakan untuk satu maksud yang sama. Yakni, sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang metode mengatasi masalah sosial. Baik itu pada level individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

Istilah pekerjaan sosial memang terdengar aneh. Ini

karena istilah tersebut diserap dari bahasa Inggris, yakni *social work*. Ilmu ini diserap dari Barat. Sehingga ketika masuk ke Indonesia, penerjemahan istilah tersebut menjadi persoalan. Ini adalah problem bahasa yang mempunyai 'rasa' berbeda. Bahkan Bapak Holil dalam tulisan yang saya ceritakan di atas, penggunaan istilah pekerjaan sosial di Indonesia adalah sebuah kecelakaan sejarah. Saya kutipkan sekali lagi pendapat beliau berikut ini (Suharto, dkk.,2010:5-6):

> *"Pekerjaan sosial adalah satu-satunya profesi yang menamakan dirinya "pekerjaan", sehingga orang awam dengan mudah merancukannya dengan pekerjaan amal, pekerjaan relawan, pekerjaan yang tidak perlu dibayar. Selain itu, pekerjaan berkonotasi kegiatan fisik, kerja otot, bukan kerja otak. Menurut penulis, nama ini kelak menjadi "kecelakaan sejarah (*historical accident*)" bagi pekerja sosial profesional."*

Memang benar bahwa kata pekerjaan dalam pekerjaan sosial berstigma negatif. Pekerja sosial identik dengan pekerja sukarelawan. Padahal, relawan dan pekerja sosial berbeda sama sekali. Yang pertama tidak dibekali dengan pendidikan profesional, lalu yang kedua mempunyai *background* pendidikan profesional. Atas kerancuan yang terjadi di masyarakat inilah, tidak heran beberapa kalangan menambah *embel-embel* pada profesi pekerja sosial dengan kata 'profesional' sehingga menjadi pekerja sosial profesional.

Namun sekali lagi, saya bukan dalam arti mengamini pendapat Bapak Holil di atas. Saya tetap lebih memilih menggunakan istilah Pekerjaan Sosial untuk merujuknya sebagai disiplin ilmu. Meskipun kadangkala juga menggunakan istilah kesejahteraan sosial. Tidak tepatnya penggunaan istilah pekerjaan sosial hanya

berkaitan dengan problem kebahasaan. Yaitu *social work* yang kurang pas jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini mirip dengan *welfare society* sebagai antonim dari *welfare state* yang tidak cocok jika di-Indonesiakan.

Tapi sudahlah, perdebatan kedua istilah tersebut tampaknya tidak produktif. Bahkan sudah mafhum juga di kalangan pekerja sosial bahwa perdebatan ini sangat usang. Alih-alih berdebat tentang istilah, ada baiknya kita mewacanakan ilmu tersebut secara lebih massif kepada masyarakat umum.

Untuk mewacanakan ilmu ini secara lebih luas kita perlu menguraikan sedikit tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial tersebut. Mengutip definisi *international federation of social worker* DuBois dan Miley (2005:4) mengungkapkan kata kunci penting. IFSW mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kata kunci yang dimaksud adalah pekerjaan sosial berkaitan dengan profesi kemanusiaan untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Masalah sosial yang dimaksud di sini sangat luas, bisa terjadi pada level individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat.

Definisi lainnya (Zastrow, 1999: 5) pekerjaan sosial merupakan sebuah aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya. Jadi, jika diperhatikan pengertian pekerjaan sosial dari satu penulis dengan penulis lainnya mempunyai kemiripan

makna walaupun dengan bahasa yang berbeda.

Menurut saya ada beberapa kata kunci yang sangat penting dalam memahami pekerjaan sosial. *Pertama*, aktivitas profesional. Salah satu hal penting yang membedakan pekerjaan sosial dengan aktivitas lain adalah profesionalisme. Di masyarakat sering ditemukan adanya aktivitas kemanusiaan untuk membantu orang lain. Misalnya, karena merasa prihatin atas cekcok antar suami-istri dalam sebuah keluarga ada seseorang yang menolong dengan mendamaikannya. Alih-alih membantu menyelesaikan masalah, karena tidak punya bekal ilmu yang cukup, sang penolong justru menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Kasus di atas mungkin saja wajar terjadi dan sang penolong tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Yang ironis adalah mereka yang mengaku sebagai pekerja kemanusiaan tetapi justru menjadi penyebab masalah, bukan menyelesaikan masalah. Di suatu daerah penulis menemukan ada satu LSM yang bergerak di bidang advokasi kekerasan terhadap perempuan. Tetapi yang terjadi justru setiap kali ada perempuan korban kekerasan rumah tangga yang berkonsultasi hasil akhirnya adalah perceraian. Sehingga di antara aktivis pada LSM tersebut muncul *joke* bahwa LSM tersebut sebagai biang perceraian. Menurut saya mungkin ada yang salah dengan aktivitas pekerjaan sosial pada LSM tersebut. Sehingga perlu dilakukan evaluasi, sebab pekerjaan sosial adalah untuk menyelesaikan masalah bukan melahirkan masalah baru.

Kedua, masalah sosial. Pekerja sosial berjibaku mengatasi masalah sosial (*social problem*) dalam ragam tingkatan. Masalah sosial memang cukup luas, seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, kenakalan remaja, anak terlantar, gizi buruk, dan seterusnya. Ringkasnya, pekerja sosial pada dasarnya bersinggungan dengan masalah-masalah sosial ini dengan tujuan untuk

mengatasinya.

Dari kata kunci yang kedua ini, saya memahami bahwa tugas inti pekerja sosial adalah mengatasi masalah sosial. Sama halnya dengan dokter yang berjibaku mengobati pasien yang menderita penyakit. Atau, seorang guru yang berkutat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya.

Ketiga, kesejahteraan. Tujuan praktik intervensi pada berbagai aras di bidang pekerjaan sosial (mikro, mezzo, maupun makro) seluruhnya bermuara pada kondisi sejahtera (*welfare*). Jika seorang guru mengajari muridnya agar cerdas; dokter mengobati pasien agar sehat; pengacara menangani kasus klien agar terbebas dari jerat hukum; maka seorang pekerja sosial (*social worker*) membantu kliennya agar hidup secara lebih sejahtera.

Namun yang menjadi problem adalah kondisi sejahtera itu dalam konteks Indonesia mungkin kurang kongkrit dan masih kondisional. Misal, orang kampung yang hidup pas-pasan, makanan pokok tiap hari *tiwul* dengan lauk tempe dan hasil bumi seadanya bisa saja menyebut diri sejahtera. Tapi, orang kaya raya yang tiap hari makan di restoran, rumah seperti istana, punya kendaraan banyak *bak* "show room", tapi kerap mengaku belum merasa sejahtera.

Karenanya di sini penting membuat ukuran sejahtera, setidaknya dalam pandangan umum. Dalam hal ini, James Midgley (1997:5) membuat tiga ukuran suatu kondisi bisa disebut sejahtera. *Satu,* ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik. *Dua,* saat kebutuhan-kebutuhan tercukupi; dan *Tiga,* tatkala peluang-peluang sosial dalam masyarakat terbuka secara lebar. Tiga hal ini setidaknya dapat menjadi ukuran di tengah kurang jelasnya kondisi sejahtera tersebut. Dengan memahami tiga kata kunci ini, menurut penulis cukup jelaslah konsep

pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial tersebut.

2. Kritik Definisi

Lazim diketahui ilmu kesejahteraan sosial banyak mendapat kritik karena terlalu positivistik. Positivistik adalah paradigma sosial klasik yang berpandangan empiris dengan mengedepankan ilmu-ilmu alam. Pengaruh positivistik dalam ilmu kesejahteraan sosial adalah diadopsinya teori-teori yang serumpun dalam memahami dan mendefinisikan masalah sosial. Di sinilah juga yang mengakibatkan terjadinya *blaming the victim* (menyalahkan korban) yang umum ditentang dalam ilmu kesejahteraan sosial.

Sebagaimana nanti dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya, positivistik ini identik dengan perspektif *social order* (keteraturan sosial). Perspektif ini mendukung kemapanan, ketertiban sosial, stabilitas sosial, keterpaduan dan seterusnya. Pandangan ini dipertentangkan dengan perspektif konflik yang lebih radikal. Problem sosial tidak hanya dianggap sebagai kesalahan personal akan tetapi pada struktur sosial, ekonomi maupun politik. Sehingga perubahan harus dilakukan secara lebih radikal pada wilayah struktur tersebut, bukan personalitas.

Belakangan memang pekerjaan sosial telah bergeser ke arah yang lebih radikal, misal dengan munculnya berbagai pendekatan ilmu sosial kritis dalam pekerjaan sosial. Namun demikian, pergeseran ke arah yang lebih radikal ini tentunya harus diikuti dengan definisi yang lebih relevan. Sebab apabila penulis cermati, definisi-definisi yang dirujuk sesungguhnya sangat positivistik.

Contoh definisi Zastrow (1999:5) sebagaimana telah ditulis di atas, pekerjaan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas agar berfungsi sosial. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa pekerjaan sosial fokus pada teori strukturalisme

fungsional yang merupakan bagian dari paradigma positivistik. Dunia dipandang sudah tertata dengan baik, sehingga jika ada masalah maka manusianya yang harus menyesuaikan dengan dunia tersebut. Pandangan ini berbeda dengan paradigma pengkritiknya (intepretif maupun kritis). Definisi yang sangat positivistik juga dapat dilihat pada penulis klasik seperti Max Siporin (1975) yang juga menekankan pada perbaikan dan peningkatan keberfungsian sosial masyarakat; juga Pincus dan Minahan (1973) yang berfokus untuk membantu masyarakat melaksanakan tugas-tugas kehidupan dalam masyarakat.

Dalam konteks ini penulis hendak menyampaikan kepada para pembaca agar melihat definisi pekerjaan sosial secara kritis dan paradigmatis. Dengan kata lain kita harus mampu mengaitkan antara definisi tersebut dengan paradigma-paradigma besar yang berkembang. Sehingga, kita bisa lebih kritis dan bahkan bisa mengembangkan definisi lainnya yang lebih radikal. Perubahan harus dilakukan sejak dari definisi, sebab bagaimana mungkin kita bisa membuat perubahan yang lebih radikal jika sejak mendefinisikannya saja sudah kurang tepat.

3. Ruang Lingkup

Kesejahteraan sosial adalah ilmu praktik. Maka dalam praktiknya membutuhkan berbagai metode intervensi. Dalam konteks metode intervensi ini, maka ruang lingkup kesejahteraan sosial berada dalam tiga wilayah. *Pertama*, wilayah mikro yang mencakup model intervensi secara perseorangan. Maka dalam hal ini dikenal pekerjaan sosial klinis (*clinical social work*). Di sinilah praktik konseling dalam menangani klien yang mempunyai problem individual seperti kecanduan narkoba, kenakalan remaja, korban pemerkosaan dan seterusnya. Banyak kalangan menganggap wilayah ini

tidak relevan dengan konteks Indonesia yang memiliki ciri khas sebagai masyarakat komunal tidak individual seperti di Barat.

Bahkan dalam konteks teoritis, intervensi wilayah mikro ini cenderung *blaming the victim* (menyalahkan korban). Padahal yang keliru sesungguhnya adalah sistem bukan korban (*victim*), sehingga intervensi kepada korban tidak relevan. Walaupun demikian, ini bukan berarti tidak penting untuk dipelajari. Perbincangan mengenai hal ini setidaknya pernah mengemuka dalam diskusi bulanan dosen Progam Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 7 Agustus 2012. Dalam diskusi terbatas tersebut penulis mengungkapkan bahwa boleh jadi, sesungguhnya intervensi mikro *matching* dengan kondisi masyarakat di kota-kota besar di Indonesia yang telah mengalami transformasi menjadi masyarakat industri yang individualis. Kita lihat saja di masyarakat kita kini muncul perumahan-perumahan elit yang sangat individualis. Bahkan, sekalipun bertetangga hanya berjarak tembok setebal tak lebih dari satu meter antar tetangga tersebut tidak saling mengenal. Ini artinya ketika seorang anggota keluarga mengalami masalah sosial, maka bolehjadi mereka merasa cocok untuk merujuk kepada seorang pekerja sosial sebagaimana halnya di Barat. Argumen ini setidaknya berkaca pada beberapa kebiasaan menyelesaikan masalah sebagaimana terjadi di masyarakat industri. Contoh, pembaca mungkin masih ingat iklan tentang jasa pelayanan masalah seksual yang sering muncul di televisi yang dimotori oleh dr. Boyke. Tanggapan masyarakat saya kira cukup antusias karena mampu menjaga privasi secara meyakinkan. Fenomena ini, menurut penulis bisa jadi dapat diadopsi oleh dunia pekerjaan sosial. Hanya saja mungkin perlu ada yang memulainya.

Kedua, wilayah mezzo mencakup intervensi terhadap keluarga maupun kelompok kecil. Klien-klien yang

mempunyai kesamaan problem sosial kerapkali disatukan dalam satu kelompok kecil agar dapat saling mendukung (*support*) satu sama lainnya. Dalam wilayah ini dikenal metode *group work* (terapi kelompok) atau *family therapy* (terapi keluarga).

Terakhir, wilayah makro yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai kelompok besar. Di wilayah inilah metode-metodenya banyak diterapkan dalam menangani masalah sosial, seperti *community development, policy analysis,* advokasi, *community organizing* dan seterusnya. Maka jelaslah bahwa metode intervensi sosial yang sudah populer seperti pengembangan masyarakat, sesungguhnya merupakan bagian dari ilmu kesejahteraan sosial. Namun, karena telah berkembang sejak lama pengembangan masyarakat dapat dipelajari secara mandiri sehingga tidak sedikit ada kampus yang mempunyai jurusan pengembangan masyarakat di samping kesejahteraan sosial. Ini seperti sosiologi agama yang merupakan pengembangan dari ilmu sosiologi, ataupun semacamnya.

4. Disiplin Ilmu

Suatu kali, saya pernah membaca berita di koran *Kedaulatan Rakyat* (23/07/2012) berjudul *Sekolah Perlu Kembangkan Social Work.* Saya penasaran, karena tidak biasanya berita tentang *social work* diangkat di ruang publik, terlebih menjadi berita di koran sekelas KR yang *nota bene* adalah koran lokal paling sohor di Yogyakarta. Setelah saya baca, intinya berita tersebut menyebutkan bahwasanya mulai tahun ajaran baru 2012-2013, seluruh sekolah di Kota Yogyakarta wajib memasukkan program *social work* dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Nantinya, siswa wajib melakukan aktivitas sosial seperti aksi sosial di panti asuhan, kerja bakti dengan warga, bersih-bersih di Malioboro dan seterusnya.

Setelah dipikir-pikir, rupanya berita itu sedikit aneh.

Pada judul ditulis *social work*, namun isinya ternyata yang dimaksud *social work* itu adalah menyantuni anak yatim di panti asuhan, kerja bakti dengan warga atau bersih-bersih di tempat-tempat tertentu. Saya kemudian menelusuri dasar hukum pelaksanaan program ini, dan ternyata merujuk ke Peraturan Daerah No. 5 tentang Sistem Pelaksanaan Pendidikan yang telah disyahkan sejak tahun 2008. Pasal 28 Perda tersebut menyebutkan kalau pelaksanaan pendidikan di Yogyakarta wajib memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah. Salah satu muatan lokal dimaksud adalah kerja sosial.

Dari sini saya kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa *social work* memang tak kunjung dipahami secara tepat oleh masyarakat. Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, pekerjaan sosial banyak disalahpahami tidak lebih dari sebuah aktivitas kemanusiaan yang sukarela dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Oleh karenanya, siapa saja bisa melakukan atau mempraktikkan pekerjaan sosial tersebut. Padahal sesungguhnya pekerjaan sosial merupakan sebuah aktivitas profesional dalam mengatasi masalah sosial dalam masyarakat (Zastrow, 1999: 5). Karena aktivitas profesional, pekerjaan sosial telah menjadi sebuah disiplin ilmu (Huda, 2009: 4).

Kesalahpahaman masyarakat yang memaknai pekerjaan sosial sebagai aktivitas sukarelawan *an sich,* tampaknya disebabkan oleh adanya stigma negatif. Dia kerap dianggap sebagai aktivitas tanpa pamrih yang tidak memerlukan pembelajaran dalam melakukannya. Padahal, sebagaimana disiplin ilmu lainnya, *social worker* (pekerja sosial) membutuhkan bekal pendidikan ataupun pengalaman. Seperti halnya dengan dokter, guru, psikolog, pengacara dan seterusnya. Maka dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disyaratkan adanya "Pekerja Sosial Profesional" yang dibedakan dengan "Relawan Sosial." Jika yang pertama

mensyaratkan adanya pendidikan atau pelatihan, maka yang kedua tidak secara khusus mensyaratkan adanya pendidikan atau pelatihan.

Ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa aktivitas kedermawanan (*philanthropy*) tidak lain adalah pekerjaan sosial. Inilah stigma negatif yang mempersempit makna pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial. Karena sesungguhnya pekerjaan sosial sebagaimana telah diungkap sebelumnya adalah ilmu yang sangat luas. Dia tidak saja berbicara bagaimana mengatasi problem individu, tetapi juga kelompok, keluarga dan masyarakat. Sehingga, selain praktik konseling, terapi kelompok dan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat dan analisis kebijakan publik sesungguhnya adalah bagian dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri.

Dengan demikian, telah jelaslah bahwa pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial adalah sebuah disiplin ilmu. Kerangka berfikir ini amat penting untuk kita pakai terlebih sebagai pondasi atas pembahasan-pembahasan selanjutnya dalam buku ini yakni menyangkut paradigma maupun teori. Sebab, paradigma maupun teori hanya melekat pada sebuah entitas yang mencapai derajat disiplin ilmu. Sebagaimana diketahui, sebuah disiplin ilmu memiliki bangunan paradigma maupun teori yang mendasarinya.

C. Kategori Ilmu Praktis

Sebagaimana Hatta (1979:17-23) bahwa ilmu itu pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori yakni ilmu teori dan ilmu praktik. Ilmu teori ini dicirikan dengan adanya tujuan yang terbatas pada semata-mata ingin mengetahui sifat-sifat benda dan kodrat alam. Seperti ilmu astronomi, matematika, fisika, kimia, ilmu bumi dan seterusnya. Kemudian, ketika manusia menerapkannya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu maka timbullah ilmu-ilmu praktik seperti : teknik, agraria, kedokteran

dan seterusnya.

Jika kita merujuk dua kategori ilmu ini, maka pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial dapat dikategorikan sebagai ilmu praktik. Ini karena pekerjaan sosial berusaha menerapkan teori-teori tertentu dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat atau mencapai keberfungsian sosial (*social functioning*).

Terkait kategori ilmu praktis ini, saya hanya ingin mengatakan bahwasanya kedudukan teori sangat penting dalam praktiknya. Teorilah yang akan menuntun dan memandu seorang pekerja sosial (*social worker*) dalam membantu klien menyelesaikan masalahnya. Teori ikut menentukan sikap dan tindakan pekerja sosial.

Agar lebih jelas, saya ilustrasikan dengan seseorang yang akan bepergian menuju suatu tempat. Ketika keluar dari rumah, Dia mendapati bahwa langit mendung. Jika mendung, biasanya akan turun hujan. Kepercayaan bahwa "jika mendung, biasanya akan hujan," adalah teori. Karena sudah berulangkali terbukti. Karena mempercayai teori ini, maka Dia memutuskan membawa payung atau jas hujan. *Nah*, di sini jelas diketahui bahwasanya kepercayaan terhadap teori bahwa mendung akan diikuti hujan mempengaruhinya dengan membuat keputusan untuk membawa payung atau jas hujan. Begitulah teori, akan berpengaruh terhadap tindakan seorang pekerja sosial.

D. Penelitian Kesejahteraan Sosial

Selain berhubungan dengan praktik, teori maupun paradigma erat kaitannya dengan aktivitas penelitian terutama berkaitan dengan ilmu kesejahteraan sosial. Sebenarnya kalau membahas tema penelitian kesejahteraan sosial maka sangat panjang sekali, bahkan boleh jadi cukup dibahas dalam satu buku utuh. Akan tetapi, untuk kepentingan ilmu kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan teori maupun paradigma ini

akan dibahas secara sekilas saja.

Setiap mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial selalu akan dihadapkan kepada penelitian sebagai tugas akhir kuliah yang biasanya dituangkan dalam bentuk skripsi atau apapun namanya. Sebagaimana dimaklumi, aktivitas penelitian adalah aktivitas ilmiah yang harus memenuhi unsur-unsur seperti penentuan paradigma maupun teori yang digunakan. Sama halnya dengan praktik, tanpa adanya teori maka penelitian akan terkesan ngawur tanpa arah sehingga akan sulit menemukan fakta yang objektif atas sebuah fenomena.

Apalagi, selama ini mahasiswa-mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial belum mampu menggali secara lebih maksimal mengenai teori-teori penelitian kesejahteraan sosial. Hambatannya banyak sekali, mulai dari minimnya literatur yang berbahasa Indonesia yang membahas masalah tersebut maupun tidak bersahabatnya teori-teori kesejahteraan sosial di mata mahasiswa maupun peneliti tersebut. Atas adanya masalah inilah setidaknya buku ini juga hadir dalam rangka mengisi kekosongan referensi yang berbahasa Indonesia yang berusaha mendekatkan diri pada kebutuhan mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial.

Karena masalah yang dihadapi mahasiswa ini, kerapkali penelitian kesejahteraan sosial tidak ada bedanya dengan penelitian sosiologi, politik atau bahkan psikologi. Misalnya, seorang mahasiswa atau peneliti melakukan penelitian tentang anak jalanan. Namun, penelitiannya justru mengarah pada penggalian mengenai perilaku anak jalanan sehingga tidak ada yang membedakannya dengan penelitian dalam konteks ilmu sosiologi. Di sinilah diperlukan adanya pemahaman mengenai teori-teori yang lebih relevan dengan ilmu kesejahteraan sosial sehingga penelitian-penelitian kesejahteraan sosial dapat membedakan diri dengan disiplin ilmu lainnya.

Ringkasnya, penelitian kesejahteraan sosial membutuhkan pengetahuan tentang paradigma maupun teori sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya. Selain itu, sebagaimana lazimnya aktivitas penelitian ilmiah lainnya, penelitian kesejahteraan sosial memiliki peluang lahirnya teori-teori baru yang akan memperkaya khazanah ilmu kesejahteraan sosial khususnya di Indonesia. Kita tahu bahwasanya teori-teori kesejahteraan sosial masih banyak yang diadopsi dari Barat sebagaimana yang menjadi asal dari ilmu kesejahteraan sosial. Problemnya adalah teori-teori yang diimpor tersebut tidak selalu relevan dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia. Dengan demikian, di sini ada peluang diciptakannya teori-teori baru kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat lebih tepat dalam menjelaskan fenomena-fenomena kesejahteraan sosial di Indonesia.

Sebuah teori dapat lahir dari aktivitas penelitian yang serius dan memenuhi unsur-unsur ilmiah. Misalnya, seorang sosiolog termasyhur Max Weber berhasil menemukan sebuah teori tentang spirit kapitalisme yang menurutnya berasal dari etika Protestan sebagaimana direkam dalam bukunya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (Lihat, Giddens :150). Selanjutnya, teori etika protestan banyak dikutip dan dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian-penelitian sosiologi. Begitu juga ketika Clifford Geerts (1960) yang menghasilkan sebuah teori tentang klasifikasi budaya Jawa dalam kelompok santri, priyayi dan abangan. Teori ini dihasilkan dari penelitiannya yang panjang yang dilakukan pada masyarakat Jawa di Indonesia. Teori tersebut pun dipakai secara terus-menerus, bahkan penelitian tentang budaya di Indonesia tidak akan sempurna jika tidak merujuk pada teori Geerts yang sangat terkenal itu.

Berkaitan dengan potensi terciptanya teori-teori baru

inilah, tampaknya penelitian kesejahteraan sosial sangat mungkin sekali untuk digiatkan oleh para mahasiswa maupun peneliti di bidang kesejahteraan sosial. Apalagi masih banyak sekali fenomena kesejahteraan sosial di Indonesia yang dapat diteliti sehingga mampu melahirkan teori-teori baru untuk lebih memperkaya keilmuan kesejahteraan sosial di Indonesia. Misalnya bagaimana praktik pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah pedalaman yang miskin di Indonesia sesungguhnya dapat diambil sebuah benang merah mengenai unsur teoritiknya. Apalagi, tidak sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah banyak melakukan praktik-praktik pemberdayaan tersebut. Di sini muncul sebuah peluang mengenai munculnya teori baru atas aktivitas yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan diketahui telah berhasil dengan baik.

Selain itu, dalam lingkungan perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta sangat menarik untuk melakukan kajian-kajian kesejahteraan sosial dalam hubungannya dengan keislaman. Nilai-nilai keislaman yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits dapat dirumuskan menjadi sebuah teori kesejahteraan sosial. Hal ini tentunya sangat mungkin sekali, sebab sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya, pembentukan teori maupun paradigma dalam sebuah keilmuan sangat dimungkinkan.

Demikianlah, penelitian kesejahteraan sosial sesungguhnya sangat relevan untuk diperbincangkan terutama dalam hubungannya dengan paradigma maupun teori ilmu kesejahteraan sosial. Sebab, penelitian kesejahteraan sosial dapat menjadi pintu pembuka atas pengembangan teori maupun paradigma ilmu kesejahteraan sosial. Tanpa adanya aktivitas penelitian, maka mustahil pengembangan keilmuan khususnya pada taraf paradigma dan teori dapat diterapkan. Inilah pentingnya penelitian kesejahteraan sosial dalam

kedudukannya sebagai pintu masuk atas pengembangan keilmuan daripada ilmu kesejahteraan sosial tersebut.

E. Kesejahteraan Sosial di Indonesia: Quo Vadis?

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa sebagai disiplin ilmu, kesejahteraan sosial berasal dari negeri Barat. Akan tetapi, secara substansial memang kesejahteraan sosial di Indonesia juga mempunyai akar kesejarahan terutama jika dilihat dari budaya filantropi (kedermawanan) yang mengakar kuat di Indonesia. Jika kita amati dengan teliti, jiwa kedermawanan dan kesukarelaan menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia (Huda, 2009: 44-45). Keadaan ini dapat diintip dari budaya beberapa suku yang ada di Indonesia, Jawa misalnya. Sejak dahulu kala, bahkan hingga saat ini masyarakat Jawa mempraktekkan tradisi *Gorong Royong* dalam kegiatan pembangunan rumah, perkawinan, maupun kematian (Saidi&Abidin, 2004:22). Seluruh lapisan masyarakat, tua-muda, laki-laki-perempuan, bahu membahu saling membantu satu sama lainnya. Bantuan yang diberikan pun, dan ini yang menarik, dalam bentuk yang beragam sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Jiwa kesukarelawanan dan kedermawanan ini ternyata juga dimiliki oleh masyarakat Sulawesi. Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, warga Toraja mempraktekkan tradisi yang mereka sebut sebagai *Arisan Tenaga. Arisan Tenaga* adalah semacam kerja bakti secara bergiliran untuk menggarap sawah atau ladang milik warga atau anggota kelompok. Pemilik sawah hanya menyediakan makanan untuk anggota kelompok yang akan menggarap sawahnya secara sukarela. Pemilik sawah kemudian menyumbangkan uang untuk kas kelompok sebagai ungkapan terima kasih. Budaya yang tidak jauh berbeda juga terdapat dalam budaya *Sa'aleant* yang dipraktikkan oleh warga Dayak di Kalimantan Barat (Said&Abidin,

2004: 22).

Sebagai aktivitas pertolongan (*helping profession*), kesejahteraan sosial membutuhkan semangat kedermawanan. Sebab tanpa adanya semangat kedermawanan ini, sangat sulit merealisasikan metode-metode penanganan masalah sosial dalam kesejahteraan sosial. Seperti yang telah disebutkan di atas, Indonesia telah mempunyai tradisi saling membantu satu sama lain di mana budaya seperti ini sangat sulit ditemukan di dalam masyarakat sekuler seperti halnya di negara-negara Barat. Sekalipun perlu diakui bahwa tradisi tersebut memang tidak berkaitan secara langsung dengan perkembangan keilmuan kesejahteraan sosial. Tetapi, sekurang-kurangnya ini dapat dianggap sebagai benih-benih perkembangan kesejahteraan sosial di Indonesia pada masa-masa awal.

Perkembangan kesejahteraan sosial di Indonesia secara ilmiah, baru dapat kita lacak ketika bersinggungan dengan tradisi keilmuan di Barat. Pelacakan akar epistemologis dari ilmu kesejahteraan di Indonesia ini sangat penting, terutama untuk menggambarkan secara utuh terkait kondisi pondasi keilmuannya. Sebab, sebagaimana yang nanti akan diungkapkan bahwa pondasi keilmuan kesejahteraan sosial sesungguhnya cukup rapuh. Namun di sinilah justru peran para ilmuan kesejahteraan sosial di Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan pondasi keilmuan tersebut.

Kembali ke perbincangan pada persinggungan antara kesejahteraan sosial di Indonesia dengan Barat, dalam hal ini Midgley (1981) dalam bukunya yang mengupas tentang pekerjaan sosial di negara-negara berkembang (*Professional Imperialism: Social Work in the Third World),* membangun sebuah teori yang dia sebut sebagai "professional imperialism." "Imperialisme profesional" ini dimaksudkan sebagai suatu kondisi di mana pekerjaan sosial di negara-negara berkembang sesungguhnya

adalah bagian dari kado atas proyek modernisasi yang dipaksakan oleh Barat sebagai negara penjajah. Seperti diketahui, sebagai negara terjajah Indonesia selama beratus-ratus tahun telah dijajah dari berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya kehidupan fisik yang menjadikan orang Indonesia sebagai budak di negeri sendiri, akan tetapi penjajahan juga dilakukan secara ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan bahasa misalnya, pada waktu itu bahasa yang paling terhormat adalah bahasa Eropa (Belanda). Pramoedya Ananta Toer (2011) dalam roman sejarahnya yang masyhur, *Bumi Manusia,* menggambarkan bagaimana rendahnya seorang pribumi yang hanya bisa berbahasa pribumi dan betapa terhormatnya ketika seorang pribumi mampu berbahasa dengan bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Penggunaan bahasa yang berasal dari negeri penjajah ini tidak lain adalah bagian dari pemaksanaan yang dilakukan oleh penjajah kepada negeri Hindia Belanda (Indonesia). Hanya saja, hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh orang Indonesia terlebih pada waktu itu pendidikan orang Indonesia masih lemah dan belum mampu memahami hal tersebut secara lebih kritis.

Pemaksanaan-pemaksaan yang diselimuti oleh ilmu pengetahuan ini sesungguhnya terjadi pada ilmu kesejahteraan sosial. Apalagi, jika kita menggunakan analisis wacana Michel Foucault dalam kehidupan kita sehari-hari sesungguhnya kerap terjadi relasi kuasa dalam pengetahuan. Menurut Foucault, kekuasaan sesungguhnya telah menghasilkan pengetahuan. Namun antara kekuasaan dan pengetahuan tersebut secara langsung saling mempengaruhi (Foucault: 1979). Jika kita merujuk teori ini misalnya, maka ilmu kesejahteraan sosial sesungguhnya adalah produk pengetahuan yang dipaksakan akibat kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara pertama yang menguasai

Indonesia. Dengan adanya kuasa atas pengetahuan ini maka kekuasaan negara penjajah akan semakin kokoh. Sehingga pendeknya, penjajahan yang terjadi di Indonesia dengan demikian tidak hanya terjadi secara fisik dengan dikeruknya kekayaan sumber daya alam, akan tetapi telah merasuk kepada penjajahan profesional (*professional emperialism*) sebaimana yang telah diungkapkan di atas tadi.

Secara epistemologis, nasib ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia sebetulnya adalah tragis. Ilmu ini bak anak adopsi, yang telah disayang dan dipelihara hingga dewasa oleh induknya. Akan tetapi, setelah selama bertahun-tahun bahkan hingga beranak-cucu, dia justru tidak mampu hidup menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia. Berbahasa Indonesia pun dia tidak bisa, apalagi mampu bergaul dengan anak-anak pribumi lainnya. Yang salah tentu bukan anak adopsi ini, yang salah adalah induk semangnya, karena kenapa sejak awal tidak diajarkan cara bicaranya, cara berpakaiannya, hingga cara bergaul yang tentu berbeda dengan kehidupan di negeri asalnya.

Jika kita sepakat dengan teori "imperialisme professional" Midgley di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa perkembangan keilmuan kesejahteraan sosial di Indonesia sangat tendensius. Tendensi pengembangan keilmuan kesejahteraan sosial ini tentunya adalah bagian dari upaya Barat untuk selalu menghubungkan negara-negara berkembang dengan negara-negara Barat. Kondisi ini setidaknya disinyalir oleh Midgley (1981: 40) dengan mengatakan bahwa ekspor ilmu ini dari Barat ke negara-negara berkembang secara implisit merefleksikan suatu proses kompleks yang mengikat dan terus menghubungkan negara-negara tersebut dengan Barat yang berbasis industri.

Dengan adanya imperialisme profesional ini, maka perkembangan kesejahteraan sosial di Indonesia banyak

merujuk pada praktik keilmuan yang berkembang terutama di Inggris dan Amerika Utara (Hakim, 2010: 7). Sehingga, tentu saja dalam praktiknya di Indonesia implementasi praktik kesejahteraan sosial tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia karena memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan masyarakat Barat di mana ilmu tersebut berasal.

Yang lebih memperkuat fakta tentang "imperialisme profesional" ini adalah adanya lembaga-lembaga pendidikan penyelenggara kesejahteraan sosial di Indonesia yang mempunyai kaitan erat secara langsung dengan Barat. Seperti Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di Bandung yang didirikan pada tahun 1957 dan hingga tahun 1969 dibantu dalam hal kurikulumnya oleh lima orang konsultan training PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Begitu juga dengan sejumlah pelajar yang dikirim ke luar negeri untuk mempelajari pekerjaan sosial dengan tujuan Belanda, Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jerman dan Inggris (Hakim, 2010: 10-11). Sehingga di sini dapat dilihat bagaimana peran Barat dalam perkembangan keilmuan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Mengkaji fakta-fakta epistemologis di atas, maka kita dapat mengambil benang merah tentang asal-muasal serta perkembangan ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia di mana di dalamnya terdapat kontribusi besar dari pihak luar (Barat). Akibatnya adalah bangunan epistemologis yang meskipun kuat di negeri asalnya, namun berubah menjadi rapuh ketika harus tumbuh dan berkembang di negeri yang berbeda dalam konteks kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Hal ini setidaknya diindikasikan dengan ketidakberdayaannya ilmu ini dalam menghadapi problem-problem sosial yang berkembang pesat di Indonesia.

Ketidakberdayaan usaha-usaha pembangunan

kesejahteraan sosial di Indonesia setidaknya dapat ditunjukkan dengan melambatnya gerak pengurangan kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Sekedar diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik per Maret 2012 jumlah orang miskin di Indonesia berjumlah 29,13 juta jiwa. Memang jumlah ini diketahui turun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 30,02 juta jiwa yang berarti berkurang 890 ribu (*Kedaulatan Rakyat*, 6/7/2012). Meski terjadi penurunan, jumlahnya sangat kecil sekali yakni 890 ribu orang. Lantas apa saja yang telah dilakukan pemerintah selama setahun hingga hanya sejumlah itu yang mampu dientaskan dari garis kemiskinan?

Ini tentu saja sangat menggelikan. Sebab kalau dihitung dengan perhitungan sederhana, jika 890 ribu itu dibagi 33 (jumlah provinsi di Indonesia), maka kemampuan setiap provinsi dalam mengentaskan kemiskinan adalah sejumlah 2247 orang per tahun. Selanjutnya jika dibagi lagi dengan 5 (asumsi rata-rata jumlah kabupaten tiap provinsi) maka tiap kabupaten hanya mampu mengurangi angka kemiskinan sejumlah 449 orang. Jika dibagi lagi dengan 20 (asumsi rata-rata jumlah kecamatan tiap kabupaten), maka tiap kecamatan hanya mampu mengentaskan 22 orang per tahunnya. Sungguh mengenaskan kinerja penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Lebih mengenaskan lagi, jika kita tidak menghiraukan data BPS ini dan menengok data lain dengan ukuran yang berbeda. Sebab telah menjadi pengetahuan umum data BPS ini hanya dijadikan sebagai legitimasti keberhasilan pemerintah. Sehingga, data-datanya banyak yang diragukan bahkan menggelikan. Contoh, ketika pemerintah mengeluarkan data jumlah kemiskinan, maka jumlahnya biasanya sedikit. Namun, ketika ada usulan untuk menyalurkan Raskin (beras miskin) atau bantuan sejenisnya, biasanya jumlahnya membengkak.

Patut dicurigai, ini adalah sarana untuk korupsi sekaligus menunjukkan bahwa datanya sangat lemah.

Sebagaimana diketahui, garis kemiskinan yang dipakai oleh BPS adalah Rp248.707/kapita/bulan (2012) sedang pada tahun sebelumnya Rp233,740/kapita/bulan. Ini artinya, seseorang yang berpenghasilan lebih besar daripada jumlah tersebut maka dia tidak lagi disebut miskin. Dengan kata lain, seseorang yang berpenghasilan di atas sekitar Rp8300 sehari menurut BPS tidak lagi disebut miskin. Padahal, garis kemiskinan secara internasional adalah 2 Dollar AS per hari yang artinya sekitar Rp19000 (jika 1 Dollar AS = Rp9500). Jika menggunakan ukuran ini maka diperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 42 persen atau hamper 100 juta lebih (*Kompas*, 8/3/2012). *Wah*, berarti jika menggunakan ukuran ini maka hampir separuh orang Indonesia adalah miskin. Sungguh terlalu!

Melihat prestasi Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan ini dapat menjadi gambaran yang menyedihkan terkait kemampuan ilmu kesejahteraan sosial dalam kontribusinya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwasanya pemerintah tidak melakukan apa-apa terhadap upaya penanggulangan kemiskinan ini. Sebab berbagai program sesungguhnya telah dilakukan, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), program-program penanggulangan kemiskinan lainnya dan bahkan hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terkenal itu.

Lantas mengapa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan tidak kunjung juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia secara signifikan? Jawabannya menurut penulis adalah karena ada problem epistemologis bahkan metodologis terhadap ilmu kesejahteraan sosial yang dikembangkan di

Indonesia. Metode-metode pemberantasan kemiskinan yang diterapkan pada kenyataannya tidak mampu berjalan secara efektif di Indonesia. Sehingga dari hari ke hari, nasib kesejahteraan sosial di Indonesia tidak tentu arahnya. Inilah mengapa penulis mempertanyakannya dengan quo vadis, yakni mau dibawa ke mana jika kondisinya sudah seperti ini?

Untuk itu, dalam rangka mengantarkan ilmu kesejahteraan sosial ke arahnya yang benar, cukup mendesak dilakukan perbaikan bahkan revolusi (ilmu) agar ilmu kesejahteraan sosial menemukan keberdayaannya dalam menghadapi laju kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya yang berjalan begitu pesat di Indonesia.

F. Penutup

Dipandang sebagai disiplin ilmu, pekerjaan sosial maupun kesejahteraan sosial adalah sebuah entitas keilmuan yang sangat luas. Praktik-praktik penanganan masalah sosial dalam wilayah mikro (individu), mezzo (keluarga dan kelompok) dan makro (masyarakat) termasuk dalam cakupan ilmu kesejahteraan sosial ini. Hanya saja, ilmu kesejahteraan sosial ini dalam perkembangannya melahirkan banyak cabang keilmuan yang sudah berdiri sendiri dan dipelajari di banyak perguruan tinggi. Seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang telah menjadi entitas keilmuan tersendiri dan banyak dipelajari di kampus-kampus ternama di Indonesia.

Ilmu kesejahteraan sosial termasuk kategori ilmu praktis karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yakni untuk mensejahterakan masyarakat. Berbeda dengan ilmu teoritis yang hanya ditujukan untuk mengetahui substansi suatu benda atau fenomena. Karena termasuk dalam kategori ilmu praktik, maka kedudukan sebuah teori sangat penting dalam kesejahteraan sosial. Teori

inilah yang berperan menuntun seorang pekerja sosial (*social worker*) dalam melakukan praktik-praktik sosial menangani masalah sosial. Selain itu, teori sangat dibutuhkan dalam konteks penelitian kesejahteraan sosial yang sangat akrab dengan kegiatan para akademisi di bidang kesejahteraan sosial. Sebab teori dapat lahir atau diciptakan dari proses penelitian kesejahteraan sosial yang panjang dan serius.

Upaya melahirkan atau menciptakan teori di bidang kesejahteraan sosial ini sudah sangat mendesak. Terlebih, kondisi ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia tidak tentu arah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan terutama oleh pemerintah, namun upaya penanganan masalah sosial tersebut tak dapat diselesaikan secara maksimal. Penyebabnya adalah ketidaktepatan paradigma maupun teori yang berasal dari Barat. Ini dimafhumi karena ilmu kesejahteraan sosial mengikuti teori "imperialisme profesional" James Midgley adalah impor dari Barat. Sehingga, perlu ada kontekstualisasi terutama dalam konteks paradigma, teori hingga metodologi. Kontekstualisasi tersebut akan dapat direalisasikan jika kita terlebih dahulu memahami bagaimana paradigma-paradigma maupun teori-teori umum yang berkembang dalam kesejahteraan sosial sebagaimana yang diuraikan dalam bab-bab selanjutnya.[]

BAB II
PARADIGMA
KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pembuka

Jika ilmu diibaratkan sebuah bangunan gedung bertingkat, maka paradigma adalah pondasinya. Bisa berbentuk "cakar ayam" atau model lainnya yang memiliki kekuatan untuk menopang bagian-bagian gedung yang sangat berat. Sehingga, ketika muncul terpaan angin dari luar atau bahkan gempa bumi yang mengguncangnya, bangunan tetap berdiri kokoh. Demikian halnya dengan sebuah ilmu, jika mempunyai paradigma yang kokoh maka ilmu tersebut mestinya tetap menjadi kebutuhan masyarakat banyak.

Oleh karenanya, penting di sini kita membahas tentang paradigma kesejahteraan sosial. Pembahasan mengenai paradigma kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mempelajari sejauh mana sesungguhnya kekuatan paradigma tersebut mampu tampil di tengah wacana keilmuan. Selain itu, pemahaman mengenai paradigma

ini akan membantu para akademisi bidang kesejahteraan sosial agar dimungkinkannya untuk merumuskan kembali bangunan paradigma tersebut jika memang diperlukan.

Bab ini berisi uraian tetang penjelasan mengenai paradigma, kegunaannya, pengaruhnya dalam pembentukan teori, hingga perubahan paradigma dalam proses revolusi ilmu pengetahuan. Namun demikian, gagasan revolusi ilmu pengetahuan di mana di dalamnya memungkinkan terjadinya perubahan paradigma, dapat dimungkinkan dengan adanya pengetahuan tentang paradigma-paradigma yang ada sebelumnya. Sebab, bagaimana mungkin kita dapat merubah yang lama tapi tidak tahu sama sekali apa kekurangan paradigma yang lama tersebut. Selanjutnya, kita juga akan melihat bagaimana yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bagian akhir bab ini. Harapan penulis, pembaca dapat mempunyai pemahaman yang utuh terkait paradigma kesejahteraan sosial dan bagaimana kondisinya di Indonesia.

B. Memahami Paradigma

1. Pengertian

Sebelum lebih jauh membahas tentang paradigma-paradigma besar dalam kesejahteraan sosial, ada baiknya kita membicarakan lebih dahulu apa yang dimaksud paradigma itu. Dalam wacana ilmu pengetahuan, paradigma sering disebut-sebut ilmuwan ternama Thomas Kuhn (1970) dalam bukunya yang masyhur berjudul, *The Structure of Scientific Revolutions*. Paradigma dimaksudkan oleh Kuhn sebagai *mode of thought* (cara-berfikir) atau *mode of inquiry* (cara-penyelidikan) yang pada gilirannya akan menghasilkan *mode of knowing* (cara-mengetahui) tertentu pula. Kuntowijoyo (1991: 327-328) menyebut "cara-mengetahui" ini berdekatan dengan istilah-istilah yang dipakai para ahli lain. Seperti

Immanuel Kant, menyebutnya sebagai *skema konseptual,* Marx menamakannya sebagai *ideologi*; dan Wittgenstein melihatnya sebagai *cagar bahasa.* Sehingga, konsep-konsep tersebut sangat berdekatan. Seperti halnya antara paradigma dengan ideologi. Namun jika penulis memahaminya, ideologi adalah seperangkat keyakinan sosial, ekonomi maupun politik di mana ini nantinya yang menjadi pondasi dari paradigma itu sendiri. Sehingga tampaknya kita tidak perlu membedakan secara kontradiktif antara paradigma dengan ideologi tersebut.

Pemikir lainnya, seperti Patton (1975) memberikan pengertian paradigma sebagai *"a world view, a general perspective, a way of breaking down the complexity of the real world."* Dengan demikian, paradigma dapat diartikan sebagai konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. Konstelasi ini dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaan sosial, untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial. Paradigma merupakan tempat kita berpijak dalam melihat suatu realitas (Fakih, 2008).

Secara lebih mudah, paradigma bisa dipahami sebagai cara berfikir yang berpengaruh terhadap cara bertindak seseorang. Paradigma juga berhubungan erat dengan teori, konsep, atau kumpulan pemikiran yang menjadi acuan dalam usaha menelaah, mengkaji, serta membandingkan suatu obyek pembahasan. Paradigma juga sering diidentikkan dengan perspektif yang berisi kumpulan pemikiran atau teori yang mengacu pada kerangka filosofis tertentu. Oleh karenanya, paradigma dapat menjadi alat analisis ataupun pisau bedah dalam menelaah suatu realitas sosial.

Paradigma atau cara pandang yang berbeda, akan melahirkan suatu metode yang tidak sama pula. Contoh ilmiah yang populer adalah tentang revolusi Copernicus

tentang Heliosentrisme. Sebagaimana diketahui, sebelum zaman Renaisance (abad 14-16 Masehi), ilmu pengetahuan masih mempunyai keyakinan ilmiah bahwa bumi adalah pusat jagad raya. Matahari, bulan dan tata surya lainnya mengelilingi bumi, sehingga dikenal dengan paradigma 'geosentrisme'. Namun paradigma tersebut berubah total setelah lahir ilmuan ternama, Nicolaus Copernicus (1473-1543). Copernicus menemukan fakta ilmiah bahwa pusat jagad raya adalah matahari, bukan bumi. Sehingga dikenal dengan 'heliosentrisme.'

Kembali ke pembahasan mengenai paradigma. Paradigma adalah cara pandang, cara berfikir seseorang yang akan menentukan cara bertindak dan tindakan itu sendiri. Perbedaan paradigma akan berpengaruh terhadap cara bertindak. Ilmuwan yang meyakini geosentrisme, akan melahirkan ilmu astronomi yang berbeda dengan ilmuwan yang meyakini heliosentrisme. Di sinilah paradigma dipahami sebagai cara berfikir seseorang.

2. Paradigma Membentuk Teori

Paradigma, dengan demikian, akan menurunkan teori. Antara satu paradigma dengan paradigma lainnya akan menurunkan teori yang berbeda pula. Sebab sesungguhnya paradigma itu adalah seperangkat teori ataupun konsep. Jadi keduanya berhubungan secara imbal balik. Contoh, dalam ilmu sosiologi dikenal paradigma fakta sosial (Ritzer: 1992). Paradigma fakta sosial ini memilliki turunan teori seperti teori fungsional struktural ataupun teori konflik. Di bagian yang lain ada paradigma tindakan sosial yang menurunkan teori aksi, interaksionisme simbolik, atau teori fenomenologi. Jadi masing-masing teori adalah turunan masing-masing paradigma dan tidak akan pernah terjadi pertukaran antar masing-masing turunan tersebut.

Sedangkan dalam kesejahteraan sosial, kita bisa

melihat misalnya ada paradigma konservatif atau liberal. Paradigma konservatif adalah pendukung ekonomi pasar bebas, sehingga turunan dari teori-teori ini adalah yang berdekatan dengannya seperti pemenuhan kebutuhan warga negara yang mestinya disediakan oleh pasar bukan negara. Sebaliknya, dalam pandangan paradigma liberal, campur tangan negara sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, dalam paradigma liberal ini dikenal teori atau konsep tentang negara kesejahteraan (*welfare state*). Ringkasnya, paradigma dengan mencakup berbagai keyakinan sosial, ekonomi dan politik pada akhirnya menurunkan teori-teori tertentu.

Untuk lebih memperjelas paradigma yang dapat membentuk teori ini, tampaknya perlu kita ilustrasikan bagaimana Kuntowijoyo (2004) mempunyai suatu gagasan tentang paradigma Islam. Dalam salah satu artikelnya, Kuntowijoyo menulis tentang *Paradigma Al-Qur'an untuk Perumusan Teori.* Kuntowijoyo tampaknya hendak membentuk paradigma al-Qur'an dengan membentuk suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas sebagaimana al-Qur'an memahaminya. Gagasan paradigma al-Qur'an untuk perumusan teori ini pada akhirnya berbentuk secara melingkar. Paradigma al-Qur'an untuk merumuskan teori, tapi ketika terjadi perumusan teori al-Qur'an dari situlah selanjutnya muncul paradigma al-Qur'an. Kuntowijoyo (2004:17) menulis:

> *"Elaborasi terhadap konstruk-konstruk teoritis al-Qur'an inilah yang pada akhirnya merupakan kegiatan* Qur'anic theory building, *yaitu perumusan teori al-Qur'an. Dari situlah muncul paradigma al-Qur'an."*

Dari aktivitas intelektual Kuntowijoyo ini kemudian lahir ilmu sosial profetik yang sangat terkenal itu. Dari

ilustrasi kerja intelektual yang telah dilakukan oleh Kuntowijoyo ini jelas bahwa paradigma berkaitan erat dengan teori. Paradigma maupun teori ini selanjutnya sangat berguna bagi para akademisi bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan aktivitas-aktivitas akademik lainnya. Misalnya dalam penelitian, seorang peneliti dituntut untuk menetapkan teori. Teori ini yang akan menjadi pisau analisis dalam memahami suatu realitas sosial. Dalam aktivitas penelitian, keterkaitan antara paradigma dengan teori ini juga membantu para peneliti dalam menentukan teori yang tepat.

Sedangkan dalam praktik kesejahteraan sosial, seorang pekerja sosial juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang tepat tentang paradigma dan teori kesejahteraan sosial. Seorang yang mengaku progresif tidak mungkin akan menggunakan teori konservatif dalam praktik kesejahteraan sosialnya, karena ini tidak relevan bahkan kontradiktif. Demikianlah, paradigma adalah kerangka dasar yang berisi bangunan teori. Keduanya saling berkaitan satu sama lainnya.

3. Revolusi Ilmu

Thomas Kuhn adalah ilmuan yang sangat berjasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan, dari pemikirannya muncul tentang gagasan revolusiilmupengetahuanyangmemungkinkanterjadinya perubahan secara fundamental terhadap sutruktur ilmu pengetahuan. Menurut Kuhn (Mustansyir dan Munir, 2004: 154) perkembangan atau kemajuan ilmiah bersifat revolusioner, bukan kumulatif sebagaimana anggapan sebelumnya.

Lebih lanjut, tahapan revolusi ilmu pengetahuan menurut Kuhn dibagi dalam tiga tahap (Verhaak, 1995: 165). *Pertama*, tahap ilmu normal pertama (*normal science I*). Pada tahap ini, paradigma membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah seorang ilmuan.

Di sini para ilmuan secara normal mengembangkan dan menjelaskan paradigma sebagai model ilmiah yang digelutinya. Dalam tahap ini para ilmuan tidak mempertanyakan atau mengkritisi paradigma tersebut sebab dalam kenyataannya keadaan paradigma tersebut normal-normal saja dan masih mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang ada.

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya para ilmuan menemukan berbagai fenomena yang ternyata tidak dapat dijelaskan oleh paradigma dalam *normal science I.* Inilah yang disebut dengan *anomali.* Anomali adalah suatu keadaan yang memperlihatkan adanya ketidakcocokan antara kenyataan (fenomena) dengan paradigma yang dipakai (Mustansyir dan Munir, 2004: 155).

Kedua, menumpuknya anomali menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuan terhadap paradigma dalam *normal science I.* Selanjutnya, paradigma tersebut mulai diperiksa dan kritisi. Di sinilah para ilmuan kemudian menciptakan dan merumuskan paradigma baru agar dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang sudah tidak terjawab lagi oleh paradigma dalam *normal science I.*

Sebuah anomali terjadi karena banyak faktor, bisa disebabkan oleh adanya fenomena-fenomena baru sehingga paradigma lama tidak mampu menjelaskan lagi, atau karena paradigma lama tidak mampu menemukan relevansi dengan fenomena yang terjadi di tempat lain. Yang jelas anomali muncul akibat adanya kondisi terusiknya *normal science I* karena tidak mampu berfungsi secara maksimal.

Ketiga, para ilmuan bisa kembali lagi pada cara-cara ilmiah yang lama sembari memperluas dan mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dipandang bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru inilah yang

dinamakan revolusi ilmiah (revolusi ilmu). Hasil revolusi ilmu pada tahap ketiga ini selanjutnya yang melahirkan *II.* Revolusi ilmu menjadi kebutuhan yang mendesak ketika anomali-anomali pada tahapan kedua di atas terjadi secara serius dan terus-menerus. Kondisi semacam ini semestinya dapat menjadi perhatian serius di kalangan akademisi kesejahteraan sosial.

Demikianlah perubahan ilmu pengetahuan secara revolusioner diawali dari adanya perubahan dari paradigma atau cara pandangnya. Tanpa adanya perubahan terhadap cara pandang tersebut, maka perubahan ilmu pengetahuan tersebut hanya berada di kulit terluar. Sebab perubahan secara paradigmatis berarti perubahan yang bersifat mendasar dan mempengaruhi komponen keilmuannya secara keseluruhan. Di sinilah pentingnya revolusi ilmu pengetahuan yang merubah cara pandang sekaligus merubah komponen ilmu pengetahuannya secara keseluruhan.

C. Mengenal Beberapa Paradigma dalam Kesejahteraan Sosial

Antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, memiliki paradigma yang berbeda-beda, demikian pula dengan ilmu kesejahteraan sosial. Akan tetapi, kadangkala paradigma tersebut kerap bersinggungan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya terutama pada nilai-nilai atau keyakinan sosial, ekonomi maupun politik. Misalnya, Paulo Freire (1986;1981) mencetuskan tiga paradigma besar yakni konservatif, liberal, dan kritis yang kemudian diadopsi secara spesifik dalam dunia pendidikan. Namun, belakangan paradigma tersebut banyak diadopsi oleh para aktivis pergerakan sosial (fakih: 2008).

Saya pun dalam satu kesempatan pernah menulis paradigma yang dikembangkan Freire ini dalam disiplin ilmu kesejahteraan sosial (Huda, 2011: 85-111). Pendek

kata, memang kita dapat mengambil sebuah benang merah bahwa paradigma itu kadangkala sifatnya umum. Dia mengandung nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang mungkin memiliki kesamaan antara satu paradigma keilmuan dengan paradigma keilmuan yang lainnya. Menurut saya, ini tidak menjadi soal asalkan masing-masing paradigma tersebut mempunyai konsep yang jelas.

Dalam tradisi ilmu kesejahteraan sosial, kita dapat melihat adanya beberapa paradigma yang juga dikenal oleh disiplin ilmu lainnya. Merujuk Mullaly (1997) beberapa paradigma besar kesejahteraan sosial yang bisa diungkap adalah paradigma neo-konservatif, liberal, sosial demokratik, dan Marxist. Namun demikian, jika kita telaah lebih lanjut, beberapa paradigma tersebut secara filosofis bersinggungan dengan disiplin ilmu lain, seperti ekonomi (neo-konservatif), politik (liberal), sosiologi (Marxist). Namun ini tidak menimbulkan masalah yang serius, sebab dalam realitasnya paradigma-paradigma tersebut mengandung nilai-nilai maupun keyakinan-keyakinan tertentu yang pada akhirnya berpengaruh besar terhadap kondisi kesejahteraan sosial.

Bagian ini menjabarkan tentang empat paradigma besar tersebut yakni neo-konservatif, liberal, sosial demokratik, dan marxist. Penjelasan tentang empat paradigma besar ini bukan berarti menutup kemungkinan adanya paradigma lain yang berkembang. Ulasan ini setidaknya menjadi gambaran besar dari paradigma yang dikenal umum dalam ilmu kesejahteraan sosial.

1. Neo-Konservatif

Neo-konservatif mempunyai keterkaitan yang erat dengan paradigma konservatif. Sebuah pandangan yang lahir dan mengakar kuat di masyarakat Barat terutama di Inggris dan Amerika Utara. Pandangan konservatif ini terutama diikuti dan dipraktikkan sebagai pandangan

hidup dan kenegaraan di abad ke-19 atau sebelum masa resesi hebat tahun 1930-an. Pandangan konservatif ini pada mulanya lebih banyak memberikan pengaruh pada aliran-aliran politik konservatif, seperti Partai Konservatif di Inggris, Partai Republik di di AS, atau Partai Konservatif Progresif di Kanada. Maka tokoh-tokoh di negara ini, seperti Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris di akhir abad 19; John Adam, Presiden kedua AS; John A. Macdonald dan George-Etienne Cartier, dua orang *founding father* Kanada dikenal sebagai pemegang aliran konservatif ini.

Dalam wacana ekonomi atau negara kesejahteraan (*welfare state*), pandangan konservatif ini menjadi sangat dominan diterapkan terutama di negara-negara seperti Inggris maupun Amerika Utara. Namun, dominasi pandangan ini mulai menyusut setelah dunia mengalami depresi hebat (*great depression*) pada 1930-an. Pasca itu, karena telah terbukti gagal, maka dominasi konservatif digantikan oleh pandangan liberal hingga resesi ekonomi pada tahun 1970-an. Rentang waktu 1930 hingga 1970-an praktis ide konservatif memudar. Namun, benih-benihnya mulai mengemuka kembali setelah pandangan liberal mengalami krisis seiring terjadinya krisis minyak yang menyulut krisis ekonomi pada tahun 1970-an. Kemunculan kembali pandangan konservatif pada 1970-an inilah yang melahirkan ide-ide konservatif baru yang kemudian lebih dikenal dengan neo-konservatif.

Meskipun menggunakan kata "neo" sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup mendasar antara neo-konservatif dengan konservatif sendiri. Meskipun, ada juga yang membedakannya, yakni jika neo-konservatif lebih terlihat kritis dan menyerang terhadap ide *welfare state* dibandingkan konservatif (Mullaly, 1997: 42). Namun secara umum ide-ide dasarnya masih tetap sama, oleh karena itu, di sini saya akan menguraikan tentang makna konservatif. Makna ini dengan sendirinya akan

merujuk pada neo-konservatif.

Sebagaimana asal katanya (*to conserve*) konservatif cenderung menentang perubahan. Konservatif mempertahankan nilai-nilai tradisional, individualisme, kompetisi, kebebasan, dan etika kerja. Kecenderungan konservatif untuk menentang perubahan karena perubahan dianggap akan melahirkan dampak yang negarif daripada dampak yang positif. Sebagai gantinya, konservatif berusaha memperkuat struktur sosial yang telah ada. Dalam hal ekonomi, konservatif memandang tidak diperlukannya intervensi negara dan mendukung ekonomi pasar bebas (*free-market economy*). Salah satu slogan yang sangat terkenal adalah *"that government governs best wich governs least."* (Zastrow, 2004:12). Slogan lain yang juga dikenal di Perancis seperti *laissez faire et laissezpasser, le monde va delui-meme* (*don't interfere, the world will take care of itself*). Jadi semakin sedikit pemerintah melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Pandangan konservatif juga mendukung sistem ekonomi *laissez-faire*. Berbeda dengan sistem *Keynesian* yang mendukung peran negara dalam melakukan intervensi terhadap kegiatan ekonomi, *laissez-faire* menolak intervensi negara dalam kegiatan ekonomi (Huda, 2009: 95-96).

Pasar bebas memiliki mekanisme tersendiri terutama dalam mensejahterakan rakyat. Seperti dalam pandangan Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776) pasar bebas memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur dirinya atau yang dikenal dengan *the invisible hand* (tangan ghaib). "Tangan ghaib" inilah yang diyakini berperan dalam mengatur dan mendistribusikan kesejahteraan. Sistem ekonomi seperti ini dikenal sebagai pandangan yang paling klasik namun banyak dikembangkan di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Pada masa orde

baru Presiden Soeharto dikenal sebagai pendukung gagasan ini sehingga pembangunan diarahkan kepada stabilitas ekonomi. Seperti teori *trickle down effect,* Soeharto percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sendirinya akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Meskipun pada kenyataannya kesenjangan sosial justru terjadi, misalnya antara Jawa-luar Jawa, desa-kota, Jakarta-luar Jakarta dan seterusnya. Dalam trilogi pembangunan lebih mengutamakan stabilitas terlebih dahulu, sedangkan pertumbuhan dan pemerataan dilakukan belakangan. Sehingga pembangunan sosial dilakukan dengan simbol *growth first and distribution later* (Sumodiningrat, 2007: 22). Kesenjangan terjadi karena 'kran" yang diharapkan dapat meneteskan kesejahteraan ke bawah justru mampet dan tidak mengalir ke bawah sama sekali. Kegagalan yang terjadi dalam pandangan ini melahirkan kritik dari berbagai pihak. Ide "tangan ghaib" mustahil karena pada dasarnya tangannya memang tidak ada, begitu kira-kira kritik tersebut.

Lantas bagaimana pengaruh pandangan ini terhadap kesejahteraan sosial? Konservatif menganggap bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab masyarakat masing-masing, bukan tanggungjawab negara. Oleh sebab itu, konservatif mendukung kebijakan residual dari negara. Kebijakan residual dimaksudkan sebagai kebijakan yang hanya akan dilakukan apabila keluarga, agama, atau lembaga-lembaga sosial lainnya sudah tidak mampu lagi menjalankan perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga kebijakan residual bersifat temporal dan suatu saat dapat dihentikan apabila dipandang kebutuhan masyarakat sudah tercukupi. Kesejahteraan sosial dipandang sebagai hasil kerja keras masyarakat sendiri. Sehingga kemiskinan atau pengangguran bukan dimaksudkan sebagai kesalahan kebijakan tetapi lebih disebabkan

oleh kegagalan personal, misalnya karena malas, tidak bertanggungjawab maupun kontrol pribadi yang lemah. Tidak heran apabila konservatif cenderung menyalahkan korban *(blaming the victim)* dalam memandang penyebab masalah sosial.

Seperti halnya doktrin yang berkembang dalam kapitalisme pasar bebas, pandangan ini meyakini nilai-nilai seperti *survival of the fittest.* Nilai ini menganggap hanya orang-orang yang kuat atau yang mampu menyesuaikan diri yang mampu bertahan hidup. Ini artinya, jika dihubungkan dalam konteks kesejahteraan, maka seseorang dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tanggung jawabnya sendiri, dan jika dia mengalami kegagalan dalam hidup maka itu adalah akibat ketidakmampuannya dalam berkompetisi. Inilah setidaknya gambaran mengenai paradigma konservatif (neo-konservatif).

2. Liberal

Dalam mendiskusikan tentang liberalisme, penting dicatat adalah perbedaan antara liberalisme klasik dan liberalisme modern. Sebab liberalisme klasik cenderung identik dengan konservatisme yang dominan terutama di Inggris dan Eropa Barat (Mullaly,1997:206). Untuk menyebut beberapa tokoh yang menganut liberal klasik seperti Jeremy Bentham dan Adam Smith. Sedangkan liberalisme modern, memiliki perbedaan dengan liberalisme klasik/konservatisme sebagaimana yang akan dipaparkan selanjutnya. Tokoh liberalisme modern seperti John Stuart Mill. Liberalism yang dijelaskan dalam buku ini mengacu pada liberalisme modern.

Nilai-nilai yang dianut liberalisme ini secara substansial sesungguhnya mempunyai kesamaan dengan neo-konservatif. Yakni keduanya sama-sama percaya terhadap kebebasan (*freedom*), individualism dan ketidaksamaan (*non-egalitarian*) (Mullaly,1997:53).

Akan tetapi jika dikaitkan dengan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kebebasan tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Neo-konservatif menganggap bahwa kebebasan yang dimaksud adalah bebas dari campur tangan Negara. Sehingga, negara-negara yang menganut paradigma ini biasanya sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem ekonomi *laissez-faire.* Sistem ini sangat anti terhadap campur tangan negara sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paparan sebelumnya tentang neo-konservatif.

Sedangkan liberalisme meyakini bahwa kebebasan yang dimaksudkannya adalah bebas dari musuh-musuh sosial seperti pengangguran, kemiskinan, kelaparan atau masalah-masalah sosial lainnya. Namun, liberalisme tetap mendasarkan diri pada perdagangan bebas meski dengan regulasi negara. Maka sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi campuran atau yang biasa disebut sebagai *a mixed economy.*

Demikian halnya individualisme, karena liberalisme berpegangan kepada adanya kewajiban peran serta negara dalam membebaskan rakyatnya dari musuh-musuh sosial, maka secara bersamaan pemerintah harus melakukan intervensi untuk kesejahteraan individu. Dengan kata lain, liberalisme berpandangan bahwa hidup sejahtera adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, liberalisme mendukung *welfare state.* Namun, w*elfare state* dalam pandangan paradigma ini tidak lebih sebagai instrumen untuk mengoreksi dampak negatif dari sistem kapitalisme. Sehingga *welfare state* tidak murni untuk mendorong keadilan sosial atau perubahan ekonomi. Ketimbang proaktif, liberalisme cenderung reaktif. Kecenderungan reaktif ini dapat dilihat dari konsep *welfare state*-nya yang 'social minimum.' Yakni hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial secara minimum.

Program pelayanan sosial dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Tidak seperti kaum

konservatif yang memandang bahwa kebijakan sosial adalah pemborosan dan akan melahirkan instabilitas ekonomi, kaum liberal memandang bahwa kebijakan sosial adalah kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Pandangan seperti inilah yang memberikan pondasi yang kuat terhadap pembangunan sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) khususnya dalam bentuk institusional. Model institusional ini dibedakan dengan model struktural yang dianggap lebih ideal. Sebab model institusional ini masih terbatas pada pemenuhan hak-hak dasar minimal. Misalnya, standar minimal pelayanan kesehatan, perumahan atau pendidikan.

Dari sini terlihat jelas perbedaan antara neo-konservatif dengan liberalisme, terutama jika dilihat dari konteks intervensi negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Memang jika ditelisik lebih lanjut, sebagaimana kesamaan substansi nilai yang dianut keduanya, dalam hal ekonomi pun keduanya sama-sama berpedoman pada ekonomi kapitalisme. Hanya saja yang membedakan adalah adanya regulasi negara sebagaimana yang dipegang oleh para penganut liberalisme. Makanya, banyak kalangan menyebut sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara semacam ini adalah ekonomi campuran (*a mixed economy*) yang dihadap-hadapkan dengan ekonomi *laissez-faire* dalam pandangan neo-konservatif (, 1997: 55).

Sebagaimana halnya neo-konservatif, individualisme adalah kata kunci penting memahami paradigma ini. Sehingga secara prinsip sesungguhnya kedua paradigma ini dibangun oleh nilai-nilai sosial, ekonomi maupun politik yang sama. Hanya saja, liberalisme selangkah lebih humanis dibandingkan dengan neo-konservatif.

Nilai individualisme berdampak kepada cara pandang liberal yang menganggap bahwa masyarakat dipandang secara atomistik dan otonom. Artinya, paradigma ini

menilai masyarakat bukan secara komunal namun tidak lebih dari sekumpulan orang yang individual. Dampaknya, tidak ada kewajiban atau tanggung jawab antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Ketiadaan tanggung jawab kepada sesama manusia ini kemudian dilimpahkan kepada negara. Saya menilai pelimpahan tanggung jawab sosial kepada negara ini adalah manipulasi karena secara sosial paradigma ini menolak tanggung jawab sesama manusia. Ini tentu berbeda dengan nilai sosial yang dianut masyarakat di Indonesia yang komunal dan anti individualistik.

Paradigma liberal juga didasarkan kepada kompetisi seperti halnya kapitalisme. Tiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak, namun paradigma ini mengakui ada seseorang yang mengalami kegagalan dalam mendapatkan kehidupan yang layak tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengambil keuntungan dari peluang yang ada.

Problem sosial menurut paradigma ini dipandang sebagai hasil dari disorganisasi sosial (*social disorganization*). Ini mirip patologi sosial yang menganggap masyarakat dalam kondisi sakit atau sehat. Hanya saja disorganisasi sosial menganggap masyarakat sebagai struktur yang *organized* dan *disorganized* atau *integrated* dan *disintegrated.* Masyarakat yang *organized* adalah di samping karena keserasian hubungan antarbagian juga didukung oleh seperangkat pengharapan/tujuan dan seperangkat aturan (Julian, 1986:13). Pendeknya, disorganisasi sosial mempunyai konsep sentral *social rules.* Dalam kehidupan bermasyarakat, *social rules* di satu pihak berfungsi dalam mewujudkan koordinasi di antara bagian-bagian yang berbeda dalam sistem sosial, dan di lain pihak berfungsi mengatur perilaku warga masyarakat. Kondisi kurang atau tidak berfungsinya *social rule* mengakibatkan berkurangnya kekuatan mengikat baik bagi koordinasi antarbagian

maupun dalam melakukan kontrol terhadap perilaku individu. Kenyataan inilah yang mendorong terjadinya disorganisasi sosial (Soetomo, 2008: 83).

Paradigma liberal mempengaruhi praktik pekerjaan sosial khususnya dalam tiga hal (Mullaly, 1997: 60). *Pertama,* reformasi personal yang didasarkan kepada teori sistem. Sebagaimana yang menjadi salah satu ciri paradigma ini, kesalahan berada dalam aras individu. Konsekuensinya, perbaikan diarahkan pada wilayah individu. *Kedua,* reformasi sosial yang terbatas dengan pendekatan model ekologis. Paradigma liberal memang sedikit lebih humanis dibandingkan dengan neo-konservatif yakni meletakkan kesalahan pada aspek lingkungan. Namun, lingkungan di sini adalah lingkungan yang terbatas (lingkungan terdekat), sehingga reformasi sosial dilakukan terhadap lingkungan terdekat. *Ketiga,* advokasi yang dilandaskan kepada pandangan pluralis. Pandangan ini menyebutkan bahwa dalam masyarakat kapitalis, selalu terjadi kompetisi. Kompetisi tersebut akan melahirkan kelompok yang menang dan kalah. Advokasi diarahkan membela hak-hak dari kelompok yang kalah tersebut. Dengan demikian, advokasi ini tidak lebih sebagai koreksi atas sistem kapitalisme yang mempunyai dampak negatif sebagaimana halnya *welfare state.*

3. Demokrasi Sosial

Mullaly (1997:72-74) mencatat demokrasi sosial mempunyai tiga nilai penting yakni: keadilan, kebebasan dan solidaritas. Namun dari tiga nilai ini muncul dua nilai turunan yaitu partisipasi demokrasi (dari keadilan dan kebebasan) dan humanitarianisme (dari keadilan dan solidaritas). Isu-isu tentang keadilan, kebebasan dan solidaritas selanjutnya menjadi keyakinan yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial politik daripada penganut paradigma demokrasi sosial ini.

Demokrasi sosial di sini identik dengan demokrasi sosial klasik sebagaimana yang menjadi kritik Giddens (2000) dalam proyek "jalan ketiga"-nya (*third way*). Edi Suharto (2002) menjelaskan demokrasi sosial klasik ini memandang pasar bebas sebagai sesuatu yang menghasilkan banyak dampak negatif. Paham ini percaya bahwa semua ini dapat diatasi lewat intervensi negara terhadap pasar. Negara berkewajiban untuk menyediakan segala yang tidak bisa diberikan oleh pasar. Intervensi pemerintah dalam perekonomian dan sektor-sektor kemasyarakatan adalah mutlak diperlukan. Kekuatan publik dalam masyarakat demokratis adalah representasi dari kehendak kolektif. Ini disebabkan partisipasi demokrasi dalam demokrasi sosial sangat diutamakan, terlebih didukung oleh nilai solidaritas sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Beberapa ciri dari demokrasi sosial yang dapat disebutkan misalnya (Giddens, 2000:8): *Pertama*, negara mempunyai keterlibatan yang cukup luas dalam kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri karena akan menimbulkan dampak-dampak negatif terutama ekonomi yang menerapkan sistem kapitalisme pasar bebas. *Kedua*, kolektivisme. Kolektivisme ini mementingkan kerjasama daripada kompetisi sebagaimana yang diterapkan pada sistem kapitalisme; menegaskan kewajiban daripada hak; dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan hak-hak individual. *Ketiga*, negara kesejahteraan yang komprehensif sangat direkomendasikan menurut paradigma ini. Negara kesejahteraan ini pun dimaksudkan sebagai satu instrument yang melindungi warga negara sejak dalam buaian hingga liang lahat (*from cradle to the grave*).

Kata kunci penting untuk memahami paradigma demokrasi sosial dalam konteks kesejahteraan sosial adalah pandangan prinsipnya mengenai negara

kesejahteraan. Negara kesejahteraan dalam pandangan demokrasi sosial tentunya berbeda dengan masyarakat kapitalis. Perbedaan ini oleh Mishra (1981) disebut dengan "structural model." (Mullaly,1997:77). Mengenai perbedaan ini, negara kesejahteraan versi demokrasi sosial dalam mendistribusikan kesejahteraan didasarkan kepada gagasan "to each according to his needs" (kepada masing-masing [rakyat] berdasarkan kepada kebutuhannya). Dengan kata lain, pemenuhan hak masyarakat didasarkan kepada konsumsi kolektif, seperti universalisme, komprehensif dan pelayanan sosial gratis seperti kesehatan dan pendidikan (Mishra,1981:133).

Distribusi terhadap kebutuhan-kebutuhan warga negara ini hanya dapat dilakukan di bawah kendali negara. Memang seperti halnya paradigma liberal juga berpandangan mengenai kendali negara dalam distribusi kesejahteraan ini. Akan tetapi, bedanya adalah demokrasi sosial menganggap bahwa pelayanan sosial tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar minimum dari warga negara, akan tetapi semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat harus dipenuhi oleh negara (pemerintah).

Pemegangan terhadap prinsip nilai *to each according to his needs* ini mengingatkan kita kepada slogan pemerintahan China pada masa pemerintahan Mao Tse Dung yang dikenal memegang prinsip-prinsip sosialisme. Pada mulanya, pemerintahan Mao menerapkan sistem sosialisme murni dengan mendistribusikan kesejahteraan tanpa pandang bulu apakah rakyatnya bekerja giat atau tidak, karena prinsipnya adalah solidaritas atau kolektivisme. Sehingga, slogan yang dianut dan sangat masyhur adalah *from each according to his ability, to each according to his need.*

Ringkasnya, masing-masing berdasarkan kemampuannya akan mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, misalnya ada dua orang yang satu bekerja giat dan membayar pajak besar kepada negara,

dan satunya tidak bekerja sama sekali, namun hak kesejahteraan yang diterima sama. Ini karena prinsip distribusi kesejahteraan didasarkan kepada kebutuhan masyarakat secara kolektif dan memegang prinsip solidaritas. Menurut saya, ini adalah ciri khas dari paradigma demokrasi sosial yang sempat diterapkan di China.

Namun demikian, kondisinya berbeda ketika rezim Mao digantikan oleh Deng Xiao Ping (1904-1997) pada kurun waktu 1970-an hingga 1990-an. Dalam slogan yang dikenal pada masa pemerintahan Mao di atas, Deng hanya merubah huruf "n" dengan huruf "d". Sehingga, yang awalnya *to each according to his need*, berubah menjadi *to each according to his deed* (Usman, 2006). Perubahan ini sangat filosofis, sebab kata *need* merepresentasikan paradigma demokrasi sosial, sedangkan *deed* adalah representasi dari paradigma neo-konservatif. Kenapa demikian? Sebab *deed* menggambarkan setiap rakyat hanya akan memperoleh kesejahteraan atas apa yang telah diusahakannya, bukan berdasarkan kebutuhan. Jadi, *deed* mensyaratkan warga untuk bekerja keras agar memperoleh kesejahteraan dari negara (pemerintah).

Maka sejak saat itu, China dikenal sebagai negara komunis yang mengadopsi prinsip-prinsip kapitalisme. Sehingga, saat itu dikenal slogan yang sangat pragmatis yang kira-kira berbunyi: *Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus.* Slogan ini menggambarkan ketidakpedulian China pada ideologi bangsa yang dianutnya, sebab meski komunis tapi mengadopsi prinsip-prinsip kapitalisme. Demikianlah paradigma demokrasi sosial yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kolektivisme maupun solidaritas.

4. Marxist

Paradigma marxisme adalah antitesa dari kapitalisme

yang identik dengan paradigma neo-konservatif sebagaimana telah dijelaskan di awal. Paradigma marxisme ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pendiri gagasannya yakni Karl Marx seorang ideolog yang sangat terkenal. Paradigma marxisme ini adalah satu aras dengan demokrasi sosial yang banyak diasosiasikan dengan kelompok kiri. Secara istilah, marxisme kerap disamakan dengan sosialisme walaupun beberapa ahli membedakan hal ini. Seorang ahli filsafat Franz Magnis-Suseno (2003:5) mengatakan bahwa Marxisme tidak sama dengan Komunisme. Komunisme, sejak Revolusi Oktober 1917 di bawah kepemimpinan Lenin, adalah gerakan dan kekuatan politis-ideologis internasional partai-partai Komunis yang menggunakan "Marxisme-Leninisme" sebagai doktrin dan ideologi formal mereka. Jadi, Marxisme hanyalah salah satu komponen dalam sistem ideologi Komunisme, meski kaum Komunis memang selalu mengklaim merekalah pewaris resmi konsepsi Marx tersebut. Namun, istilah Komunisme sendiri, sebelum Lenin memonopoli istilah tersebut, telah digunakan untuk mengacu pada cita-cita utopis masyarakat, di mana semua kepemilikan pribadi (*private ownership*) dihapus dan dianggap sebagai milik umum (*public property*) guna mengeliminasi *gap* antara kaum borjuis dan proletar serta membantu dalam menciptakan kemakmuran bersama.

Nilai-nilai yang mendasari marxisme adalah kebebasan, keadilan dan persaudaraan. Memang jika diamati maka nilai kebebasan ini sama dengan neo-konservatif atau bahkan liberal. Akan tetapi nilai kebebasan yang dianut oleh marxisme tentu saja berbeda dengan keduanya. Jika neo-konservatif menyamakan kebebasan dengan ketidaksamaan dan liberalisme mengartikan kebebasan dengan kesamaan peluang, maka marxisme menganggap kebebasan dengan kesamaan lingkungan ekonomi atau emansipasi manusia. Emansipasi mengindikasikan

adanya persamaan dan persaudaraan, sehingga setiap manusia mempunyai kedudukan yang setara dan tidak diizinkan untuk melakukan eksploitasi.

Sayangnya eksploitasi terjadi dalam kehidupan masyarakat, ditandai dengan apa yang disebut Marx sebagai "alienasi" (keterasingan). "Alienasi" adalah suatu keadaan di mana individu terasing dari dirinya sendiri. Keterasingan ini terjadi salah satu indikasinya adalah manusia selalu bergantung kepada hasil kerja manusia lainnya (Magnis-Suseno, 2003: 89-94). Keterasingan ini tentu saja mengingkari prinsip keadilan dan persaudaraan. Apalagi, dalam pandangan marxisme eksploitasi satu kelas sosial terhadap kelas sosial lainnya sangat ditentang. Eksploitasi sosial setidaknya adalah salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya berbagai problem sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ketimpangan sosial terjadi karena adanya eksploitasi yang tidak adil ini.

Pemikiran lainnya yang cukup mempengaruhi paradigma ini adalah tentang materialisme sejarah. Marx menyatakan bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, melainkan sebaliknya keadaan sosial merekalah yang menentukan kesadarannya. Keadaan sosial manusia, menurut Marx, adalah produksi atau pekerjaannya. Manusia ditentukan baik oleh apa yang mereka produksi maupun bagaimana mereka berproduksi. Pandangan inilah yang kemudian disebut materialis karena sejarah dianggap ditentukan oleh syarat-syarat produksi material (Magnis-Suseno, 2003: 138-140). Dalam materialisme sejarah ini, Marx berpandangan bahwa yang menjadi motor sejarah bukanlah ide sebagaimana Hegel. Akan tetapi adalah kondisi material yang sedang dialami dan diperjuangkan.

Kondisi material tersebut adalah kapitalisme yang timpang karena menempatkan kelas borjuis sebagai

kelas yang melakukan eksploitasi terhadap kelas proletar. Marx beranggapan bahwa terjadi dialektika antara struktur atas dan bawah. Awalnya, dialektika terjadi pada struktur bawah (basis) masyarakat, yang nantinya menggerakkan struktur atas (supra-struktur). Basis masyarakat bersifat ekonomis dan tersusun atas dua aspek, yaitu cara berproduksi (teknik dan alat-alat) dan relasi ekonomi (sistem kepemilikan, pertukaran dan distribusi barang). Sementara itu, supra-struktur, yang berdiri di atas basis ekonomi, terdiri atas kebudayaan, hukum, ilmu pengetahuan, kesenian, agama, dan ideologi (Budiardjo, 2008: 143). Akibat dialektika ini, masyarakat berkembang menjadi masyarakat kapitalis yang tidak adil. Dialektika ini disebabkan oleh terciptanya dua kelas yang saling kontradiktif yakni borjuis (pemilik modal) dan proletar (buruh) akibat proses produksi yang tidak adil.

Oleh karena proses dialektika ini, marxisme beranggapan bahwa masalah sosial terjadi bukan karena kesalahan individu (seperti neo-konservatif); industrialisasi (seperti liberalisme); atau hasil dari konflik sosial antara kelompok masyarakat (seperti demokrasi sosial). Akan tetapi, masalah sosial terjadi sebagai hasil dari sistem produksi kapitalisme yang tidak adil.

Atas masalah ini, solusi yang diinginkan oleh marxisme sama dengan demokrasi sosial yakni negara kesejahteraan struktural. Model ini diimplementasikan dengan melakukan pelayanan sosial berdasarkan kebutuhan (*need*) (seperti ciri khas demokrasi sosial) dengan prinsip universal, komprehensif, memadai, dan gratis. Meskipun memiliki kesamaan dengan demokrasi sosial (ditunjukkan dengan prinsip *need* tadi), yang menjadi perbedaan dengan demokrasi sosial adalah anggapan demokrasi sosial yang mengatakan bahwa negara kesejahteraan di bawah masyarakat kapitalisme dianggap sebagai batu loncatan untuk

menuju masyarakat sosialis. Marxist tidak sepakat dengan pendapat demokrasi sosial tersebut. Marxisme menganggap negara kesejahteraan yang diterapkan oleh masyarakat kapitalis sangat kontradiktif. Jika hal itu dilakukan, maka hal itu hanya bagian dari upaya untuk memperkuat sistem kapitalisme liberal (Mullaly, 1997: 89).

Sebagai paradigma kesejahteraan sosial, marxisme akan berpengaruh besar terhadap praktik kesejahteraan sosial. Sebagaimana paradigma-paradigma lainnya, praktik kesejahteraan sosial dibentuk oleh nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing pekerja sosial. Akhirnya, bagi para pekerja sosial yang paling penting adalah mempelajari paradigma-paradigma ini dan bahkan melakukan kritik jika paradigma tersebut dirasa tidak memiliki relevansi dengan kondisi sosial yang ada. Sebab uraian ini tidak lain hanyalah mendeskripsikan paradigma-paradigma yang ada sehingga pekerja sosial dapat mempelajarinya untuk kemudian dapat melakukan kritik maupun perbaikan terhadapnya.

D. Krisis-Krisis Paradigma

Beberapa paradigma yang telah dipaparkan di atas, mengalami pasang surut baik di dunia maupun dalam konteks negara-negara tertentu. Memang tentang paradigma ini tidak mengenal benar atau salah, yang satu lebih benar dibandingkan dengan yang lainnya. Sebab, ini hanya menyangkut persoalan dominasi dan relevansi pemberlakuan paradigma tersebut. Dominasi paradigma neo-konservatif di Barat misalnya boleh saja menemukan bentuknya yang ideal, akan tetapi tidak serta merta dapat diterapkan di negara-negara berkembang karena tidak relevan, demikian pula sebaliknya.

Namun demikian, dominasi paradigma adalah sebuah proses sosial yang tidak mudah untuk dikendalikan. Proses dominasi itu terjadi secara sistematis oleh

para akademisi dan para pengambil kebijakan (*policy maker*). Meski, bukan berarti proses dominasi tersebut tidak bisa diarahkan dan dikendalikan, apalagi hal tersebut mendesak untuk dilakukan demi penegakan kesejahteraan sosial. Bagian ini mengulas tentang bagaimana pergeseran antar paradigma terjadi dan dominasi neoliberalisme yang kini makin menjadi-jadi dan mengancam nasib kesejahteraan sosial. Ancaman tersebut hanya dapat dihadapi dengan melawan dominasi sekaligus mengarahkan perubahan paradigma yang lebih relevan dengan Indonesia.

Era sebelum zaman *malaise* (*the great depression*) sekitar tahun 1930-an adalah kejayaan paradigma konservatif. Negara-negara maju di dunia percaya dan yakin dengan doktrin ekonomi pasar bebas (*free market*) yang meminimalkan peran negara dalam intervensi ekonomi (*laissez-faire*). Ide-ide pembangunan ekonomi *ala* Adam Smith yang mengatakan bahwa sistem pasar bebas memiliki mekanisme tersendiri dalam distribusi kesejahteraan dengan konsep *the invisible hand* (tangan ghaib) diyakini oleh banyak pihak.

Tanpa diatur oleh negara, kesejahteraan dalam mekanisme pasar bebas akan menetes ke bawah dengan sendirinya, teori ini lebih dikenal dengan istilah *trickle down effect*. Keyakinan ekonomi semacam ini adalah sangat khas yang melekat pada paradigma konservatif (neo-konservatif) sebagaimana dijelaskan di atas. Dan keyakinan ini menjadi paradigma sangat dominan di negara-negara maju pada waktu itu.

Namun dominasi ini lambat laun luntur seiring dengan zaman malaise (*the great depression*) yang terjadi pada tahun 1929. Kehidupan yang makmur sekitar tahun 1920-an membawa kebiasaan-kebiasaan baru bagi warga AS saat itu sehingga memaksa terjadinya *speculative boom*. Ratusan ribu orang menanamkan uangnya di bursa saham secara agresif hingga ibarat gelembung permen

karet yang makin membesar. Puncak gelembung tersebut terjadi pada Kamis, 24 Oktober 1929 di mana Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun sebesar 2,09%. Sehingga saat itu dikenal dengan istilah *Black Thursday*. Krisis berlanjut ke seluruh dunia dan menyentuh berbagai sendiri kehidupan masyarakat. Selanjutnya, krisis ini juga diikuti oleh krisis kepercayaan terhadap paradigma konservatif.

Lambat namun pasti, paradigma konservatif mulai banyak ditinggalkan. Negara-negara di Eropa dan AS kemudian beralih kepada sistem *Keynesian* yang menghendaki peran negara dalam intervensi kegiatan ekonomi di mana semangat ini terdapat dalam paradigma liberal. Banyak legislasi sosial yang diundang-undangkan setelah perang dunia II seperti *Beveridge Report* di Inggris, *New Deal* di AS, proposal *Green Book* bagi rekonstruksi pasca perang di Kanada. Munculnya legislasi-legislasi sosial ini menandai era baru di mana orang banyak menyebutnya seperti "post-industrial society", "mixed economy", "welfare capitalism", "Fordist capitalism", atau yang lebih umum orang menyebutnya sebagai *welfare state* (negara kesejahteraan) (Mullaly,1997:6).

The Great Depression dalam kenyataannya telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap paradigma konservatif dan beralih kepada sistem *Keynesian* yang cenderung merekomendasikan campur tangan negara dalam urusan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sistem *Keynesian* ini sebagaimana terdapat dalam paradigma liberal sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam kaca mata *Keynesian*, intervensi pemerintah dalam urusan kesejahteraan warga negara dipercaya sebagai kebijakan yang paling ampuh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang meningkat di berbagai negara. Zaman pasca *malaise* inilah negara kesejahteraan menapaki masa keemasan. Bahkan antara tahun 1940-70an muncul sebuah "konsensus kesejahteraan" (*welfare*

consensus) di kalangan masyarakat Barat bahwa negara kesejahteraan adalah sesuatu yang dianggap baik *"good thing"* (Bessant, et.al., 2006:39).

Namun demikian, campur tangan pembangunan sosial oleh negara dalam formula negara kesejahteraan mengalami guncangan hebat ketika dunia kembali dilanda krisis besar di tahun 1970-an. Krisis negara kesejahteraan ditampakkan dengan mulai ditinggalkannya konsep pelayanan dan jaminan sosial oleh para pemimpin dunia. Krisis ekonomi internasional terjadi karena kenaikan tajam harga minyak dengan diawalinya monopoli harga oleh OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*/organisasi negara-negara pengekspor minyak) pada tahun 1973, kemudian diikuti oleh 'stagflasi' dan kemerosotan ekonomi. Dalam konteks inilah sebagaimana diungkapkan oleh Mishra (1984) dalam *The Welfare State in Crisis* negara kesejahteraan mengalami krisis kepercayaan ditandai dengan mulai ditinggalkannya konsep negara kesejahteraan dan melirik sistem ekonomi pasar bebas sebagai gantinya (Huda, 2009: 122).

Menguatnya cengkraman globalisasi terhadap dunia juga menjadi faktor yang sangat penting terhadap krisis yang dialami negara kesejahteraan. Memudarnya negara-bangsa (*nation-state*) oleh gempuran arus globalisasi telah memaksa minimalnya peran negara dalam proses intervensi pemerintah terhadap persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial di setiap negara. Mishra (2000) dalam bukunya *Globalization and welfare state* menulis bahwa globalisasi telah membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan sosial. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menjual kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara-negara berkembang dan negara-negara Eropa Timur agar memperkecil pengeluaran pemerintah, memberikan pelayanan sosial

yang selektif dan terbatas, serta menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta (Suharto, 2007:63).

Momentum penting dari krisis yang terjadi dalam negara kesejahteraan adalah naiknya Margareth Thatcher di Inggris dalam tampuk kekuasaan di Inggris di tahun 1979 dan Ronald Reagen di AS satu setengah tahun kemudian. Keduanya dikenal sebagai penganut sistem ekonomi sayap kanan (*right wing*) yang mendukung neo-liberalisme dan pasar bebas. Kelompok ini juga sering disebut "kanan baru" (*new right*), "ekonom neo-liberal" (*neo-liberal economics*) atau "ekonom rasional" (*economic rationalism*) seperti yang ada di Australia. Para penulis terkenal yang menyokong aliran ini antara lain Milton Friedman, Kenneth Arrow dan Friedrich von Hayek yang secara terang-terangan menentang sistem ekonomi *Keynesian*. Campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial justru dianggap merusak kebebasan dan independensi warga negara sehingga berdampak sangat buruk terhadap kegiatan ekonomi. Hayek menulis *"...it destroyed freedom, undermined the spirit of independence and was bad for the economy"* (Bessant, et.al.,2006:50).

Pendek kata, krisis dunia pada tahun 1970-an melahirkan kembali paham konservatif yang banyak disebut dengan paradigma neo-konservatif di atas. Ini artinya, krisis-krisis paradigma telah membawa pergeseran-pergeseran paradigma yang terjadi secara terus-menerus. Nilai-nilai kebebasan (liberal) dalam paradigma neo-konservatif, yakni semangat kebebasan dari campur tangan negara dalam konteks ekonomi dan sosial selanjutnya berkembang menjadi paham neoliberalisme yang merembet hingga ke Indonesia. Jadi, neoliberalisme ini di sini dimaksudkan sebagai paham kebebasan sebagaimana terdapat dalam paradigma neo-konservatif.

Pasca krisis tahun 1970-an tersebut paradigma

pembangunan sosial mulai bergeser dari adanya campur tangan negara kepada anti campur tangan negara seperti dalam paham neoliberalisme. Pergeseran ini terus terjadi bahkan Indonesia terkena imbas akibat *trend* pergeseran tersebut. Pergeseran paradigma tersebut sayangnya didominasi oleh neoliberalisme. Sedangkan paham kebebasan pasar dan anti intervensi negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial ini telah dimafhumi bersama bertentangan dengan nilai-nilai fundamental kesejahteraan sosial.

Nilai-nilai yang bertentangan tersebut setidaknya tergambar dalam agenda-agenda pokok yang terselip dalam Konsensus Washington. Konsensus Washington adalah agenda pokok yang disepakati oleh Departemen Keuangan AS, Bank Dunia, IMF dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang terjadi di negara-negara Amerika Latin (Baswir, 2006). Konsensus Washington berisi empat hal sebagai berikut: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya; (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan; (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.

Indonesia sendiri, ketika mengalami krisis moneter 1997/1998 ditandai dengan merosotnya nilai rupiah dari Rp2500 menjadi Rp16000 per satu dollar AS, secara resmi mengundang campur tangan IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai prasyarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, maka pemeritah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan sejumlah agenda ekonomi neoliberal melalui penandatanganan *letter of intent* (LOI) (Baswir, 2006). Meskipun sejak Soeharto menjadi Presiden RI ekonomi neoliberal telah bercokol, sejak krisis moneter tersebut Indonesia semakin kukuh menganut ekonomi neoliberal.

Dampak yang paling terasa dari pelaksanaan

Konsensus Washington terhadap kondisi kesejahteraan sosial adalah mengenai kebijakan anggaran yang ketat melalui penghapusan subsidi. Kita dapat saksikan misalnya, pengurangan sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sesungguhnya adalah bentuk paling kongkrit dari pelaksanaan Konsensus Washington ini. Saya sendiri selalu menolak kenaikan BBM. Penolakan ini bukan dalam sudut pandang ekonomi, akan tetapi karena kenaikan BBM tersebut sesungguhnya adalah pengingkaran yang paling nyata terhadap nilai-nilai pembangunan kesejahteraan sosial.

Karena terjadi pengetatan anggaran, maka bantuan-bantuan untuk rakyat dilakukan secara residual dan seperlunya saja. Seperti penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mirip pemadam kebakaran sebagai ciri khas paradigma neo-konservatif dalam mengatasi masalah sosial. BLT ini pernah direalisasikan pada masa SBY-JK menjabat Presiden-Wakil Presiden (2004-2009). BLT cenderung residual dan *means-tested* (berdasarkan tes penghasilan). Sifat residual ditunjukkan dengan tidak diperbolehkannya seorang warga untuk memperoleh pelayanan apabila dia pada dasarnya mampu untuk bekerja. Residual juga berarti kebijakannya selektif, hanya untuk orang miskin saja. Ini sejalan dengan pendekatan *means-tested* menyeleksi warga yang memperoleh bantuan bersadarkan penghasilan. Misalnya, orang yang mendapatkan bantuan hanya yang memperoleh gaji di bawah Rp 20 ribu per hari. Sehingga apabila dia suatu hari memperoleh gaji di atas Rp 20 ribu per hari, hak untuk memperoleh bantuan dicabut. Karena itu, kebijakan seperti ini dianggap melahirkan stigma karena menjebak orang miskin (*poverty trap*) untuk tetap memperoleh penghasilan maksimal Rp 20 ribu agar tetap berhak memperoleh bantuan (Huda, 2009:110-111). Tidak hanya BLT, skema ini juga terjadi pada program Raskin, Askeskin, dan program lainnya

yang menggunakan label "miskin".

Neoliberalisme juga dapat ditemukan pada saat Gus Dur (panggilan akrab Abdurrahman Wahid) menjabat Presiden RI. Saat itu kebijakan fiskal diperketat, dengan konsekuensi pemerintah perlu mengurangi pos pengeluaran tertentu. Gus Dur pun mempunyai reaksi yang sangat kontradiktif dengan dunia kesejahteraan sosial yakni dengan membubarkan Departemen Sosial. Gus Dur beranggapan bahwa untuk meringankan beban pemerintah, maka pelayanan yang bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat sebaiknya diserahkan kepada masyarakat (, 2004:53). Terkait ini tentu kita ingat ulasan paradigma neo-konservatif, di mana menurut paradigma ini kesejahteraan sosial yang paling ideal adalah diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Negara hanya turun tangan pada saat masalah sosial terjadi cukup parah sehingga negara mirip sebagai pemadam kebakaran.

Atas pemberlakuan neoliberalisme di Indonesia ini, secara langsung maupun tidak telah berpengaruh terhadap kondisi dan praktik kesejahteraan sosial di Indonesia. Akibatnya, alih-alih menciptakan kesejahteraan paradigma ini justru menciptakan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi. Sebagaimana diulas pada bab I, pengendalian kemiskinan berjalan sangat lambat, pengangguran bertambah meluas dan lapangan kerja sulit didapat. Ringkasnya, mengikuti alur pikir revolusi ilmu maka kondisi ini boleh jadi dapat dikatakan sebagai anomali. Paradigma yang sedang dijalankan tidak mampu menjawab dan mengatasi problem-problem sosial yang sedang dihadapi bangsa ini. Pada titik inilah penting dilakukan perubahan paradigma sebagai jawaban atas anomali tersebut.

Perubahan paradigma bukan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Terlebih lagi, secara konstitusi Indonesia mempunyai landasan hukum yang

kuat untuk proses pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam *preambule* UUD 1945 misalnya, telah dinyatakan dengan tegas bahwa berdirinya bangsa ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; atau pemeliharaan fakir miskin oleh negara (Pasal 34). Secara konstitusi sangat jelas landasan pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, perlu ada upaya penggalian nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan untuk kemudian dapat dijadikan sebagai paradigma baru yang lebih relevan dengan konteks Indonesia sehingga tidak terjadi anomali sebagaimana yang terjadi sekarang ini.

E. Penutup

Paradigma mempunyai kedudukan penting dalam ilmu kesejahteraan sosial. Paradigma mengarahkan ilmuan untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang dianut dan diyakininya. Dalam suatu bidang keilmuan, dikenal beragam paradigma termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial. Namun satu paradigma ini tidak selamanya dapat berfungsi karena dalam perkembangannya tidak mampu mengatasi setiap problem yang muncul. Di sini paradigma yang lain dapat berperan menggantikan paradigma awal tersebut. Proses pergantian paradigma inilah yang disebut dengan revolusi ilmu.

Dalam bidang kesejahteraan sosial ini kita mengenal empat paradigma besar yakni : neo-konservatif, liberalisme, demokrasi sosial dan marxisme. Masing-masing paradigma mempunyai masanya sendiri. Seperti konservatif banyak dipakai sebelum zaman *malaise* era 1930-an. Setelah itu, beralih kepada liberalisme, hingga depresi ekonomi tahun 1970-an. Pasca ini paradigma konservatif menemukan momentumnya kembali dengan wajah baru, neo-konservatif. Neo-konservatif ini banyak diadopsi oleh negara-negara maju maupun berkembang,

dengan varian paham seperti neoliberalisme.

Neoliberalisme merupakan semangat kebebasan, bebas terhadap intervensi negara sebagaimana nilai pokok yang dianut oleh neo-konservatif. Indonesia sendiri dikenal menganut paham ini sejak masa Orde Baru dan dikukuhkan pada saat penanggulangan krisis moneter 1997 oleh IMF dan Bank Dunia yang membawa agenda Konsensus Washington. Neoliberalisme sesungguhnya tidak berjalan efektif dalam penanggulangan masalah sosial di Indonesia. Karena terbukti tidak mampu membawa masyarakat Indonesia menjadi lebih sejahtera. Ketidakmampuan ini dapat disebut sebagai anomali sehingga sangat mendesak bagi kalangan akademisi untuk melakukan perubahan paradigma menjawab anomali tersebut. Perubahan ini bukan hal mustahil untuk dilakukan, asal ada kemauan politik (*political will*) insyaallah perubahan ini dapat terwujud. □

Terbitkan Bukumu di sini
SAMUDRABIRU.CO.ID
KONVERSI KTI NON BUKU (SKRIPSI, TESIS, DISERTASI) MENJADI BUKU
SAMUDRABIRU.CO.ID

BAB III
TEORI
KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pembuka

Sebagaimana dibahas bab sebelumnya, paradigma dapat juga berarti sebuah kerangka berfikir atau perspektif. Dalam kerangka berfikir tersebut, terdapat seperangkat konsep, asumsi, atau nilai yang diyakini. Beberapa perangkat dalam paradigma tersebut, yakni konsep-konsep yang melekat dalam teori sebagaimana dibahas dalam bab ini. Sehingga, pembahasan dalam bab tentang teori kesejahteraan sosial ini sesungguhnya adalah upaya membuat paradigma lebih kongkrit.

Seperangkat konsep yang terdapat pada teorilah yang akan mengarahkan seseorang dalam bertindak. Di sinilah pentingnya penjelasan mengenai teori dalam konteks ilmu kesejahteraan sosial. Dalam penjelasan selanjutnya pembaca akan mengetahui bagaimana seperangkat konsep yang diyakini oleh pekerja sosial akan mempengaruhinya dalam memilih tindakan-tindakan

tertentu. Pengaruh tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan tentang bagaimana teori mempengaruhi praktik (kesejahteraan sosial).

Karena pentingnya teori dalam praktik kesejahteraan sosial, seorang pekerja sosial sudah selayaknya dapat memilih teori yang tepat untuk melakukan penanganan masalah sosial. Meskipun harus juga dipahami bahwa teori tersebut kerapkali bersifat lokalistik sehingga belum tentu tepat diterapkan dalam ruang dan waktu yang berbeda. Penjelasan ini akan ditemukan dalam bagian konstruksi teori kesejahteraan sosial. Selanjutnya, sebagai gambaran umum tentang teori-teori kesejahteraan sosial tersebut, dalam bab ini diuraikan beberapa teori yang dikenal dalam bidang kesejahteraan sosial. Tujuannya tentu bukan untuk melegitimasi bahwa teori-teori ini seluruhnya relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia, namun tidak lebih dari upaya menjelaskan teori-teori secara umum dalam bidang kesejahteraan sosial. Dengan begitu, kita akan bisa memilah atau memilih teori-teori tersebut dalam konteks Indonesia.

B. Memahami Teori

1. Pengertian

Teori dengan paradigma oleh beberapa ahli memang kerap dipertukarkan. Menggunakan istilah teori tapi yang dimaksud adalah paradigma. Ini misalnya, bisa kita temukan dalam buku Bob Mullaly (1997) berjudul, *Structural Social Work: Ideology, Theory and Practice*. Mullaly dalam buku tersebut memperkenalkan paradigma baru yakni paradigma struktural. Namun meskipun buku tersebut beranak judul ideologi, teori dan praktik tidak ada uraian khusus tentang teori. Uraian teori, menurut pemahaman penulis melekat dalam masing-masing paradigma yang diuraikan dalam buku tersebut. Kurang tegasnya pembedaan ini menurut saya sah-sah saja, karena memang antara paradigma dengan

teori saling berdekatan bahkan mempunyai hubungan saling terkait.

Dalam buku ini saya menguraikan secara terpisah antara paradigma dengan teori. Alasannya, telah dikenal secara lazim bahwa paradigma memiliki domain tersendiri di samping teori. Dalam ilmu-ilmu sosial kita juga bisa mengenal paradigma-paradigma di samping teori itu sendiri. Misalnya ada paradigma positivistik maupun paradigma kritis. Selanjutnya, dalam paradigma kritis, kita mengenal teori konflik dan begitu seterusnya. Jadi, lazimnya paradigma dan teori mempunyai domain tersendiri.

Kembali kepada penjelasan tentang teori, untuk dapat lebih memahaminya apa yang disebut dengan teori tersebut ada baiknya kita menguraikan definisinya. Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan yang menyajikan suatu pandangan yang sistematik atas fenomena dengan menjabarkan hubungan-hubungan dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut (Watt, 1995: 6). Definisi teori ini memang umum dipakai untuk ilmu-ilmu alam, akan tetapi juga relevan diterapkan dalam konteks ilmu sosial termasuk ilmu kesejahteraan sosial.

Melihat definisi ini, wajar jika banyak orang menganggap bahwa teori itu terkesan esoteris, abstrak, ideal sehingga kebanyakan hanya diperbincangkan di universitas saja (Mullaly, 2004: 1). Sedang ketika dalam kehidupan sehari-hari atau ketika sedang melakukan praktik (kesejahteraan sosial), teori menjadi tidak relevan karena tidak operasional. Anggapan ini menurut saya kurang tepat, karena teori itu – disadari atau tidak – sesungguhnya dipakai oleh setiap orang. Misalnya, orang tua yang mendapati bayi sedang menangis, maka pikirannya mungkin langsung melayang pada beberapa sebab. Mungkin bayi itu haus, gerah, kedinginan,

mengantuk, atau kondisi ketidaknyamanan lain. Dia menangis karena belum bisa mengekspresikannya dengan kata-kata atas ketidaknyamanannya tersebut. Lalu, orang tuanya dengan dugaan-dugaan yang diyakininya akan membuat keputusan untuk menenangkan bayi tersebut. Keyakinan orang tua terhadap penyebab menangisnya bayi ini sesungguhnya adalah teori. Jadi, teori di sini sebenarnya sangat kongkrit karena telah kita praktikkan sehari-hari, dengan sadar maupun tidak.

Dalam bidang kesejahteraan sosial, kita juga bisa contohkan bagaimana sebuah teori dapat bersifat kongkrit dan mudah kita pahami. Dalam ilmu kesejahteraan sosial kita kenal dua kelompok perspektif, yakni *order perspective* dan *conflict perspective.* Kalau dihubungkan dengan empat paradigma sebagaimana dibahas pada bab II, maka neo-konservatif dan liberal masuk dalam kelompok pertama (*order perspective*). Sedangkan sisanya termasuk dalam kelompok *conflict perspective.* Dalam *order perspective* ini kita mengenal beberapa teori, seperti teori *psychodynamic, system*, fungsionalisme dan *ecological.* Kita ambil satu contoh teori fungsionalisme, teori yang dikembangkan Talcott Parsons ini percaya bahwa masyarakat bagaikan organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Seorang yang bermasalah, misalnya, dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan hukum, adat atau aturan normatif lainnya. Sehingga, letak masalah berada pada seorang tersebut.

Jadi, jika seorang pekerja sosial berkeyakinan pada ketergantungan manusia pada aturan-aturan normatif ini, dia sesungguhnya telah memegang sebuah teori dan mempraktikkannya. Jika pekerja sosial bertemu dengan seorang pecandu narkoba, lalu dia menganggap bahwa sang pecandu tidak mengerti aturan, tidak tahu

bahayanya narkoba sehingga jalan keluarnya dilakukan konseling, maka dia sebenarnya telah mempraktikkan teori fungsionalisme ini. Pendeknya, teori itu kongkrit selalu melekat pada setiap orang dan secara langsung maupun tidak akan mempengaruhinya dalam bertindak.

2. Empat Fungsi Teori

Mullaly (2002:2) menjelaskan ada empat fungsi pokok dari teori: *Pertama,* menggambarkan (*description*); *Kedua,* menjelaskan (*explanation*); *Ketiga,* memprediksi (*prediction*); *Keempat,* mengendalikan atau mengatur suatu perubahan. Empat fungsi ini dapat dikatakan sangat penting terkait kedudukan sebuah teori. Teori dengan demikian, bukanlah seperangkat konsep yang abstrak dan melangit. Namun, teori berhubungan erat dengan praktik, sebab teori tersebut mempengaruhi seorang pekerja sosial dalam mempraktikkan metode-metode penanganan masalah sosial.

Fungsi pertama, berarti teori menggambarkan sebuah fenomena. Fenomena sosial penting untuk digambarkan secara utuh, fenomena apa sesungguhnya yang terjadi, bagaimana sesungguhnya fenomena tersebut terjadi, apa saja yang menyangkut fenomena tersebut, siapa-siapa saja yang terlibat dalam fenomena tersebut. Suatu penjelasan ataupun analisis, tidak bisa dijabarkan dengan baik tanpa adanya gambaran (*description*) yang utuh terhadap suatu fenomena. Di sinilah pentingnya deskripsi terhadap suatu fenomena sebelum adanya fungsi penjelasan.

Fungsi kedua, teori menjelaskan suatu fenomena. Penjelasan di sini dalam arti menjelaskan sebab-sebab kenapa suatu fenomena (masalah sosial) terjadi. Penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya sebuah masalah sosial, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam konteks ilmu kesejahteraan sosial. Seperti halnya

sebuah *assessment* yang menjadi tahapan penting dalam praktik penanggulangan masalah sosial pada dasarnya salah satunya dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu masalah. Ketika diketahui penyebabnya, maka intervensi dapat dilakukan dengan tepat dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.

Fungsi ketiga, teori dapat berfungsi memprediksi suatu fenomena atau kejadian. Teori biasanya berisi seperangkat gagasan atau sebab-akibat. Apabila terjadi peristiwa demikian, maka biasanya akan berakibat pada peristiwa demikian. Sehingga, ketika seorang pekerja sosial memegang dan meyakini sebuah teori maka dia bisa memprediksi peristiwa yang akan terjadi selanjutnya.

Fungsi keempat, ketika seorang pekerja sosial mampu memprediksi suatu peristiwa, maka peristiwa tersebut dapat dikontrol atau dikendalikan sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap pekerja sosial mempunyai misi untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah sosialnya. Untuk mengusung misi ini, pekerja sosial harus mampu mengontrol dan mengatur perubahan yang akan terjadi di tengah masyarakat.

Inilah empat fungsi teori dalam ilmu kesejahteraan sosial. Fungsi tersebut diketahui mempunyai kedudukan penting dalam praktik pekerjaan sosial. Oleh karenanya, dalam praktik pekerjaan sosial, teori perlu digunakan untuk membantu mempermudah perubahan berkaitan dengan masalah sosial yang sedang dihadapi klien maupun masyarakat.

3. Hubungan Teori dengan Paradigma

Sebagaimana telah tergambar dalam pemaparan-pemaparan sebelumnya, teori dan paradigma mempunyai hubungan sangat erat. Paradigma adalah kerangka berfikir yang berisi seperangkat konsep dan konsep tersebut terdapat dalam teori. Artinya, di sini dapat

diambil sebuah kesimpulan bahwasanya paradigma membentuk paradigma kecil dalam sebuah teori. Dengan kata lain, paradigma ini mempengaruhi teori, sedang teori akan mempengaruhi praktik. Hubungan teori dengan paradigma ini secara sederhana dapat digambarkan dalam sebuah skema sebagai berikut:

Skema
Hubungan Teori dengan Paradigma dan Praktik

Dari skema di atas dapat diketahui bahwa paradigma, teori dan praktik membentuk garis linier yang saling berhubungan. Paradigma dan teori tertentu kadangkala adalah satu paket gagasan. Sehingga secara keilmuan suatu teori tidak bisa dipertukarkan begitu saja dengan paradigma yang bukan dalam "pasangannya".

Kita ambil contoh: Payne (1997:4-5) mengklasifikan ada tiga paradigma dalam kesejahteraan sosial. *Pertama, reflexice-therapeutic* sebuah pandangan bahwa proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang satu dengan lainnya akan mengubah gagasan serta pikiran-pikiran orang. Proses saling memberi pengaruh (*mutual influence*) inilah yang kemudian menyebabkan pekerjaan sosial dikatakan sebagai refleksif (*reflexive*). Proses interaksi ini dianggap dapat menguatkan personalitas dalam mengatasi penderitaannya. Pandangan ini mirip neo-liberal/*order perscpective.* Seseorang dianggap harus dapat menyesuaikan dengan sistem yang ada. Sehingga, jika ada masalah pada seseorang tersebut, maka yang harus diperbaiki adalah kapasitas manusianya. Pandangan ini kemudian menurunkan teori-teori seperti *existensialist, humanist* dan *social psicological.*

Kedua, socialist-collectivist yang dimaksudkan sebagai pandangan yang percaya bahwa problem dalam masyarakat muncul karena opresi dalam masyarakat. Ini mirip *conflict perspective* yang berpandangan masalah sosial terjadi dalam kaca mata konflik. Dari paradigma ini kemudian lahir teori-teori seperti teori radikal, *anti-oppressice*; dan *empowerment.*

Ketiga, individualist-reformist memandang kesejahteraan sosial sebagai hubungan timbal balik antara pelayanan sosial (*social service*) dengan individu sehingga hubungan keduanya dapat berjalan secara efektif. Namun perubahan dalam paradigma ini masih dalam skala individu. Paradigma ini selanjutnya menurunkan beberapa teori seperti teori sistem atau *task-centered.*

Masing-masing paradigma di atas diketahui menurunkan paradigma masing-masing. Masing-masing teori pada dasarnya telah melekat pada jenis paradigma masing-masing. Hal ini disebabkan, kerangka gagasan, konsep ataupun proposisi antara paradigma dan teorinya relevan dan sejenis. Sehingga, tidak mungkin paradigma pertama akan melahirkan teori sebagaimana yang terdapat dalam paradigma kedua dan begitu seterusnya. Contoh, teori *anti-oppressive* tidak mungkin menjadi turunan dari paradigma *reflexive-therapeutic* karena paradigma *socialist* ini memandang masalah sosial karena opresi sehingga jalan keluarnya bukan terapi secara individual sebagaimana jalan keluar yang diyakini oleh *reflexive-therapeutic.* Inilah hubungan antara teori dengan paradigma di mana paradigma menurunkan teori sedangkan teori pada gilirannya akan mempengaruhi praktik.

C. Konstruksi Teori dalam "Celana Dalam" Gus Dur

Kisah "celana dalam" Gus Dur –panggilan akrab

KH Abdurrahman Wahid– ini masyhur dituturkan oleh banyak kalangan. Dikisahkan, pada waktu masih menuntut ilmu di Mesir, tokoh besar Nahdhatul Ulama (NU) ini sekamar dengan KH Mustofa Bisri (Gus Mus). Suatu kali, mereka didatangi oleh temannya yang juga sedang menuntut ilmu di Mesir. Konon, temannya ini adalah juga anak dari Kyai besar di Indonesia. Karena kedatangan tamu "terhormat", Gus Dur dan Gus Mus lantas menjamu sang tamu.

Keduanya berbagi tugas. Gus Mus kebagian memasak, sedang Gus Dur menyiapkan peralatan masak. Ketiganya semangat sekali sambil ngobrol *ngalor-ngidul.* Saat membersihkan peralatan masak, Gus Dur kebingungan mencari kain lap. Maklum, sebagaimana umumnya kondisi kos-kosan laki-laki, tidak telaten untuk bersih-bersih.

Namun tanpa ambil pusing, Gus Dur lantas menyamber celana dalam yang baru saja dibelinya dan menjadikannya sebagai kain lap untuk membersihkan peralatan masak tersebut. Gus Dur memang dikenal *slengekan,* bahkan hingga beliau menjadi Presiden RI sikap kontroversinya kerap dapat disaksikan. Maka wajar saja ketika tanpa beban, Gus Dur menyulap celana dalamnya menjadi kain lap.

Melihat ulah Gus Dur ini, rona wajah sang tamu langsung berubah jadi kecut. Akibatnya, yang awalnya bernafsu untuk makan, kontan langsung pamit pulang. Tapi ada juga yang menyebut sang tamu dan kedua tuan rumah melanjutkan makan bersama. Saat makan bersama, ketiganya tertawa terbahak-bahak membicarakan ulah Gus Dur tadi.

Mana yang benar akhir ceritanya, tidak menjadi soal kisah ini. Yang menjadi benang merah cerita ini adalah celana dalam yang dijadikan Gus Dur sebagai kain lap untuk membersihkan peralatan makan. Biasanya kain lap itu harus bersih dan steril apalagi untuk membersihkan

peralatan makan. Tapi Gus Dur menggunakan celana dalam untuk kain lap peralatan makan. Siapa saja yang menyaksikan ini mungkin akan merasa jijik dan bahkan pikirannya bisa ke mana-mana.

Anggapan kita yang jijik pada kain lap dari celana dalam *ala* Gus Dur tadi adalah sebuah konstruksi sosial (*social construction*). Walaupun celana dalam tadi baru saja dibeli Gus Dur dan belum sempat dipakai, namun tetap saja anggapan setiap orang yang mendengar cerita ini tetap berfikiran janggal. Ini karena, kain lap itu identik berasal dari kain khusus yang bersih, sedangkan celana dalam identik dengan pembungkus si "anu". Konstruksi ini melekat di kepala setiap orang.

Teori kesejahteraan sosial sesungguhnya berada dalam konstruksi sosial ini. Teori dalam kesejahteraan sosial pada dasarnya dibentuk oleh hubungan singular antara pekerja sosial, klien dan konteks sosialnya (Payne,1997:1). Interaksi ketiga elemen ini pada akhirnya akan membentuk konstruksi pekerjaan sosial.

Konstruksi sosial juga dikenal sebagai teori yang dikenal luas dalam bidang ilmu sosiologi. Teori ini menyebutkan bahwa setiap manusia menafsirkan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari (Berger dan Luckmann, 1990: 28). Tafsiran ini kemudian dianggap benar atau begitulah adanya sebagaimana yang dipersepsi manusia. Tapi, tafsiran ini bersifat subjektif. Agar gampang dipahami, kita bisa contohkan lagi dengan peci/kopiah. Peci itu identik dengan orang Islam. Kalau dia memakai peci, maka otomatis dia dianggap muslim. Ini adalah konstruksi sosial. Konstruksi peci dibentuk oleh budaya yang selama bertahun-tahun ada dalam masyarakat dan dianggap seperti itu adanya oleh masyarakat.

Konstruksi sosial dapat berubah sesuai dengan konteksnya. Peci, di daerah tertentu bisa saja dianggap bukan identik muslim. Begitu juga celana dalam tadi, kalau benar-benar dipikirkan maka sesungguhnya tak

ada bedanya kain lap yang bersih dan steril dengan celana dalam yang baru saja dibeli dan belum terpakai. *Toh* bisa saja celana dalam tersebut terbuat dari kain yang juga bersih dan steril.

Begitu juga dengan teori kesejahteraan sosial, jika dipahami dalam kerangka teori konstruksi sosial ini maka sifat teori dalam kesejahteraan sosial bersifat subjektif dan sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Jadi, teori yang sudah *taken for granted* dalam ilmu kesejahteraan sosial selama ini bisa saja sesungguhnya ada yang tidak relevan di samping tentu saja ada yang relevan dengan konteks Indonesia.

Asumsi ini mengindikasikan tentang dimungkinkannya pembentukan teori baru dalam bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan interaksi atau dialog antara pekerja sosial, klien dan konteks sosialnya. Apalagi sebagaimana Payne (1997:13-14) sebuah teori dalam pekerjaan sosial sudah selayaknya dilahirkan dari konteks sosialnya. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia teori kesejahteraan sosial mestinya berakar dari budaya dan nilai-nilai sosial yang berkembang di Indonesia. Karena itulah, kemungkinan pembentukan teori baru sebagaimana tujuan penulisan buku ini dapat dimungkinkan dan bahkan sebuah keniscayaan.

D. Mengenal Beberapa Teori dalam Kesejahteraan Sosial

Setelah di bab II kita dikenalkan pada beberapa paradigma dalam kesejahteraan sosial, pada bagian ini kita akan mengkaji beberapa teori yang lazim dikenal dalam ilmu kesejahteraan sosial. Penyajian beberapa teori dalam buku ini, sebagaimana halnya dalam paradigma, bukan dalam tujuan pembenaran ataupun anjuran agar kita para pekerja sosial memakai atau menelan mentah-mentah teori tersebut. Penyajian ini justru adalah sebagai pintu masuk untuk lahirnya teori-

teori baru dalam kesejahteraan sosial.

Melahirkan teori baru memang bukan perkara mudah, karena ini merupakan kerja intelektual yang panjang dan melelahkan. Akan tetapi hal ini bukan tidak mungkin dilakukan khususnya dalam konteks Indonesia. Di samping itu, teori baru tidak mungkin dapat kita lahirkan tanpa adanya pengetahuan tentang teori-teori lama yang sudah lama dikenal dan dipraktikkan. Di sinilah urgensinya pengenalan teori-teori pada umumnya walaupun teori tersebut dirasa tidak relevan lagi.

Teori-teori yang diuraikan dalam bab ini pada dasarnya mempunyai relevansi dengan paradigma-paradigma yang telah ada, sebab teori adalah turunan daripada paradigma sebagaimana telah kita ketahui. Akan tetapi karena pendapat para ahli mengenai bentuk-bentuk paradigma (kesejahteraan sosial) ini berbeda-beda, maka beberapa contoh teori yang diungkapkan di bawah ini sesungguhnya merujuk pada tiga paradigma yang diklasifikasikan Payne (1997), yakni *reflexice-therapeutic; individualist-reformist;* dan *socialist-collectivist.* Enam (6) teori yang dijabarkan di bawah ini masing-masing mewakili tiga paradigma ini. Psikodinamika *(Psychodynamic)* dan Humanis representasi dari *reflexice-therapeutic;* Pengembangan masyarakat dan sosial *(social and community development)* dan Ekosistem dari *individualist-reformist;* terakhir radikal dan anti opresi dari *socialist-collectivist.* Berikut akan diuraikan masing-masing teori tersebut.

1. Teori Psikodinamika

Teori psikodinamika memahami sumber terjadinya perilaku manusia baik disadari maupun tidak adalah berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Dorongan manusia untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah berasal dari dalam diri manusia tersebut, bukan berasal dari luar dirinya. Teori ini ditemukan oleh

Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini juga dikenal sebagai psikoanalisis sebagaimana yang juga dikembangkan oleh para teoritisi lain seperti Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Eric Fromm, dan seterusnya.

Teori ini mendominasi masa-masa awal perkembangan pekerjaan sosial di Barat, bahkan dominasi teori ini masih terasa hingga sekarang. Terbukti pekerjaan sosial klinis masih banyak dipakai untuk menangani masalah sosial. Selain itu, teori ini berkembang cukup luas disebabkan juga karena masyarakat luas menganggap bahwa perilaku-perilaku yang melanggar norma dianggap sebagai penyakit layaknya dalam dunia kedokteran (Alwisol, 2005: 3-4).

Teori psikodinamika mendasarkan diri kepada struktur kepribadian seorang manusia. Menurut Freud, struktur kepribadian seseorang terbagi dalam tiga tingkat kesadaran: sadar (*conscious*), prasadar (*preconscious*) dan tak sadar (*unconscious*). Dalam perkembangannya, Freud kemudian mengenalkan lagi tiga model struktur kepribadian manusia di mana ini masih identik atau menjadi pelengkap dengan ketiga struktur kepribadian sebelumnya. Tiga model struktur tadi yakni: das Es (*The Id*), das Ich (*the Ego*) dan das Ueber (*the Super Ego)* (Alwisol, 2005:17).

Id adalah semacam insting dalam dunia binatang yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Dalam konteks manusia, *Id* ini ada yang menyebutnya sebagai nafsu. Karena insting, *Id* bersifat pembawaan, karena setiap orang pasti memiliki sifat ini. Sifat-sifat pembawaan ini bersifat biologis seperti rasa lapar, haus, kenyang dan sifat-sifat biologis lainnya. *Id* mendorong setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya, seperti ketika merasa haus maka yang dilakukan adalah dengan meminum air. *Id*, dengan demikian menjadi struktur sangat fundamental secara fisik bagi setiap orang karena untuk mempertahankan keseimbangan

hidup secara biologis.

Keinginan-keinginan yang ditimbulkan oleh *Id*, pada gilirannya akan dikontrol oleh *Ego*. Hal ini disebabkan *Ego* adalah elemen kepribadian yang merupakan hasil interaksi seorang individu dengan lingkungannya. Dengan kata lain, *Ego* ada yang menyebutnya sebagai akal. Ketika *Id* merasa membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka *Ego* mengontrol *Id* untuk mencari cara untuk memperoleh uang. Apakah itu dengan bekerja secara halal atau merampas hak orang lain dengan cara korupsi. *Ego* mempertimbangkan cara untuk memperoleh makanan tersebut.

Akan tetapi, pertimbangan *Ego* ini pada kenyataannya tidak mampu mempertimbangkan dengan baik tindakan-tindakan manusia sesuai dengan nilai-nilai normatif dalam masyarakat. Bisa saja *Ego* mengendalikan *Id* untuk mendapatkan uang dengan cara korupsi atau tindakan kriminal lainnya. Maka untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai atau aturan-aturan, diperlukan *Super Ego* yang berisi tentang nilai-nilai dan aturan yang bersifat normatif. Karena itu, ada yang menyamakan *Super Ego* ini dengan hati nurani. Perilaku manusia menurut Freud sesungguhnya dibentuk oleh tiga struktur atau elemen tersebut di atas.

Hubungan ketiga struktur dalam manusia ini saling mengalami tekanan disebabkan perbedaan-perbedaan dorongan yang mendasar di antara ketiganya. Sehingga ketika kondisi tubuh mengalami ketidakseimbangan akibat tekanan-tekanan tersebut maka dapat mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan tingkah laku dalam diri manusia. Dalam konteks psikologis, gangguan-gangguan tersebut sangat banyak, seperti psikosomatis, depresi, *schizophrenia* dan gangguan-gangguan yang bersifat psikologis lainnya. Problem-problem sosial yang dihadapi oleh manusia pada gilirannya oleh teori ini diidentikkan dengan gangguan-gangguan

psikologis ini. Bahkan dalam konteks ilmu pekerjaan sosial, gangguan-gangguan psikologis ini telah menjadi baku dan ada panduannya. Seperti terlihat dalam buku berjudul *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition, text revision* yang masyhur dikenal dengan DSM-IV-TR yang diterbitkan oleh *The American Psychiatric Association.* Buku ini menjadi semacam panduan bagi para pekerja sosial untuk menghadapi klien yang mempunyai masalah. Diagnosa masalah sosial pun didasarkan kepada penyimangan-penyimpangan mental sebagaimana dalam konteks psikologis.

Dalam pekerjaan sosial, teori psikodinamika ini berkembang cukup dominan khususnya di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat yang mempunyai kultur individualistik cukup kental. Hal ini dikarenakan problem-problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat semacam ini bersifat individualis, seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, penyimpangan seksual, gangguan kejiwaan dan sebagainya. Sedangkan problem-problem sosial yang bersifat struktural seperti kemiskinan, pengangguran, penggusuran, masih minim meskipun saat ini problem tersebut bukan suatu hal yang asing.

Ringkasnya, teori psikodinamika menjadikan manusia dan struktur kepribadian yang ada pada dirinya sebagai titik pusat terjadinya problem maupun penyelesaian dari problem tersebut. Sehingga, jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang menimpa seseorang adalah dengan dilakukan terapi secara personal (klinis). Metode *casework* atau terapi klinis dengan demikian dapat menjadi jalan keluar menurut teori ini.

2. Teori Humanis

Teori humanis (*humanist*) dalam pekerjaan sosial menekankan kepada sisi kemanusiaan seorang manusia yang mempunyai kebebasan memilih dan untuk menjalani

kehidupannya secara bebas. Penganut aliran humanis ini menjadikan pemikiran rasional sebagai pusat untuk mengatur kehidupannya dengan lingkungan. Namun karena fokus kepada hubungan kemanusiaan, teori humanis ini kadang kerap diidentikkan dengan paham sekuler, anti agama, karena menolak campur tangan entitas supranatural seperti Tuhan dalam kehidupan manusia (Payne: 2011).

Aliran humanis ini sesungguhnya juga dipengaruhi oleh eksistensialisme. Sebagaimana asal katanya, *ex* dan *sistere* yang berarti muncul, menjadi dan hadir, eksistensialisme sebagai filsafat maupun aliran psikologis mempunyai pandangan bahwa keberadaan manusia bukan semata-mata sebagai 'ada' yang statis dan selalu sama, melainkan sebagai penjadian, yang secara sinambung berubah dan berkembang. Manusia disebut ada dalam dunia dan secara tak terhindarkan terikat pada dunia. Anggapan ini merupakan aksioma dasar eksistensialisme, yang digunakan untuk menerangkan akar masalah-masalah eksistensial manusia dan analisis terhadapnya merupakan subjek sentral dari gagasan para eksistensialis (Misiak dan Sexton, 2009: 80). Karena hubungannya yang erat antara eksistensial dengan humanis ini, maka teori humanis kadang digabungkan dengan eksistensial. Seperti halnya Payne (1997) dalam karyanya *Modern Social Work Theory* membuat uraian dalam salah satu babnya dengan judul: *Humanist and Existensial Perspectives.*

Seperti halnya psikodinamika, humanis adalah bagian dari teori-teori psikologi yang kemudian diadopsi sebagai teori konseling dalam pekerjaan sosial. Adopsi ini dilakukan karena dalam salah satu pendekatan pekerjaan sosial, penyelesaian masalah pada klien dilakukan secara individual. Masalah sosial yang disandang dianggap berasal dari dalam diri mereka, sehingga untuk menjelaskan fenomena ini diperlukan teori-teori

psikologi yang bersifat individual. Inilah kenapa praktik intervensi dalam pekerjaan sosial khususnya dalam aras mikro lebih banyak mengadopsi teori-teori psikologis seperti halnya teori humanis ini.

Teori humanis ini sebenarnya adalah respon atas ketidakpuasan terhadap teori psikologi behavioristik dan psikoanalisis (psikodinamika). Humanis menekankan manusia sebagai titik sentralnya di samping dengan ciri-ciri eksistensial yang melekat di dalamnya. Dalam konteks ilmu psikologi, teori ini kemudian banyak dikenal sebagai psikologis humanistik. Beberapa tokoh pemikir yang mengembangkan aliran ini seperti Carl Rogers yang terkenal dengan konsep "*Client-Centered*"-nya atau Ambraham Maslow yang mengembangkan motivasi dan kebutuhan hirarkis dalam konteks psikologi humanistik.

Salah satu cara memahami teori humanis ini adalah dengan melihat bagaimana Abraham Maslow mengembangkan tentang teori motivasinya. Dalam bukunya yang terkenal yakni *Motivation and Personality,* Maslow (1970) menguraikan lima kebutuhan betingkat daripada manusia. Yakni: (1) Kebutuhan-kebutuhan fisiologis; (2) Kebutuhan akan rasa aman; (3) Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki; (4) Kebutuhan akan rasa harga diri; dan (5) Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Menurut teori kebutuhan hirarkis ini, jika kebutuhan yang satu telah terpuaskan, maka kebutuhan lain yang lebih tinggi akan muncul menuntut pemuasan dan begitu seterusnya (Misiak dan Sexton, 2009: 128). Teori kebutuhan bertingkat Maslow ini terlihat banyak sekali sisi-sisi humanis ketimbang teori-teori yang dikritiknya. Aspek-aspek kemanusiaan, seperti hubungan dalam eksistensinya dengan manusia lain cukup menonjol di sini. Terlebih pada puncak hirarki kebutuhan manusia, Maslow menyebut pentingnya aktualisasi diri (*self actualization*).

Kritik mendasar dari teori humanis kepada teori lainnya seperti psikodinamika adalah penekanannya pada sisi kemanusiaan secara holistik. Misalnya psikoanalisis yang menganggap bahwa manusia tak ubahnya sebagai hewan dianggap terlalu mekanik, deterministic dan reduksionistik oleh teori humanis ini. Sebab manusia adalah makhluk yang unik dan berbeda dengan hewan. Ada empat ciri yang menekankan pada aspek kemanusiaan dari teori ini, antara lain (Misiak dan Sexton, 2009: 131):

1. Memusatkan perhatian pada *person* yang mengalami dan karenanya berfokus kepada pengalaman sebagai fenomena primer dalam mempelajari manusia
2. Menekankan pada kualitas-kualitas yang khas manusia, seperti memilih, kreativitas, menilai, dan realisasi diri, sebagai lawan dari pemikiran tentang manusia yang mekanistik dan reduksionistik.
3. Menyandarkan pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan, serta menentang penekanan yang berlebihan pada objektivitas yang mengorbankan signifikansi.
4. Memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia serta tertarik pada perkembangan potensi yang inheren pada setiap individu. Memang individu sebagaimana dia menemukan dirinya sendiri serta dalam hubungannya dengan individu-individu lain dan dengan kelompok-kelompok sosial.

Salah satu pengaruh penting teori humanis ini dalam pekerjaan sosial adalah diterapkannya model kelompok pertemuan (*encounter group*) sebagai salah satu pendekatan dalam intervensi kelompok (*group*

work). Pendekatan ini memposisikan manusia sebagai makhluk yang memiliki hubungan kemanusiaan dengan manusia lainnya sebagaimana dalam pandangan kaum eksistensialis. Penyelesaian masalah yang menimpa seseorang tidak identik dengan individu *an sich,* akan tetapi juga menyangkut orang lain yang mempunyai masalah serupa. Pendekatan kelompok pertemuan dengan sendirinya menekankan pada penguatan aspek kemanusiaan seseorang karena masing-masing akan memperoleh dukungan secara positif dari manusia yang lainnya.

Kelompok pertemuan ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep Carl Rogers tentang konsepnya *client-centered.* Konsep ini berasumsi bahwa setiap individu dapat tumbuh ke arah yang positif apabila dia bisa membebaskan diri dari kendala-kendala yang menghambat dirinya dalam menemukan eksistensinya. Pembebasan diri dari kendala-kendala ini dapat juga dilakukan dengan berinteraksi kepada orang lain dengan terbuka dan jujur. Demikianlah gambaran tentang teori humanis yang menekankan pada aspek-aspek kemanusiaan.

3. Teori *Social and Community Development*

Jika ditinjau dari penggunaan istilahnya, maka teori ini terdiri dari dua aspek, yakni *social development* dan *community development. Social development* adalah pendekatan pembangunan sosial yang dikembangkan Midgley (1995) dalam bukunya *Social Development The Development Perspective in Social Welfare.* Dalam bahasa Indonesia *social development* lebih tepat diterjemahkan sebagai 'pembangunan sosial' seperti halnya edisi bahasa Indonesia buku tersebut, *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial.* Maka Payne (1997: 208) mengulas *social development* ala Midgley dalam babnya tentang teori *social and community*

development ini. *Social development* ala Midgley ini adalah pendekatan pembangunan yang merupakan jalan tengah dari perdebatan sengit antara paradigma konservatif dan liberal.

Sebagaimana diketahui, paradigma konservatif menolak kebijakan sosial oleh negara karena ini adalah pemborosan anggaran dan tidak sesuai dengan semangat kapitalisme. Argumen pemborosan inilah yang selanjutnya menjadikan paradigma konservatif menolak konsep *welfare state* dalam konteks murni. Sebaliknya, paradigma liberal justru mendukung kebijakan sosial karena ini adalah kewajiban negara. Atas dukungannya ini, paradigma liberal mendukung *welfare state.* Kedua paradigma ini berseteru secara sengit, seperti halnya persaingan yang saling kontradiktif antara Partai Demokrat dan Partai Republik dalam kancah politik di Amerika Serikat. Yang pertama didukung oleh paradigma liberal dan kedua konservatif. *Social development* ini dimaksudkan Midgley sebagai jalan tengah atas perdebatan sengit antara keduanya (lebih lanjut, lihat, Huda, 2009: 94-105).

Selanjutnya, *community development* dalam konteks keIndonesiaan lebih dikenal dengan pengembangan masyarakat. Barker (2003:84) membuat catatan bahwa pengembangan masyarakat dilakukan oleh professional untuk meningkatkan ikatan sosial antara anggota masyarakat, memotivasinya untuk dapat membantu dirinya sendiri (*self help*), mengembangkan kepemimpinan lokal yang bertanggungjawab atau melakukan revitalisasi terhadap institusi lokal. Pengembangan masyarakat mulai populer di negara-negara dunia ketiga sejak tahun 1920. Pada awalnya pengembangan masyarakat dilakukan untuk membantu masyarakat untuk mencapai kesadaran tertentu ataupun mengembangkan kepemimpinan lokal. Di AS, pengembangan masyarakat dilakukan di daerah pedalaman yang masih terbelakang untuk meningkatkan

kemampuan ekonomi dan pendidikan.

Dengan demikian sejak awal memang pengembangan masyarakat diterapkan sebagai sebuah metode un-tuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Di negara-negara berkembang metode ini banyak dipakai untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat yang masih terbelakang. Oleh sebab itu, pengembangan masyarakat sering juga diidentikkan dengan pengembangan ekonomi lokal (*local economic development*). Namun demikian tidak jarang di negara-negara industri pengembangan masyarakat juga dilakukan oleh negara, terutama negara yang mempunyai komitmen tinggi dalam pembangunan sosial (Huda, 2009: 254).

Community development oleh Mansour Fakih (2008: 127) dimasukkan dalam loker ideologi modernisasi dan developmentalisme. Modernisasi dan *developmentalisme* adalah ideologi yang tumbuh subur di masa orde baru. Ide-ide pembangunan (*developmentalisme*) sebagaimana dalam kubu kapitalisme sangat diperlukan untuk membangun masyarakat. Pendekatan pembangunan ini adalah strategi dan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang memberi perhatian khusus kepada tingkat tabungan dan investasi serta intensitas modal dengan teknologi modern. Strategi dan kebijakan ini mengasumsikan bahwa industrialisasi yang cepat dan perluasan sektor modern pada umumnya adalah jawaban terbaik bagi kebutuhan pembangunan ekonomi yang cepat dan penciptaan lowongan lapangan kerja. Model pertumbuhan ini diterapkan baik di sektor industrialisasi perkotaan maupun sektor pertanian pedesaan. Kebijakan pembangunan pertanian pedesaan diwujudkan melalui program "revolusi hijau" yang cukup masyhur di masa orde baru itu (Fakhir, 2008: 101).

Community development sebagai teori menekankan kepada aspek kemandirian. Hal ini sejalan dengan teori

modernisasi McClelland bahwa kondisi rakyat yang terbelakang disebabkan oleh nilai dan tradisi yang tidak cocok bagi pembangunan. Sehingga sebagaimana dicatat Fakih (2008: 103) teori ini mewujudkan idenya dengan pelatihan partisipatif dan pembentukan kelembagaan di kawasan pedesaan sebagai alat transformasi utama menuju modernitas. Ide ini didasarkan kepada asumsi modernisasi bahwa proses pembangunan akan bekerja jika modal diberikan kepada orang yang benar (yakni para *entreprenuer* yang mempunyai motivasi tinggi). Karenanya pelatihan motivasi diri, misalnya *Achievement Motivation Training* (AMT) (seperti teori N-Ach McClelland) sangat identik dalam teori ini.

Membedakan gerakan penanganan masalah sosial pada tiga paradigma (Konformisme, Reformasi dan Transformasi) Fakih (2008: 122) memasukkan *community development* pada paradigma reformasi. Hal ini disebabkan *community development* menganggap masalah sosial karena pendidikan yang lemah, nilai-nilai tradisional yang tidak relevan dengan modernitas, penduduk yang berlebihan, korupsi, sehingga perlu dilakukan peningkatan produksi atau mengubah nilai-nilai rakyat. Program-program yang dijalankan seperti pelatihan teknis, bisnis kecil, pengembangan masyarakat, bantuan hukum, dan seterusnya.

Community development juga identik dengan tipe pelayanan yang berpijak pada konsep membantu rakyat untuk menolong dirinya sendiri (*help people to help themselves*), sebuah konsep yang sangat masyhur di dalam bidang pekerjaan sosial. Sebagai bagian dari paradigma reformasi, *community development* ini sejatinya sudah mulai banyak dikritik terutama dengan munculnya paradigma transformasi (kritis) yang lebih relevan dengan konteks Indonesia. Namun demikian, *community development* terlanjur mendominasi bahkan dalam bidang pekerjaan sosial ini telah menjadi

semacam teori dan metode yang mapan. Tidak heran jika banyak pendidikan pekerjaan sosial yang membuka jurusan pengembangan masyarakat. ini menandakan bahwa pekerjaan sosial di Indonesia sebenarnya lebih dekat dengan paradigma reformasi (liberal) dan dalam konteks tertentu justru berdekatan dengan paradigma neo-konservatif.

Kenapa berdekatan dengan paradigma neo-konservatif yang identik dengan kapitalisme itu? Kalau kita lihat dalam konsep *community development* maka di situ akan ditemukan semangat kapitalisme yang meminimalkan peran negara dalam pembangunan sosial. Pendek kata, *community development* sebenarnya menyimpan agenda tersembunyi dari ideologi neo-konservatif yang mempunyai misi meminimalkan peran negara dan memaksimalkan peran masyarakat dalam pembangunan sosial (Huda, 2009: 257). *Community development* dengan demikian telah mengelabui semangat pembangunan kesejahteraan sosial yang secara maksimal harus dilakukan oleh negara seperti halnya di Indonesia. Pengelabuan ini telah disinyalir oleh Ife (1995: 10), menurutnya penguatan sistem pelayanan sosial yang berbasis masyarakat sebagaimana menjadi ciri khas *community development* sesungguhnya adalah pengalihan perhatian terhadap keengganan negara dalam membangun masyarakat sebagaimana yang dipegang oleh paradigma neo-konservatif. Ringkasnya, mendukung dan memperkuat *community development* sejatinya adalah mendukung paradigma neo-konservatif.

4. Teori Ekosistem

Teori ekosistem adalah penggabungan dari teori *system* dan *ecology*. Teori ini merupakan antitesa dari teori medis yang banyak diadopsi oleh bidang pekerjaan sosial di masa-masa awal. Sebagaimana diketahui, pandangan medis banyak diadopsi oleh pekerjaan sosial antara tahun

1920 hingga 1960-an. Kondisi seperti ini mungkin sangat dipahami sebab pada kurun waktu tersebut teori-teori *casework* belum memiliki banyak perkembangan. Yang terjadi justru teori-teori perubahan perilaku banyak diadopsi dari kalangan kedokteran (medis). Padahal dari perspektif medis, problem manusia banyak yang disederhanakan dalam paradigma positivistik. Biarpun sebenarnya manusia adalah mahluk yang unik dan tidak bisa disederhanakan dalam rumus-rumus tertentu sebagaimana dalam perspektif medis. Ilustrasinya, ini seperti yang terjadi pada ilmu sosiologi yang mengadopsi teori-teori ilmu alam sehingga dalam sosiologi juga dikenal paradigma positivistik yang cenderung mengabaikan keunikan perilaku manusia (Huda, 2009: 32).

Sebagaimana teori psikodinamika, dengan mengadopsi pandangan medis ini seseorang yang mempunyai masalah diidentikkan dengan "sakit". Dalam penanganannya, juga seperti yang diterapkan dalam ilmu medis, terlebih dahulu klien didiagnosa secara personal dan selanjutnya dilakukan *treatment* (penanganan) sesuai hasil diagnosa tersebut (Zastrow,2004:54). Perspektif medis kemudian memberikan pengaruh dalam melakukan *assesment* (diagnosa) terhadap klien. Klien dipandang sebagai orang yang bermasalah ketimbang memiliki kekuatan. Ini yang kemudian membedakan perspektif medis dengan perspektif kekuatan (*strength*) dalam melakukan terapi klinis (Huda, 2009: 32).

Berbeda dengan pandangan medis di atas, teori ekosistem didasarkan kepada manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Yang pertama hal ini disumbang oleh teori *system*. Huda (2009: 33-34) mencatat teori sistem memiliki pandangan bahwa suatu sistem pada dasarnya adalah bagian dari sistem lain yang lebih besar. Jadi suatu sistem adalah subsistem dari sistem lainnya. Suatu sistem tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memperhatikan sistem lainnya. Misalnya, kasus

kekerasan yang terjadi pada anak di dalam keluarga, tidak secara sederhana akibat kesalahan perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Faktor eksternal tentang desakan kebutuhan ekonomi bisa jadi menjadi faktor yang memicu orang tua menjadi tertekan sehingga melampiaskan ketertekanannya tersebut dengan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Jadi, dalam pandangan *system* kondisi eksternal juga dapat menjadi faktor dominan dalam masalah sosial selain kondisi internal sendiri. Penganut aliran ini anti-reduksionis seperti yang banyak terjadi dalam perspektif medis. Perspektif medis cenderung mereduksi masalah-masalah kemanusiaan yang unik dan dinamis. Namun perspektif *system* cenderung menghargai sifat-sifat kemanusiaan yang unik dan tidak bisa dijelaskan secara medis.

Sumbangan yang kedua adalah teori *ecology*. Jika teori *system* memberikan penegasan tentang adanya perbedaan dan relasi antara manusia dengan sistem kehidupan lainnya, maka teori *ecology* cenderung berupaya untuk melakukan harmonisasi antara sistem yang berbeda tersebut. *Ecology* berasal dari istilah biologi yang merujuk pada pentingnya interrelasi antara organisme kehidupan dengan lingkungan fisik dan biologis. Dalam konteks kehidupan manusia, teori *ecology* memberikan penegasan bahwa bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang memiliki sumber-sumber penghidupan sebagaimana yang terdapat dalam sistem-sistem seperti yang dijelaskan di atas. Pandangan ini memberikan pengaruh dalam ilmu pekerjaan sosial bahwa seseorang akan memiliki keseimbangan hidup apabila dia mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan.

Teori ini menyumbang satu prinsip yang sangat penting dalam tradisi ilmu pekerjaan sosial yakni tentang *person-in-environment* (seseorang dalam lingkungan). Prinsip ini menggambarkan bahwa manusia berada

dalam suatu lingkungan yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap dirinya. Apabila seorang individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mengalami suatu masalah, maka sumber masalah bisa jadi juga berasal dari sistem-sistem sekeliling yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak.

Dari dua sumbangan ini lahirlah teori ekosistem yang seolah-olah telah menjadi mazhab universal dalam pekerjaan sosial. Dari teori sistem, perspektif ekosistem meminjam berbagai konsepsi berkaitan dengan sistem: sistem adalah seperangkat elemen yang saling berinteraksi; sistem saling terkait secara hirarkis; sistem dapat terbuka atau tertututup dalam berinteraksi dengan dunia luar; sistem dapat berada dalam keadaan homeostasis dan seimbang atau tidak seimbang; sistem diatur berdasarkan *feedback* positif dan negatif; perubahan dalam satu sistem dapat mempengaruhi sistem lainnya. Dari perspektif ekologi, perspektif ekosistem meminjam konsepsi bahwa terdapat adaptasi mutual antara individu dan lingkungan fisik dan sosialnya (Suharto, 2011: 72).

Teori ekosistem dengan jargon unggulannya, *the person-in-environment* (PiE) telah berpengaruh besar dalam praktik pekerjaan sosial di seluruh dunia. Teori inilah yang menjadikan seorang pekerja sosial bersifat generalis. Ketika muncul problem sosial, maka teori ini menganjurkan agar dalam penanganannya menggunakan pendekatan mikro, mezzo atau makro secara sekaligus. Ini adalah konsekuensi logis dari teori ekosistem yang memandang problem sosial secara holistik dan menyangkut banyak persoalan. Di sinilah kemudian muncul berbagai kritik, sebab dengan pendekatan generalis semacam ini maka pekerjaan sosial seolah-olah tidak memiliki ciri khas. Ketika menghadapi kasus *trafficking* misalnya, karena pengaruh teori ekosistem, jawaban yang muncul dari pekerja sosial adalah *trafficking* disebabkan oleh kemiskinan, penegakan hukum yang lemah, peluang

pekerjaan yang sempit dan seterusnya. Jawaban ini dapat dipastikan tidak ada bedanya dengan para ilmuan dari bidang lain yang bahkan tidak memiliki pengetahuan sama sekali terhadap ilmu kesejahteraan sosial.

Sekalipun demikian, kita patut memberikan apresiasi terhadap teori ekosistem ini karena telah berhasil mematahkan dominasi teori medis yang kurang relevan diterapkan dalam konteks pekerjaan sosial. Karena dengan teori ekosistem ini pekerja sosial mempunyai perspektif yang lebih luas dan memandang problem sosial secara komprehensif dalam hubungannya dengan sistem maupun lingkungan yang ada.

5. Teori Radikal

Teori radikal identik dengan adanya perubahan yang mendasar sampai ke akar-akarnya, hal ini sesuai dengan makna asal katanya. Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (2007: 935) radikal bisa diartikan sebagai '(hilang) sampai ke akar-akarnya sekali," atau bisa juga "(haluan politik yang) amat keras menuntut perubahan undang-undang, ketatanegaraan, dan sebagainya." Dari sini dapat dikatakan, radikal dalam konteks tertentu memang diasosiasikan dengan ideologi politik yang menuntut adanya perubahan secara mendasar dan sistemik. Di Indonesia misalnya, ada aliran keagamaan yang menuntut adanya perubahan mendasar dari sistem kenegaraan menjadi Negara Islam, mereka ini kadang disebut "Islam radikal."

Teori radikal dalam ilmu kesejahteraan sosial sejalan dengan pandangan progresif/kritis dalam melihat fenomena-fenomena sosial. Kalau dihubungkan dengan paradigma-paradigma yang ada dalam kesejahteraan ini relevan dengan paradigma demokrasi sosial, paradigma Marxist atau *socialist-collectivist*. Dengan kata lain, teori ini masih satu kelompok dengan teori-teori sosial kritis yang menekankan perubahan secara sistemik untuk

mengatasi suatu masalah sosial.

Teori radikal menganggap problem sosial sebagai persoalan struktural, bukan problem individual sebagaimana yang dipahami oleh teori psikodinamika atau teori-teori klinis lainnya. Karena fokus pada struktur, maka teori radikal ini banyak menisbatkan kata "struktur" dalam konsep-konsep teoritisnya. Misalnya Mullaly (1997:104) menggagas "pekerjaan sosial struktural" (*structural social work*) yang berfokus kepada struktur dalam masyarakat. Pekerjaan sosial, dengan demikian, harus melawan diskriminasi kelas, gender, ras, orientasi seksual, kecacatan dan kondisi kurang beruntung lainnya (*disadvantaged*) karena hal inilah menjadi sumber problem sosial. Oleh karena itu, perubahan harus dilakukan dalam konteks struktur-struktur dalam masyarakat, bukan individu. Ketika perubahan dilakukan dalam konteks individu, maka ini tidak relevan karena sumber masalah sesungguhnya berada dalam aras struktural bukan individu.

Gagasan radikal dalam pekerjaan sosial sebenarnya telah dimulai sejak masa awal perkembangan pekerjaan sosial sebagaimana terjadi di negara-negara Barat. Hal ini setidaknya ditandai dengan berdirinya gerakan *Settlement House* (*Settlement House Movement*) pada akhir abad 19-an. Gerakan ini lebih menegaskan diri untuk melakukan reformasi terhadap lingkungan daripada perbaikan terhadap manusianya. Gerakan SH bermula di London pada tahun 1884 dengan Toynbee sebagai salah satu tokohnya (Huda, 2009: 13). *Settlement hous* berbeda dengan gerakan sebelumnya yakni *the charity organization society* (COS) yang pertama kali berdiri di London pada tahun 1869. Berbeda dengan Sattlement hous yang berdiri setelahnya, COS ini justru menganggap bahwa tidak ada yang salah dengan tatanan sosial (*social order*) yang ada, sehingga problem sosial ditangani secara konvensional melalui derma (*charity*).

Ringkasnya, sebagaimana *settlement house* teori radikal merekomendasikan adanya perubahan secara struktural dalam menangani masalah sosial.

Teori radikal dalam kesejahteraan sosial juga banyak dipengaruhi oleh paradigma Marxist yang memandang adanya relasi kontradiktif antara kelas borjuis dan kelas proletar. Yang pertama selalu menindas yang kedua sehingga muncul ketidakadilan dan kemiskinan. Struktur masyarakat yang tidak sehat karena terjadinya penindasan antar kelas ini harus dirubah menjadi masyarakat tanpa kelas. Sumber ketidakadilan dan kemiskinan dipandang oleh teori radikal ini sebagai relasi struktur yang tidak saling menguntungkan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, perubahan harus dilakukan secara struktural, bukan pada wilayah individu maupun keluarga.

Teori radikal memahami masyarakat yang menganut sistem kapitalis secara terus-menerus akan memproduksi ketidakadilan dan kemiskinan. Hal ini disebabkan masyarakat kapitalis akan melahirkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, di mana kelas-kelas sosial dalam masyarakat tersebut selalu akan terjadi kontradiksi. Yang paling dirugikan adalah kelas proletar yang terdiri dari rakyat jelata yang dieksploitasi untuk kesenangan kelas borjuis yang mempunyai kekuasaan dan *privilege* (hak istimewa). Dengan adanya problem mendasar secara struktural inilah maka perubahan harus dilakukan secara revolusioner dengan restrukturisasi secara menyeluruh dari struktur sosial yang menindas pada masyarakat kapitalis tersebut.

Dalam pandangan teori radikal, masyarakat perlu disadarkan tentang adanya struktur sosial yang menindas tersebut. Mengenai kesadaran ini, sebagaimana Freire (1986;1981) dalam masyarakat perlu dirubah kesadarannya dari kesadararan magis

(*magic consciousness)* menuju kesadaran kritis (*critical consciounness*). Kesadaran kritis adalah implikasi dari paradigma kritis yang menganggap bahwa masalah dalam masyarakat terjadi karena struktur sosial yang tidak adil.

Namun demikian, perubahan secara struktural yang menjadi ide kunci teori radikal dalam konteks tertentu kurang relevan. Ketidakrelevanan ini disebabkan karena teori ini tidak mampu menjawab ataupun memberikan resep yang sempurna untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan klien dalam konteks emotional (Payne, 1997: 233). Apalagi pekerjaan sosial memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada klien yang mengalami masalah sosial baik itu yang bersifat sistemik maupun individual. Seperti halnya dalam kasus bentrok berdarah dalam masyarakat yang kerap muncul, misalnya di Sampang, Madura yang terjadi di bulan Syawwal (lebaran) 2012. Banyak sekali anak-anak yang mengalami traumatik karena bentrok berdarah. Menghadapi problem traumatik ini, mau tidak mau teori psikososial ataupun teori-teori yang diadopsi dari bidang ilmu psikologi sangat dibutuhkan untuk mengatasi problem emosional anak-anak tersebut. Pada wilayah ini, teori radikal kurang dapat bisa diaplikasikan karena penekanannya bukan pada problem psikologis namun struktur sosial.

6. Teori *Anti-Oppressive*

Penindasan (*oppression*) pada umumnya dipahami sebagai dominasi terhadap kelompok tertindas dalam masyarakat oleh kekuatan kelompok yang lain baik itu secara politik, ekonomi, sosial dan budaya (Mullaly, 2002: 27). Dominasi tidak bisa dipahami dalam konteks individual *an sich,* karena dominasi berada dalam konteks struktur masyarakat dan dalam hubungan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat

yang lainnya. Ketika ada satu kelompok masyarakat yang diabaikan hak-haknya, sedangkan kelompok lainnya dipenuhi bahkan mendapatkan *privilege* (hak istimewa) maka di sinilah terjadi penindasan. Kelompok yang terabaikan ini mengakibatkan dirinya tidak bisa memperoleh peluang yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan maupun mengembangkan potensi dirinya.

Mullaly (2002: 28) mencatat penindasan terjadi ketika hak-hak untuk mengembangkan diri dari seseorang dalam kehidupan sosial dibatasi oleh kelompok masyarakat yang lebih dominan melalui berbagai aturan maupun kekuasaan. Akan tetapi, yang perlu dipahami adalah tidak semua peraturan atau batasan-batasan tertentu dapat dianggap sebagai penindasan. Misalnya, setiap orang yang mengendarai mobil harus memakai sabuk pengaman, berhenti di *traffic light* ketika lampu merah menyala, atau kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas lainnya adalah bukan bentuk daripada penindasan. Sebuah penindasan terjadi ketika peluang seseorang untuk mengembangkan diri atau memperoleh hak-haknya dihalangi.

Salah satu contoh penindasan adalah apa yang pernah terjadi pada masa orde baru terhadap etnis Tionghoa. Pada waktu itu etnis Tionghoa yang hidup di Indonesia dihalangi hak-haknya untuk mengekspresikan diri. Mereka dilarang untuk menggelar kesenian barongsai secara terbuka, merayakan hari raya imlek secara terbuka, ataupun dilarangnya penggunaan bahasa mandarin di depan umum. Di sini terlihat terhalanginya hak-hak warga Tionghoa untuk mengeskpresikan diri tidak lain adalah bagian dari penindasan. Teori *anti-oppressive* merupakan teori yang berpijak pada semangat untuk melawan penindasan dalam berbagai bentuk, baik itu secara sosial, politik, ekonomi bahkan kehidupan beragama.

Dalam konteks Indonesia kita menyaksikan bahwa

penindasan tidak hanya terjadi secara etnik dan pada masa yang lalu (orde baru). Pada masa sekarang pun, penindasan masih kerap dijumpai, seperti halnya penindasan terhadap kelompok agama tertentu yang dianggap menyimpang, sebut saja Ahmadiyah atau Syiah. Karena dianggap menyimpang, aliran Ahmadiyah di berbagai tempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan mulai dari larangan beribadah hingga diusir dari tempat tinggalnya. Terhadap para penganut Syiah pun juga demikian, seperti yang terjadi pada bulan Agustus 2012 di Sampang, Madura, Jawa Timur. Penganut Syiah ditindas oleh mayoritas masyarakat muslim yang menganut Sunni, rumah mereka dibakar, bahkan hingga ada korban jiwa. Fenomena kekerasan terhadap kelompok keagamaan ini jelas sebagai bentuk penindasan karena kelompok masyarakat mayoritas menghalangi hak-hak mereka untuk mengembangkan diri bahkan untuk melaksanakan hak yang paling mendasar, yakni menjalankan keyakinan keagamaannya. Ironisnya, fenomena penindasan terhadap kelompok keagamaan ini dilegitimasi oleh pemerintah maupun lembaga resmi keagamaan lainnya, sehingga penindasan terjadi karena adanya faktor regulasi dan legitimasi secara keagamaan. Ringkasnya, doktrin atau keyakinan keagamaan dapat menjadi faktor terjadinya penindasan.

Selain doktrin keagamaan, masalah budaya dapat juga menjadi faktor penindasan ini. Penindasan terhadap kaum perempuan yang melahirkan berbagai gerakan feminisme di Indonesia dan dunia adalah satu contoh penindasan yang terjadi karena faktor budaya. Sebagaimana diketahui, budaya patriarkhi sangat kuat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan dan sebaliknya perempuan sebagai kelompok *subordinate*. Perempuan dianggap hanya boleh berperan pada wilayah-wilayah domestik, dan hanya kaum laki-

lakilah yang mempunyai hak untuk berperan di wilayah publik. Padahal setiap perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam menjalankan peran sosial-politiknya di wilayah publik. Pada saat hak kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam konteks publik dibatasi inilah, maka telah terjadi penindasan terhadap kaum perempuan.

Potensi penindasan selalu ada pada kelompok minoritas terhadap mayoritas. Dalam konteks Indonesia, ini bisa dicontohkan seperti: Muslim vs non-muslim; kulit sawo matang vs kulit hitam; Jawa vs Tionghoa; heteroseksual vs homoseksual; dan seterusnya. Penindasan tersebut bisa terjadi dalam lima (5) bentuk, bisa dalam bentuk eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, penjajahan budaya, dan kekerasan (Mullaly, 2002: 42-46). *Pertama*, eksploitasi terjadi ketika kelompok dominan memanfaatkan kelompok *subordinate* (minoritas) untuk mempertahankan dan memperkuat status, kekuatan dan aset yang dimilikinya. Eksploitasi kadang identik pada masyarakat industri di mana pemilik modal selalu memanfaatkan buruh untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya.

Kedua, marginalisasi biasanya menimpa kelompok-kelompok minoritas karena tidak terakomodasi oleh lapangan pekerjaan. Misalnya, masyarakat urban, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak mempunyai skill, orang cacat (*difable*), orang tua tunggal (*single mother*) dan kelompok masyarakat lainnya. Bentuk eksploitasi semacam ini memarginalkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung tersebut dari kelompok mayoritas. Biasanya mereka tidak memiliki kesempatan yang sama karena terhalang oleh aturan-aturan yang diciptakan baik secara sengaja maupun tidak. Misalnya, sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan dengan salah satu syaratnya pelamar harus sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani diindikasikan tidak mengalami

cacat fisik. Syarat ini sudah pasti memarjinalkan para *difable* meskipun mereka sesungguhnya mempunyai kemampuan intelektual yang lebih baik.

Ketiga, terhambatnya seseorang dalam meningkatkan kapasitas diri sehingga mereka mengalami ketidak-berdayaan. Ketidakberdayaan ini biasanya dialami oleh masyarakat pekerja terutama mereka yang tidak profesional. Karena ketidakprofesionalannya maka dirinya tidak mampu membuat keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri. Tapi kondisi ini juga disebabkan oleh sistem yang tidak menghendaki agar dirinya bebas memutuskan sesuatu. Misalnya, seorang buruh yang tidak berdaya sehingga tidak kuasa untuk membuat atau mengikuti "organisasi serikat buruh" karena ada larangan ataupun tekanan dari sistem kerja.

Keempat, penjajahan budaya terjadi ketika kelompok mayoritas menjadikan pengalaman dan budayanya sebagai norma umum yang harus digunakan oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat ada umumnya hanya mengenal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Maka dalam kartu identitas penduduk (KTP), kolom jenis kelamin hanya ada dua pilihan ini. Padahal di luar sana ada masyarakat yang kini sudah muncul jenis kelamin yang berbeda, seperti waria. Maka waria sebenarnya telah terjajah secara budaya, sebab mayoritas masyarakat telah memaksakan jenis kelamin hanya pada dua jenis tersebut. *Kelima*, kekerasan baik itu kekerasan secara fisik maupun non-fisik. Kekerasan fisik mungkin semua orang sepakat untuk menentangnya akan tetapi kekerasan non-fisik tidak semua orang sensitif terhadapnya. Kekerasan non-fisik dimaksud seperti gangguan (*harassment*), ejekan (*ridule*) atau intimidasi. Misalnya, seorang perempuan diganggu dengan cara dicolek bahkan hingga pemerkosaan; waria yang diejek atau dirayu dengan menirukan gaya bicaranya; seorang yang berbeda keyakinan diintimidasi dengan berbagai

cara dan seterusnya.

Pendek kata, lima hal di atas adalah bentuk lain daripada penindasan dalam masyarakat. Pekerja sosial harus sensitif terhadap bentuk-bentuk penindasan tersebut jika menggunakan teori ini sebagai landasan praktiknya. Memang teori ini mempunyai konsekuensi-konsekuensi lanjutan ketika seorang pekerja sosial menggunakannya. Misalnya ketika menghadapi kelompok waria, seorang pekerja sosial harus mempunyai rasa empati sehingga dia harus menghindarkan diri dari sikap-sikap yang mungkin justru akan mendiskriminasinya.

E. Penutup

Meskipun terkadang berasosiasi sebagai sesuatu yang abstrak, esoteris dan identik dengan pelajaran di bangku kuliah, sebuah teori bersifat kongkrit dan operasional dalam praktik pekerjaan sosial. Teorilah yang menggerakkan seorang pekerja sosial untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, disadari maupun tidak. Kemampuan teori untuk menggerakkan praktik terjadi karena teori berisi sekumpulan konsep yang dapat menggambarkan dan menjelaskan bahkan meramalkan fenomena. Kemampuan dalam menjelaskan atau meramalkan fenomena inilah yang bisa mendorong maupun mencegah pekerja sosial dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Teori-teori kesejahteraan sosial yang telah dijelaskan di atas adalah turunan daripada paradigma-paradigma dalam kesejahteraan sosial. Hal ini mengandung arti bahwa pembentukan teori harus diawali dengan pembentukan paradigma baru yang merupakan antitesa dari paradigma lama. Pembentukan paradigma maupun teori baru ini sangat rasional dalam konteks Indonesia, sebab paradigma dan teori pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam setting sosial masyarakat setempat. Dia berisi keyakinan secara sosial, ekonomi, ataupun

politik yang berasal masyarakat setempat.

Lebih-lebih lagi, ilmu kesejahteraan sosial adalah ilmu praktik yang operasional. Disebut sebagai ilmu praktik karena ilmu ini berkepentingan dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Disebabkan problem sosial bersifat unik, sehingga mempunyai sebab atau faktor yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya maka diperlukan seperangkat konsep yang berbeda pula dalam menanganinya. Dalam konteks inilah maka pekerja sosial wajib bersifat kritis dalam menggunakan teori-teori kesejahteraan sosial untuk menuntun praktik pekerjaan sosial yang dilakukannya. □

BAB IV
REVOLUSI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL: SEBUAH KENISCAYAAN?

A. Pembuka

Jika mencermati bangunan epistemologis ilmu kesejahteraan sosial (seperti telah dijelaskan bab-bab sebelumnya) maka dapat dikatakan ilmu ini lahir dalam konteks masyarakat Barat. Oleh karena itu, ilmu ini menyerap nilai dan budaya dari hasil interaksi dengan konteksnya. Idealnya, sebuah entitas keilmuan lahir dan dibentuk oleh konteks masing-masing. Seperti halnya paradigma maupun teori, idealnya dia dilahirkan dan dibentuk oleh konteksnya. Dengan kata lain, ilmu kesejahteraan sosial menjadi ideal jika bangunan keilmuan ilmu ini dibentuk oleh konteks sosial dan budaya Indonesia.

Asumsi ini cukup beralasan, sebab seperti halnya teori-teori kesejahteraan sosial yang telah banyak kita kenal kerap tidak 'berdaya' dalam menjelaskan sebuah

fenomena. Kemampuan prediksinya meleset, kemampuan kontrolnya tidak tepat, dan bahkan tidak berkutik ketika dituntut untuk menjelaskan sebuah fenomena problem sosial (*social problem*). Padahal, sebagaimana fungsinya, sebuah teori mestinya mempunyai kemampuan untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi atau bahkan mengontrol sebuah masalah.

Ketidakberdayaan teori tersebut tidak lain adalah pertanda adanya anomali yang harus dijawab dengan revolusi ilmu. Revolusi ilmu ini tentu tidak dimaksudkan sebagai gerakan berdarah yang heroik. Namun tidak lebih dari sebuah kerja intelektual untuk merumuskan paradigma maupun teori baru menggantikan yang lama. Revolusi ilmu, dengan demikian, bukanlah kerja intelektual yang gampang karena harus dilakukan dengan proses yang panjang. Pembahasan dalam bab ini setidaknya menjadi penggugah atas kesadaran kita betapa revolusi ilmu adalah sebuah keniscayaan dalam ilmu kesejahteraan sosial.

B. Problem Paradigmatis

Sekitar akhir tahun 2008 penulis punya kesan menarik khususnya ketika menjalani proses praktikum saat menempuh studi S2 Kesejahteraan Sosial di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karena ingin sesuatu yang menantang, saat disodori beberapa alternatif tempat praktikum, penulis memilih suatu komunitas marjinal berbasis tempat remang-remang di jantung kota Yogyakarta. Lokasinya di pinggir rel, berhimpitan dengan stasiun utama kota Yogyakarta. Komunitas ini mencari penghidupannya di tengah perkampungan yang padat dan (maaf) kumuh. Jika siang hari suasana sangat sepi, hanya deru kereta api yang lalu lalang membelah lokasi. Tapi jangan tanya ketika malam hari, terutama pada waktu malam minggu. Mirip pasar malam. Ya, inilah tempat lokalisasi yang sangat 'telanjang' di kota

Yogyakarta.

Namun penulis tidak hendak membahas apa dan bagaimana tempat lokalisasi tersebut. Karena sesungguhnya yang menjadi sasaran praktikum penulis adalah mengenai cara kerja sebuah LSM yang melakukan pendampingan terhadap para pekerja seks di tempat tersebut. Sebuah LSM tua yang gigih memperjuangkan hak-hak kaum marjinal perkotaan, seperti anak jalanan, pekerja seks, waria, korban kekerasan dan seterusnya.

Yang menarik adalah, sekalipun yang dikerjakan LSM tersebut adalah bidang garapnya ilmu kesejahteraan sosial akan tetapi penulis justru tidak mendapati satupun aktivisnya yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial. Bahkan direkturnya pada saat itu, adalah mantan aktivis kemahasiswaan yang kencang mengkampanyekan perubahan sosial. Kebanyakan aktivisnya justru berlatar belakang pendidikan sosiologi, psikologi, politik, dan ilmu lain yang tidak relevan. Tapi ini bukan berarti menjadikan cara kerjanya menyimpang dari tujuan memberdayakan kaum marjinal tersebut. Malah di situ penulis temukan praktik yang ideal sebagaimana penulis pelajari di bangku kuliah terkait ilmu kesejahteraan sosial.

Bagaimana tidak, mereka sungguh serius mendampingi para pekerja seks. Pendampingan dilakukan secara kontinyu dan terarah. Sikap pekerja sosialnya pun sangat humanis dengan tidak serta merta mengharamkan praktik tersebut. Perubahan dilakukan secara pelan-pelan. Ringkasnya pendekatan yang dipakai tidak semata-mata agama yang mungkin jika ini dipakai akan langsung memvonis dengan mengharamkannya.

Sebaliknya, pemandangan yang bertolak belakang justru penulis saksikan pada praktik-praktik kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial. Kebetulan mereka kebanyakan berada di

institusi-institusi pemerintah yang mengurusi tentang kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan LSM tadi, aktivitas mereka justru formal, sesaat, *ad hoc* sehingga terkesan *kiss and run*. Belum selesai satu program, sudah harus melaksanakan program lainnya. Program lain belum disusun, sudah harus dikejar target menghabiskan anggaran untuk program selanjutnya.

Memang penulis menyadari bahwa tidak sedikit pekerja sosial yang berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial sudah bekerja dengan benar dan bahkan lebih dari ideal. Akan tetapi, mengapa justru mereka yang berlatar belakang pendidikan non kesejahteraan sosial kadangkala lebih fasih dalam melakukan kerja-kerja sosial. Bahkan penulis pernah mendengar kelakar seorang Doktor yang 'keceplosan' berkata, "Pekerjaan sosial itu tidak *usah* dipelajari, karena semua orang sesungguhnya bisa melakukannya." Seloroh seorang Doktor ini mungkin dapat dimaklumi, sebab kenyataannya memang pekerja sosial sering dijadikan sebagai profesi alternatif. Seorang sarjana yang terasa sulit mencari pekerjaan, beralih mendirikan LSM dengan berbagai aktivitasnya. Sering juga ditemui, seorang politikus yang tidak lagi menyandang jabatan publik, tiba-tiba banting setir mendirikan yayasan sosial. Bahkan seorang artis yang banjir duit karena jobnya rame, mendadak pekerja sosial. Pendeknya, pekerja sosial – tentu dengan berbagai varian sebutan – disadari maupun tidak telah menjadi profesi alternatif di negeri ini.

Dugaan penulis, – semoga saja ini keliru – pendidikan kesejahteraan sosial khususnya di Indonesia yang mestinya memproduksi pekerja sosial belum memiliki bangunan epistemologis yang kuat. Dugaan berlanjut kepada anggapan bahwa ilmu kesejahteraan sosial yang dipelajari di bangku-bangku kuliah jurusan kesejahteraan sosial atau yang serumpun dengannya itu masih terkesan

"impor" dan belum membumi dengan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Walhasil, percuma saja apa yang dipelajari tersebut sebab ketika diaplikasikan untuk menangani masalah sosial justru tak relevan dengan kondisi sosial masyarakat.

Di sinilah sepertinya perlu dilakukan kajian secara epistemologis, – suatu cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul (dasar-dasar) ilmu pengetahuan – perlu dilakukan dalam konteks ilmu kesejahteraan sosial. Kajian tentang paradigma, teori bahkan hingga metodologi adalah bagian dari kerangka epistemologis ini. Bangunan keilmuan akan sulit tegak tanpa adanya bangunan epistemologisnya, termasuk dalam konteks ilmu kesejahteraan sosial. Inilah kenapa pada waktu awal-awal konversi dari IAIN ke UIN misalnya, akademisi UIN Sunan Kalijaga justru terlebih dahulu 'meributkan' bangunan epistemologisnya, bukan yang lain. Maka pembicaraannya pada waktu itu bagaimana mengintegrasikan secara epistemologis antara ilmu-ilmu sekuler dan ilmu agama. Ini adalah urutan yang benar dalam membangun suatu entitas keilmuan.

Penulis makin yakin tentang adanya problem epistemologi ini ketika mengingat bagaimana tragisnya nasib kesejahteraan sosial di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (biasa disapa Gus Dur). Pada 26 Oktober 1999 dengan sangat meyakinkan, Gus Dur membubarkan Departemen Sosial/ Depsos (kini Kementerian Sosial). Padahal, terlepas sebagai lumbung korupsi seperti yang dituduhkan Gus Dur, Depsos adalah departemen yang menjadi cermin tentang nasib kesejahteraan sosial di Indonesia.

Alasan Gus Dur membubarkan Depsos memang dapat dimengerti, yakni karena kasus korupsi yang sudah mendarah daging dan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Sehingga Gus Dur mengambil keputusan untuk membubarkan Depsos

karena telah menjadi ladang korupsi yang sangat serius (Hakim, 2010: 2). Sejak itu nasib kesejahteraan sosial di Indonesia terlunta-lunta. Panti-panti sosial yang berjumlah puluhan dan bahkan mungkin hingga ratusan, bagaikan anak ayam kehilangan induk. Meskipun masih tetap berjalan, tentu mengalami problem manajemen yang sangat serius.

Yang menarik, selain karena maraknya praktik korupsi, alasan filosofis Gus Dur adalah kesejahteraan sosial telah menjadi lahan bisnis, sehingga pemerintah tidak perlu lagi untuk ikut campur dalam mengintervensi masalah kesejahteraan sosial ini (*Republika*, 29/10/1999). Mendengar alasan ini tentu kita akan mengingat bagaimana debat epistemologis antara paradigma konservatif dan liberal (Huda, 2009: 94-100). Keduanya memiliki pandangan yang bertolak belakang khususnya berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial suatu warga negara. Yang pertama (konservatif) menganut ekonomi pasar bebas yang menolak intervensi negara, termasuk dalam urusan kesejahteraan sosial. Negara hanya boleh turun tangan jika masalah sosial benar-benar telah parah. Yang kedua (liberal) cenderung mendukung *welfare state* di mana kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara.

Dari dua paradigma ini, tentu saja kebijakan membubarkan Depsos adalah manifestasi dari paradigma konservatif. Tidak diperlukannya campur tangan pemerintah dalam urusan kesejahteraan sosial warganya karena kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab masyarakat. Namun apakah mungkin, Gus Dur yang dikenal mempunyai pemikiran sangat kritis dan progresif justru menganut paradigma yang *nota bene* adalah bagian dari kapitalisme? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Namun kenapa ini bisa terjadi? Jawaban yang paling tepat adalah mungkin disebabkan bahwa rumusan paradigma kesejahteraan sosial di Indonesia

masih belum *clear*. Belum ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih serius menyangkut problem paradigmatis (epistemologis) ini. Sehingga wajar jika dalam praktiknya kerap dijumpai problem-problem paradigmatis tersebut.

Di sinilah saya kira pentingnya adanya upaya perumusan bangunan epistemologis ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia. Namun demikian, sayangnya amat jarang sekali diperbincangkan bagaimana bangunan epistemologisnya terlebih dahulu. Malah belum lagi ilmunya mapan secara epistemologis, sudah ribut soal Undang-Undang, defenisi pekerja sosial, membuat kurikulum, mencari metode praktik dan seterusnya yang hanya berada pada wilayah kulit. Ibarat membangun rumah, pondasi belum dibuat namun sudah tergesa-gesa hendak mendirikan tembok dan membuat atap. Alhasil, jangankan diterjang angin puting beliung, ditiup saja barangkali sudah roboh berkeping-keping.

Kajian ilmu kesejahteraan sosial dalam kerangka epistemologis ini misalnya berkaitan dengan teori. Sebuah teori keilmuan membantu seseorang dalam melihat realitas. Tentang kemiskinan misalnya, dengan adanya teori akan mampu menjelaskan mengapa mereka miskin. Ketika diketahui penyebab kemiskinannya, maka akan mudah dalam menentukan praktik apa yang tepat untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Sedangkan teori ini tidak lain diturunkan oleh seperangkat paradigma. Tanpa adanya pemahaman dan penerapan mengenai paradigma maupun teori ini, mustahil praktik kesejahteraan sosial di Indonesia dapat berjalan dengan benar.

Terjadinya anomali praktik maupun perkembangan keilmuan dari ilmu kesejahteraan sosial seperti yang penulis duga di atas mungkin inilah penyebabnya. Yakni tidak adanya pemahaman maupun perumusan yang memadai berkaitan dengan paradigma maupun teori kesejahteraan sosial. Inilah setidaknya yang menjadikan

buku ini penting untuk mengarahkan masa depan praktik maupun perkembangan keilmuan daripada kesejahteraan sosial. Bukan pekerjaan yang gampang memang untuk merumuskan bagaimana paradigma maupun teori kesejahteraan sosial yang tepat yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Maka dari itu, buku ini setidaknya masih sekedar sebuah undangan untuk melakukan kerja intelektual yang tidak ringan tersebut.

C. Anomali-Anomali

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II anomali merupakan suatu keadaan yang memperlihatkan adanya ketidakcocokan antara kenyataan (fenomena) dengan paradigma yang dipakai. Adanya anomali ini mendorong sebuah entitas keilmuan untuk melakukan perubahan secara paradigmatis. Sebab, paradigma pada *normal science I* dalam realitas tidak mampu menjelaskan fenomena yang ada sehingga memerlukan paradigma baru yang lebih relevan dengan realitas yang ada.

Kita lihat misalnya, paradigma ataupun teori yang condong meletakkan kesalahan pada individu ketika melihat masalah sosial. Umumnya, pandangan ini dominan di negara-negara maju seperti halnya di Barat. Di negara tersebut, pandangan ini mungkin tidak menjadi soal, sebab jenis masalah sosial yang ada di sana bersifat individualis. Misalnya, alkoholisme, kenakalan remaja, depresi, lesbian/homoseksual, dan seterusnya. Sehingga, masalah sosial yang ada di sana masih relevan jika pandang dengan menggunakan pendekatan individualis yang identik menyalahkan korban (*blaming the victim*).

Namun jika kita membandingkan problem sosial yang ada di negara-negara maju dengan negara berkembang seperti halnya Indonesia, maka jenis masalah sosial yang dihadapi mempunyai perbedaan yang mendasar. Misalnya Indonesia menghadapi problem sosial yang sifatnya struktural, seperti kemiskinan, pengangguran,

diskriminasi, penegakan hukum, dan masalah lain yang intinya bersumber dari kegagalan sistem atau pemerintah dalam menyediakan pelayanan sosial yang memadai. Artinya, paradigma atau teori yang awalnya mungkin relevan untuk diterapkan di negara-negara maju, setelah diadopsi di negara berkembang, paradigma maupun teori tersebut rupanya tidak berhasil memberikan penjelasan yang memadai. Alih-alih memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah, justru menimbulkan masalah baru.

Anomali berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial ini setidaknya telah berlangsung sejak masa Orde Baru ketika Indonesia mulai mengadopsi pembangunan kesejahteraan sosial berdasarkan kerangka modernisasi yang menerapkan model pembangunan pertumbuhan. Pendekatan pembangunan ini adalah strategi dan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang memberi perhatian khusus kepada tingkat tabungan dan investasi serta intensitas modal dengan teknologi modern. Strategi dan kebijakan ini mengasumsikan bahwa industrialisasi yang cepat dan perluasan sektor modern pada umumnya adalah jawaban terbaik bagi kebutuhan pembangunan ekonomi yang cepat dan penciptaan lowongan lapangan kerja. Model pertumbuhan ini diterapkan baik di sektor industrialisasi perkotaan maupun sektor pertanian pedesaan. Kebijakan pembangunan pertanian pedesaan diwujudkan melalui program "revolusi hijau." Pendekatan pembangunan (*developmentalisme*) berasumsi bahwa kemiskinan disebabkan oleh keterbelakangan seseorang. Karena itu, nilai atau tradisi yang menyebabkan seseorang terbelakang harus dimodernkan. Ini setidaknya selaras dengan pemikiran ahli sosial dari Amerika Serikat, David MacClelland yang menyatakan bahwa kondisi rakyat yang terbelakang disebabkan oleh nilai dan tradisi yang tidak cocok bagi pembangunan (Fakih, 2008: 101-102).

Pada tahun 1970-an, praktik pekerjaan sosial oleh

karenanya mengadopsi teori pembangunan ini dengan melakukan perubahan terhadap keyakinan, sikap, nilai dan pranata tradisional guna membantu rakyat menjadi lebih modern. Upaya perubahan ini misalnya dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dengan asumsi bahwa pembangunan akan bekerja jika modal diberikan kepada orang yang benar, yakni para wiraswasta yang memiliki kebutuhan berprestasi yang tinggi (*High Need for Achievement*). Karenanya, pada saat itu (bahkan hingga kini) *achievement motivation training* (AMT) dianggap sebagai solusi paling ampuh untuk mengurai masalah sosial.

AMT tersebut kini sudah banyak dimodifikasi dengan berbagai varian. Baik itu di media cetak maupun elektronik, trend AMT bak jamur di musim penghujan. Lihat saja misalnya di salah satu stasiun televisi, seminggu sekali menayangkan seorang tokoh yang sohor dan kerap "mengumbar" kalimat-kalimat indah untuk menggugah motivasi seseorang. Atau di koran yang hampir-hampir setiap hari muncul iklan seminar pelatihan menuju sukses dengan janji-janji gombalnya. Menurut saya ini adalah wujud paling nyata dari teori pembangunan yang meletakkan sikap atau nilai seseorang sebagai kunci kesejahteraan maupun kemelaratan.

Teori pembangunan – atau yang dalam konteks buku ini identik dengan paradigma neo-konservatif maupun liberal – sesungguhnya sejak tahun 1980 hingga 90-an telah banyak ditinggalkan. Hal ini disebabkan, teori pembangunan yang sudah bertahun-tahun diterapkan ternyata tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat yang terbelakang. Bahkan anggapan kegagalan tersebut makin menguat saat Indonesia diterpa krisis moneter yang hebat pada 1997 disusul dengan gerakan reformasi yang diprakarsai oleh gerakan mahasiswa setahun sesudahnya. Namun demikian, meski teori pembangunan terbukti gagal

Indonesia tidak kunjung meninggalkan prinsip-prinsip teori pembangunan ini, bahkan dalam konteks praktik kesejahteraan sosial.

Padahal jika diamati secara serius, masalah sosial yang ada (dalam konteks Indonesia) disebabkan oleh struktur yang timpang dalam sistem yang ada. Misalnya, masalah kemiskinan, pengangguran, anak jalanan bahkan hingga konflik sosial sesungguhnya penyebabnya adalah struktur dan sistem sosial yang timpang. Ketika buku ini ditulis, baru saja terjadi tawuran antar pelajar di Jakarta, yakni antara SMAN 6 dengan SMAN 70 pada 24 September 2012. Yang membuat miris adalah, akibat tawuran ini seorang pelajar siswa SMAN 6 Alawy Yusianto Putra (15 tahun) meninggal akibat luka bacok di tubuhnya. Menanggapi kasus ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, berkomentar di salah satu stasiun televisi swasta, 27 September 2012. Sang Menteri tersebut sempat mendatangi pelaku pembacokan dan dia merasa *surprise,* sebab konon pelaku merasa puas dengan membunuh korban. Namun yang menjadi catatan di sini adalah mengenai komentar Sang Menteri yang menganggap bahwa ada problem serius pada anak pelaku pembunuhan tersebut. Bahkan dari ciri-ciri fisiknya dapat diketahui anak tersebut memang bermasalah dalam perilakunya.

Jelas bahwa anggapan ini adalah representasi dari paradigma liberal yang menyandangkan kesalahan pada individu. Padahal, problem kenakalan remaja dapat saja terjadi karena sistem pendidikan yang sangat membebani. Sehingga anak didik tidak sempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka menghindari perilaku buruk seperti halnya tawuran. Bahkan kasus yang terjadi pada tawuran antar SMU di atas lebih parah lagi. Suatu kali saya pernah membaca *kultwit* (kuliah twitter) dari pemilik akun @gaulabis69. Dia mengaku sebagai alumni SMU 70 yang memang sejak

semula dikenal mempunyai budaya tawuran (khususnya dengan SMUN 6). Tradisi tersebut berjalan selama bertahun-tahun, bahkan Dia mengaku jari anaknya hampir putus gara-gara tawuran. Ironisnya, budaya kekerasan ini dimulai sejak anak masuk sekolah. Alumni, senior dan bahkan guru ikut membudayakan tradisi ini. Perkelahian antar murid baru harus dilakukan, tidak peduli dengan sesama sahabat atau tidak. Kekerasan diproduksi dan dikembangkan terus-menerus. Hingga, bentrok berdarah pada 24 September tersebut terjadi. Ini jelas tidak hanya menyangkut anak sebagai pelaku kekerasan, tetapi anak yang berada dalam lingkungan dan sistem yang keliru. Pandangan yang menyalahkan anak jelas suatu anomali sehingga cara pandang melihat masalah ini harus diubah dengan melihat sistem yang ada.

Permasalahan pendidikan memang amat rumit. Sistem pendidikan lah yang menjadi sumber anak didik yang salah kaprah. Misalnya ini dilihat dari sistem pendidikan yang sangat membebani. Pendidikan yang sangat membebani ini mungkin dapat dirasakan oleh orang-orang yang kini berusia sekitar 40 tahun. Mereka yang kini berusia 40 tahun mungkin ingat ketika dulu duduk di bangku SMA, cukup membawa 1-2 buku tulis yang tipis ketika sekolah. Sehingga, melipat dan menyelipkan buku di saku belakang celana adalah kebiasaan *trend* saat itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Jangankan anak SMA, anak SD saja bisa sampai terbungkuk-bungkuk membawa tas yang berisi berlusin-lusin buku tulis lengkap dengan buku pelajaran ketika berangkat sekolah. Ini terlihat jelas bahwa sistem pendidikan sangat tidak humanis karena membebani siswa didik pada pelajaran-pelajaran di sekolah.

Pendeknya, pendekatan *person blame approach* yang kebanyakan masih dipakai hingga sekarang, dalam realitasnya tidak memadai untuk menjelaskan berbagai

problem sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya kasus tawuran antar pelajar tadi, jika *person blame approach* yang dipakai, maka intervensinya mengarah kepada individu yang mengalami masalah. Akibatnya, ini seperti hanya mengobati simtomnya (gejalanya) saja, bukan sumber penyakitnya. Ibarat seorang yang sakit gigi, sakitnya tersebut tidak akan sembuh total karena obat yang diminum hanya meredakan rasa sakit. Sebab, obat tersebut hanya mengobati simtomnya, tapi bukan sumber penyakitnya.

Beginilah, anomali-anomali sesungguhnya mulai terjadi di masyarakat dalam praktik kesejahteraan sosial. Paradigma dan teori-teori yang dipakai untuk menangani masalah sosial banyak yang tidak relevan sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Alih-alih dapat menyelesaikan masalah, intervensi yang dilakukan tidak kunjung menyelesaikannya karena hanya mengobati simtom, bukan sumber masalahnya. Pada titik terjadinya anomali ini, sudah barang tentu sangat diperlukan sebuah upaya untuk mempertanyakan paradigma yang ada. Apakah paradigma tersebut masih relevan untuk menjelaskan fenomena sosial yang ada? Di sinilah relevansi revolusi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial.

D. Keniscayaan Revolusi Ilmu

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II, *normal science I* dalam perkembangannya karena telah melalui berbagai konteks yang kompleks maka akan mengalami anomali. Anomali inilah tampaknya yang telah terjadi dalam konteks ilmu kesejahteraan sosial seperti telah dijelaskan panjang lebar pada pembahasan di atas. Anomali dalam ilmu kesejahteraan sosial diindikasikan dengan ketidakmampuan paradigma yang ada dalam menjelaskan realitas sosial seperti halnya kemiskinan ataupun problem sosial lainnya. Seperti diilustrasikan

dalam kasus tawuran antar pelajar di atas, paradigma liberal tampaknya tidak berhasil menjelaskan dengan baik dari fenomena sosial yang terjadi. Ketidakberhasilan dalam menjelaskan fenomena ini akan membawa efek domino, seperti terhadap hasil diagnosis yang akan berdampak pada *treatment* atau intervensi yang selanjutnya dilakukan.

Jika diagnosanya saja keliru, maka tidak mungkin intervensi yang akan dilakukan dapat menyelesaikan masalah. Misalnya terhadap problem kenakalan remaja pada kasus tawuran yang sudah diilustrasikan di atas. Ketika pekeja sosial menggunakan paradigma liberal atau neo-konservatif, maka sumber masalah yang didiagnosis terdapat pada pelaku tawuran. Padahal, faktanya kenakalan remaja hanyalah simtom atau gejalanya saja. Ibarat sakit kepala, kenakalan remaja hanyalah rasa sakitnya saja. Tapi bukan sumber masalah yang sesungguhnya. Maka, obat sakit kepala yang hanya menghilangkan rasa sakit hanya akan bersifat sementara karena tidak mengobati sumber penyakit.

Beberapa karya tulis di bidang kesejahteraan sosial memang telah banyak menyinggung perlunya perubahan paradigmatis ini. Namun dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai hal ini masih sangat jarang. Jangankan yang berbicara tentang pentingnya perubahan paradigma tersebut, yang mendeskripsikan paradigma-paradigma yang ada saja masih sangat jarang ditemukan. Sebab, amat janggal sekali jika tiba-tiba muncul buku yang mengkritik tradisi pekerjaan sosial, padahal deskripsi mengenai pekerjaan sosial saja masih sangat jarang. Namun saya sendiri merasa beruntung telah menulis buku tentang pekerjaan sosial secara deskriptif, yakni *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar* (2009). Sehingga, saya tidak merasa melompati tahapan sebelum melakukan sebuah kritik terhadap pekerjaan sosial.

Gagasan mengenai pentingnya perubahan paradigma dalam ilmu kesejahteraan sosial ini sebenarnya telah diulas khususnya oleh penulis Barat seperti Bob Mullaly dalam bukunya *Structural Social Work: Idelogy, Theory, and Practice* (1997). Di buku ini Mullaly menegaskan pentingnya pekerjaan sosial dengan menggunakan pendekatan struktural. Berpijak pada asumsi adanya krisis paradigma dalam pekerjaan sosial, Mullaly menegaskan pentingnya 'pekerjaan sosial struktural.' Dalam konteks Indonesia, gagasan pekerjaan sosial struktural tampaknya memang relevan, meskipun di sisi lain mengalami dilema.

Kenapa mengalami dilema? Saya akan menjawabnya dengan sebuah cerita dari diskusi di dalam kelas ketika menempuh studi S2 pekerjaan sosial di UIN Sunan Kalijaga. Bapak Muhrisun Affandi, yang waktu itu menjadi dosen dan sempat menimba ilmu pekerjaan sosial di Kanada sempat menceritakan hal yang menarik ketika berdiskusi tentang pekerjaan sosial struktural ini. Dia bercerita suatu kali pernah berdiskusi dengan Bob Mullaly, salah satu penulis yang menggagas pekerjaan sosial struktural tersebut. Tapi apa pendapat Mullaly ketika dimintai pandangan ihwal pengembangan pekerjaan sosial struktural di Indonesia? Jawabannya justru mengejutkan. Menurutnya, Indonesia kurang tepat untuk mengembangkan pendekatan ini. Sebab bagaimana mungkin mengembangkan kritik terhadap ilmu yang belum mapan? Memang usia pekerjaan sosial di Indonesia masih muda belia, bahkan saat ini mungkin masih dalam tahap pengembangan keilmuan. Sehingga, ketika diterapkan pendekatan kritis maka kondisi keilmuan pekerjaan sosial bisa porak-poranda. Begitu kira-kira dilema pengembangan pendekatan struktural dalam pekerjaan sosial di Indonesia.

Namun terlepas dari itu semua, kita sudah melihat adanya *normal science I* dalam pekerjaan sosial di

Indonesia. Norma science I tersebut yakni berkaitan dengan pekerjaan sosial selama ini yang mengadopsi paradigma liberal atau bahkan neo-konservatif terlihat dari berbagai realitas praktik pekerjaan sosial. Dalam konteks inilah pekerjaan sosial memerlukan paradigma baru yang lebih *genuine* dalam konteks keindonesiaan. Terlebih lagi, paradigma maupun teori suatu bangunan keilmuan sudah semestinya dilahirkan dan diproduksi dari konteks sosial yang ada (Payne, 1997: 13). Seperti halnya diketahui, paradigma atau teori berkaitan dengan gagasan dan nilai yang diyakini seseorang atau masyarakat. Lantas, untuk apa kita meyakini gagasan atau nilai yang sesungguhnya itu bukan berasal dari tradisi dan budaya kita? Misalnya berkaitan dengan nilai individualisme yang melahirkan berbagai macam dampak bawaan seperti kompetisi, sikap individualis yang tidak mempedulikan nasib orang lain. Padahal, Indonesia lekat dengan budaya komunalisme dan kesetiakawanan sosial yang bertolak belakang dengan individualisme tersebut.

Selain gagasan atau nilai yang harus dikembangkan dari dalam konteksnya, tipikal masalah sosial di Indonesia berbeda dengan negara asal ilmu ini lahir. Sehingga, ketika paradigma diadopsi begitu saja dari budaya yang berbeda maka sudah wajar jika terjadi anomali. Mengenai ini, Budi Rahman Hakim (2010) juga menganggap penting adanya *rethingking* pekerjaan sosial. Menurutnya pekerjaan sosial perlu dibangun dengan pendekatan yang relevan dengan konteks Indonesia, yakni harus menyentuh wilayah-wilayah makro tidak cukup pada aras mikro.

Ringkasnya, revolusi ilmu kesejahteraan sosial harus dibangun berdasarkan konteks sosialnya. Dalam konteks Indonesia, dengan demikian, revolusi ilmu ini harus dilandaskan kepada budaya, nilai dan keyakinan yang berkembang di tengah masyarakat. Mengenai model paradigma seperti apa yang harus diterapkan memang

bukan pekerjaan yang mudah, perlu kerja keras dan proses yang panjang. Namun yang jelas, model paradigma yang bisa ditawarkan adalah dalam aras struktural karena model inilah yang cocok untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki masalah sosial cukup kompleks.

Paradigma dalam aras struktural ini contohnya adalah pekerjaan sosial struktural *ala* Bob Mullaly sebagaimana telah disinggung-singgung di atas; paradigma transformatif sebagaimana yang dianalisis oleh Mansour Fakih (2008); maupun paradigma kritis (Fakih, Topatimasang & Rahardjo, 2001; Huda, 2011). Paradigma ini memang telah banyak didiskusikan dalam konteks Indonesia khususnya oleh para aktivis pergerakan sosial. Bahkan sejak tahun 1990-an dan bahkan 1980-an. Namun kebanyakan daripada mereka adalah berasal dari kalangan aktivis pergerakan sosial yang *nota bene* bukan berlatar belakang dari pendidikan pekerjaan sosial. Sehingga, wacana tersebut kurang menyentuh bidang pekerjaan sosial. Hal inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap penting memperbincangkan perubahan paradigma ini dalam konteks pekerjaan sosial.

Pekerjaan sosial di Indonesia, dengan demikian, penting untuk memperkaya khazanah keilmuan dengan penelitian-penelitian yang menggali nilai-nilai dan budaya lokal yang berkembang di masyarakat. Selain itu, *best practice* dari lembaga-lembaga sosial yang ada bisa dikaji dan dijadikan sebagai konsep yang berisi sekumpulan gagasan sehingga akhirnya dapat menjadi rumusan dasar dari paradigma yang relevan dengan kondisi masyarakat. Ringkasnya, paradigma yang relevan dengan praktik kesejahteraan sosial di Indonesia tidak akan datang secara tiba-tiba (*ujug-ujug*), misalnya diimpor begitu saja dari negara lain. Tapi penting untuk dirumuskan oleh kita sendiri sebagai orang yang akan mengembangkan sekaligus mempraktikkan pekerjaan sosial khususnya di Indonesia.

E. Penutup

Sebagai ilmu yang belum lama berkembang khususnya di Indonesia, ilmu ini memang mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatannya adalah berkaitan dengan bangunan keilmuannya. Sebagaimana dimafhumi, ilmu ini awalnya berkembang di negara-negara Barat seperti di Amerika Serikat ataupun Inggris. Sehingga proses pengembangan keilmuan di negara-negara berkembang berkiblat pada negara-negara Barat tersebut. Dimulailah kemudian proses adopsi ilmu tersebut dari negara Barat ke negara berkembang lainnya termasuk Indonesia. Namun proses adopsi ini justru menghilangkan nilai-nilai lokal seperti halnya yang ada di Indonesia.

Paradigma sebagai pangkal dari suatu entitas keilmuan, pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia juga dipengaruhi oleh paradigma-paradigma dominan yang berkembang di negara aslinya. Tidak heran jika di lapangan yang terjadi adalah adanya ketidaksesuaian antara paradigma yang dipakai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian inilah yang disebut sebagai anomali. Anomali inilah yang pada gilirannya akan mendesak dilakukannya revolusi ilmu yang mengoreksi paradigma lama dan mengajukan paradigma baru.

Tawaran tentang paradigma baru yang relevan memang belum *clear*, termasuk pembahasan dalam buku ini. Namun setidaknya buku ini dapat menjadi semacam sebuah ajakan bagi para praktisi ilmu kesejahteraan sosial untuk bersama-sama menawarkan paradigma alternatif yang lebih relevan dengan konteks Indonesia yang mempunyai problem sosial sangat kompleks. Semoga buku ini dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia. []

DAFTAR PUSTAKA

Alwisol, (2005) *Psikologi Kepribadian*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadyah Malang.

Barker, Robert L (2003), *The Social Work Dictionary*, edisi kelima, USA: NASW Press

Baswir, Revrisond, (2006), *Bahaya Globalisasi Neoliberal Bagi Negara-negara Miskin*, dalam *Majalah Inovasi*, No. 1 tahun XV.

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann (1990), *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.

Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton, and Paul Smyth (2006), *Talking Policy, How Social Policy is Made*, Australia: Allen and Unwin

Budiardjo, Miriam, (2008), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

DuBois, Brenda and Karla Krogsrud Miley (2005), *Social Work an Empowering Profession*, fifth edition. USA:

Pearson Education,Inc.

Eriyanto, (2001), *Analisis Wacana,* Yogyakarta: LKIS

Fakih, Mansour, (2008), *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial,Pergolakan Ideologi LSM Indonesia,* Cetakan Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____, (2008), *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi,* Cet. Kelima, Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2008..

Foucault, Michel, (1979), *Discipline and Punish.* Harmondsworth:Penguin.

Freire, Paulo, (1981), *Education for Critical Consciousness,* New York: Continum.

_____, (1986) *Pedagogy of the Oppressed,* New York: Preager.

Geertz, Clifford, (1960), *The Religion of Java,* Glenco, Illionis: The Free Press).

Giddens, Anthony, (2000), *Jalan Ketiga : Pembaruan Demokrasi Sosial,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Giddens, Anthony, (1986), *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern,* Terj. Soeheba Kramadibrata, Jakarta; UI Press.

Hakim, Budi Rahman, (2010), *Rethinking Social Work Indonesia,* Jakarta: RM Books.

Hatta, Mohammad, (1979), *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan,* Cetakan Keenam, Penerbit Mutiara: Jakarta.

Huda, Miftachul, (2009), *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ife, Jim (1995), *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice,* Australia: Longman

James H. Watt dan Sjef A. Van Den Berg (1995), *Research Methods for Communication Science,* Boston: Allyn

& Bacon.

Julian, Joseph, and William Kornblum (1996), *Social Problem,* Prentice Hall, Inc, New Jersey.

Khun, Thomas, (1970), *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: The University of Chicago Press.

Kuntowijoyo (1991), *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi,* Bandung: Mizan.

Kuntowijoyo (2004), *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika,* Bandung: Teraju.

Magnis-Suseno, Franz, (2003), *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Maslow, Abraham H. (1970), *Motivation and Personality,* (2nd edition), New York: Harper & Row.

Midgley, James, (1995), *Social Development The Development Perspective in Social Welfare.* London: SAGE Publications.

_____, (2005), *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Terj. Dorita Setiawan dan Sirojudin Abbas, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam (Ditperta Islam) Depag RI).

_____, (1991), *Professional Imperialism: Social Work in the Third World.* London, England: Heinemann Educational Books Ltd.

_____, (1997), *Social Welfare in Global Context*, USA: Sage Publications, Inc.

Mishra, Ramesh B (1981), *Society and Social Policy,* 2nd rev. London: Macmillan.

Misiak, Henryk dan Virginia Staudt Sexton (2009), *Psikologi Fenomenologi, Eksistensial dan Humanistik Suatu Survei Historis,* Judul asli, *Phenomenological, Existential, and Humanistic Psychologies: A Historical Survey,* Terj. oleh E. Koswara, Edisi kedua, Bandung: Refika Aditama.

Mullaly, Bob, (2002), *Challenging Oppression A Critical Social Work Approach,* Canada: Oxford University Press.

Mullaly, Bob, (1997), *Structural Social Work, Ideology, Theory, and Practice,* second edition, Canada: Oxford University Press

Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir, (2004), *Filsafat Ilmu,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Payne, Malcolm (1997), *Modern Social Work Theory, second Edition,* Chicago, Illionis: Lyceum Book. Inc.

_____, (2011), *Humanistic Social Work,* Chicago, Illionis: Lyceum Books Inc.

Poerwadarminta, W.J.S. (2007), *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* edisi ketiga, cetakan keempat, Jakarta: Balai Pustaka.

Ritzer, George, (1992), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,* (Terj.) Jakarta: Rajawali Press.

Suharto, Edi, (2002), *Masyarakat Madani: Aktualisasi Profesionalisme Community Workers dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berkeadilan,* Makalah disajikan pada Orasi Ilmiah dalam Pembentukan HIMA Jurusan Pengembangan Sosial Masyarakat (PSM) STKS Bandung, Senin 21 Oktober.

_____, dkk. (2011), *Pekerjaan Sosial di Indonesia Sejarah dan Dinamika Perkembangan,* Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

_____, dkk. (2010), *Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia Melacak Masa Lalu, Merajut Masa Depan* (Bandung: STKS Press).

Soetomo, (2008), *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya,* Yogya: Pustaka Pelajar.

Toer, Pramoedya Ananta (2011), *Bumi Manusia,* Cetakan ke-17, Jakarta: Lentera Dipantara.

Usman, Marzuki, (2004), *Demasifikasi Pemeriintahan Perspektif Marzuki Usman,* Yogyakarta: Jendela.

Usman, Marzuki, (2006), *Membangun Ekonomi Bangsa,* Yogyakarta: Kibar Press.

Verhaak, C. & Haryono Imam, (1995), *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Kerja atas Kerja Ilmu-Ilmu,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zastrow, Charles H (1999), *The Practice of Social Work*, sixth edition. USA: Brook/Cole Publishing Company.

TERBITKAN BUKUMU DI SINI
SAMUDRABIRU.CO.ID
MENGERJAKAN PRA CETAK (EDITING, LAYOUT, DESAIN COVER)
SAMUDRABIRU.CO.ID

Indeks

A

Abdurrahman Wahid 57, 69, 101
Abraham Maslow 77
achievement motivation training (AMT) 106
Achievement Motivation Training (AMT) 82
Adam Smith 37, 39, 51
advokasi iv, 6, 11, 43
Advokasi 43
aktivitas kedermawanan (*philanthropy*) 13
aktivitas pertolongan (*helping profession*) 19
aktivitas profesional 5, 6, 12
aktualisasi diri (*self actualization*) 77
alienasi 48
Alienasi 48
Alwisol 73
a mixed economy 40, 41
anomali 33, 34, 57, 58, 98, 103, 104, 105, 108, 109, 112, 114
Arisan Tenaga 18

B

Badan Pusat Statistik 23
Bahan Bakar Minyak (BBM) 56
Bank Dunia 53, 55, 59
Bantuan Langsung Tunai (BLT) 24, 56
Barker, Robert L 80, 115
Baswir, Revrisond 55
Berger, Peter L. & Thomas Luckmann 70
Bessant, Judith 53, 54
blaming the victim 8, 10
Bob Mullaly 62, 111, 113
Budiardjo, Miriam 49

C

Carl Rogers 77, 79
Clifford Geerts 16
community development 11, 72, 79, 81, 82, 83
community organizing 11
conflict perspective 64, 68

D

Dana Moneter Internasional (IMF) 53
demokrasi sosial 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 58
Deng Xiao Ping 46
depresi hebat (*great depression*) 36
description 65
disorganisasi sosial (*social disorganization*) 42, 43
Dow Jones Industrial Average (DJIA) 52
DuBois dan Miley 5

E

Edi Suharto 44
ekonomi pasar bebas 37, 51, 53
ekonomi pasar bebas (*free-market economy*) 37
explanation 65

F

fakih, Mansour 34 29, 81, 82, 105, 113
family therapy 11
founding father 36
Franz Magnis-Suseno 47

G

Giddens, Antony 16, 44
Gus Dur 57, 68, 69, 70, 101, 102

H

Hakim 22, 102, 112
Hatta 13
Hegel 48
Holil Soelaiman 3
Huda, Miftachul 12, 18, 34, 37, 53, 56, 80, 81, 83, 84, 102, 113
humanitarianisme 43

I

ilmu sosial kritis 8
IMF 53, 55, 59
Immanuel Kant 29
individualist-reformist 68
international federation of social worker 5

J

James Midgley 7, 26
Jeremy Bentham 39
John Stuart Mill 39
Julian 42

K

kondisi sejahtera (*welfare*) 7
Konsensus Washington 55, 56, 59
Kuntowijoyo 28, 31, 32

L

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 17

liberalisme 39, 40, 41, 47, 49, 51, 54
LSM 6, 17, 99, 100

M

Mansour Fakih 81, 113
Mao Tse Dung 45
Marxist 35, 46, 50
masalah sosial 5, 6, 7, 12, 19, 22, 25, 26, 66, 68, 75, 82, 85, 90, 96, 101, 102, 104, 107, 109, 112
Max Siporin 9
Max Weber 16
metode *group work* 11
metode intervensi 9, 11
Michel Foucault 20
Midgley 7, 19, 21, 26, 79, 80, 117
Mishra 45, 53
Misiak dan Sexton 76, 77, 78
Muhammad Nuh 107
Mullaly 35, 36, 39, 41, 43, 52, 90, 91, 111, 113
Mustansyir dan Munir 32, 33
Mustofa Bisri 69

N

negara kesejahteraan (*welfare state*) 31, 36, 41, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54
neo-konservatif 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59
neo-liberal 54, 67
neo-liberal/*order perscpective* 67
Nicolaus Copernicus 30
normal science 32, 33, 104, 109, 111

O

OPEC 53
order perspective 64

P

paradigma konservatif 31, 35, 39, 51, 52, 58, 80, 102
paradigma kritis 63, 90, 113
paradigma liberal 31, 43, 45, 52, 80, 107, 110, 112
partisipasi demokrasi 43, 44
Patton 29
Paulo Freire 34
Payne 67, 70, 71, 72, 76, 79, 90, 112
PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 22
Pekerjaan Sosial (*social work*) 2, 7, 14, 26
penelitian kesejahteraan sosial 14, 15, 16, 17, 26
pengembangan ekonomi lokal 81
penjajahan profesional 21
Peraturan Daerah No. 5 tentang Sistem Pelaksanaan Pendidikan 12
Pincus dan Minahan 9
pointers 3
policy analysis 11
praktik pekerjaan sosial 43, 66, 86,

95, 96, 105, 112
Pramoedya Ananta Toer 20
preambule UUD 1945 58
prediction 65
Presiden Soeharto 38
Professional Imperialism 19
Program Keluarga Harapan (PKH) 24
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 24

R

reflexice-therapeutic 67, 72
Relawan Sosial 12
Republika 102
revolusi ilmiah 34
revolusi ilmu pengetahuan 28, 32, 34, 109
Ritzer 30

S

Sa'aleant 18
Saidi&Abidin 18
schizophrenia 74
Sigmund Freud 73
sistem Keynesian 37, 52
Sistem Keynesian 52
socialist-collectivist 68, 72, 87
social order 8
social rules 42
social work 2, 4, 7, 62. 76, 88, 125
Soetomo 43, 72
STKS 2, 3, 22
Suharto 4, 44, 54, 86
Sumodiningrat 38

T

Talcott Parsons 64
Tana Toraja 18
teori ekosistem 83, 84, 86, 87
teori fungsional struktural 30
teori humanis 76, 77, 75, 78
teori kesejahteraan sosial 15, 16
teori konflik 30, 63
teori psikodinamika 72, 73, 75, 84, 88
teori psikologi behavioristik 77
teori radikal 67, 68, 88, 89, 90
teori *social and community development* 79
teori strukturalisme fungsional 8
the charity organization society 88
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 16
The Structure of Scientific Revolutions 28
Thomas Kuhn 28, 32
Tionghoa 91, 93
trafficking 86

U

Usman 46, 57
UU No. 11 Tahun 2009 12

V

Verhaak 32

W

Watt 63
welfare consensus 52
welfare society 5
welfare state 5, 31, 36, 40, 41, 43, 52, 53
Wittgenstein 29

Z

Zastrow 5, 8, 12, 37, 84

Bertutur Tentang Kehidupan

Siang yang terik. Seorang lelaki tua tengah sibuk membersihkan parit di sekitar masjid. Esoknya, masjid "Pancasila" yang melengkapi bangunan pondok pesantren itu akan diresmikan oleh Gubernur. Dia memang sosok pemimpin yang *low profile,* sederhana dan *a* politik. Meski dikenal sebagai tokoh agama sekaligus pendiri pondok pesantren di kampungnya, Dia tetap seperti orang kebanyakan. Seperti siang itu, saat semua jamaah sudah pulang gotong royong Dia masih "menyisir" parit yang belum sempat dibersihkan dengan cangkulnya.

Sekonyong-konyong kemudian datanglah Camat menghampirinya. Berlagak mandor Camat langsung memerintah, "Pak nanti sekalian membersihkannya sampai ujung jalan sana ya!"

"Saya ini sudah tua pak. Ya, nanti kalau masih kuat saya teruskan. Tapi kalau sudah capek, ya besok lagi," jawabnya santai. Dia tahu lawan bicaranya adalah

Camat. Tapi Camat tidak tahu dengan siapa dia bicara. Dia memang sosok independent, jarang mau berunding khususnya dengan pemerintah. Kalau bahasa anak muda sekarang, mungkin begini, *"Trus kalau kamu Camat, apa saya harus bilang WOW gitu?"* Termasuk ketika menerima bantuan pembangunan masjid dari yayasan milik keluarga Soeharto atau yang dikenal dengan masjid "Pancasila" ini. Dia mengajukan syarat-syarat khusus. Di antaranya misalnya, *tukang* yang mengerjakan harus dari penduduk sekitar, dan pagar yang dibangun tidak harus mengelilingi masjid, tapi menyesuaikan bangunan pondok pesantren yang ada di sekelilingnya. Permintaannya pun dikabulkan.

Syahdan, Si Camat tadi entah karena kesal dan kebakaran jenggot atau apa, *ngeloyor* saja meninggalkannya. Tak lama kemudian, datang Kepala Desa beserta beberapa orang membawa cangkul, sabit, dan perlengkapan lainnya. Tapi bukan hendak mengeroyok lelaki tua tadi. Ternyata mereka datang hendak membantu membersihkan parit. Usut punya usut rupanya Si Camat tadi langsung mendatangi Kepala Desa agar memerintahkan perangkat desa untuk membantunya. Lelaki tua tadi pun "terkekeh" dalam hati. Dia tahu, kalau Gubernur akan datang pasti semua perangkat pemerintahan di bawahnya akan bergerak dengan sendirinya.

Lelaki tua tadi tidak lain adalah bapakku, H. Sukino. Seorang petani biasa yang hanya lulusan Sekolah Rakyat (SR), namun cerdik berdiplomasi dan selalu memegang prinsip dengan kuat. Selain anti kompromi dengan pemerintah, salah satu prinsipnya adalah: "Meski hanya petani, anak-anaknya harus jadi sarjana." Karena prinsip inilah, saya yang putra bungsu dari enam bersaudara punya kesempatan untuk kuliah. Meski, dengan sisa-sisa "energi" karena telah membiayai lima saudaraku lainnya. Jika bukan karena tekad dan keringatnya, mungkin tak

tega rasanya hati ini melanjutkan kuliah. Dari tekadnya, saya kemudian sadar bahwa doa dan harapan orang tua dapat menjadi cambuk kehidupan. Doa dan harapan inilah yang banyak membantuku dalam menyelesaikan kuliah.

Sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu, menjadikan saya harus mencari jalan untuk mendapatkan penghasilan sejak masa kuliah. Maka selain hoby, menulis juga saya jadikan strategi untuk mendapatkan sesuap nasi. Masa-masa kuliah saya telah merasakan pahit getirnya hidup dengan menjadi penulis. Suka duka menjadi penulis artikel di koran masih terkenang hingga sekarang. Mulai tiap pagi yang harus mengintip rubrik opini tiap koran di lapak-lapak pinggir jalan, hingga rasa putus asa karena sulitnya menaklukkan redaktur media. Bicara intip-mengintip, mungkin karena saking kesalnya, suatu kali penjual lapak koran sampai harus men-*staples* tiap koran. Jadi, mau tidak mau harus membelinya untuk melihat. Tapi di sinilah repotnya, karena buat apa beli kalau tulisan tidak dimuat. Apalagi, artikel biasanya dikirim hingga beberapa media. Membeli semuanya tentu bukan cara yang ekonomis.

Lain lagi dengan pengalaman mengambil hati redaktur, karena ini kuncinya menembus media. Berkali-kali dimuat, bukan jaminan tulisan kita selanjutnya juga akan dimuat. Suatu kali, karena saking jengkel karena tidak pernah dimuat lagi, padahal kantong benar-benar "kering", saya membuat pengantar yang *asal-asalan.* Peristiwanya terjadi tahun 2006 saat Jogja dilanda gempa. Dengan lugas, intinya saya bilang, "Mohon dikasihani karena sedang tidak punya uang karena menjadi korban gempa." Beberapa hari kemudian, mungkin karena redakturnya merasa iba, tulisan saya akhirnya dimuat. *Alhamdulillah.....*, honor tulisan dapat menyambung hidupku kembali. Tentu tak hanya ini suka duka menjadi penulis, masih banyak lagi yang bisa dikisahkan. Namun

intinya, semoga ini dapat dijadikan pelajaran terutama bagi mahasiswa yang mapan. Kiriman habis tinggal SMS mama minta uang. Atau tinggal ikuti petunjuk dalam plesetan iklan ini: *"Ketik: REG <spasi> Minta Duit kirim ke nomor Bapakmu!"* Syukurilah keadaan dengan menempuh studi dengan sungguh-sungguh.

Mungkin rasa syukur juga menjadi kunci hidup yang selalu kupegang teguh. Seperti lagu d'massiv: *"Syukuri apa yang ada...., Hidup adalah anugerah....."*. Tanpa syukur, seperti istilah yang lagi *ngetrend,* kita akan mudah *galau*. Maka sejak menjadi mahasiswa di Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001-2007), saya berusaha mensyukuri hidup dengan melakukan hal-hal kecil yang punya manfaat. Selain terus menulis, maka saat itu saya ikut terlibat dalam lembaga KIBAR, sebuah lembaga independent yang bergerak di bidang penerbitan buku dan majalah, kajian dan pelatihan serta pengembangan masyarakat. Menyesali keadaan ibarat kita mengumpat di tengah kegelapan tapi tak kunjung menyalakan lilin, *alias* tidak ada gunanya sama sekali. Tentang ini saya sering mengutip kata mutiara yang penuh makna, *"Lebih baik menyalakan lilin daripada mengumpat di tengah kegelapan."*

Usai meraih gelar sarjana dalam waktu yang tidak singkat (5,5 tahun/11 semester) saat itu (tahun 2007) saya bertekad melanjutkan kuliah S2. Jurusan *Social Work* Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga menjadi pilihan yang mantap. Biaya per semester Rp 4 juta tentu bukan jumlah kecil untuk ukuran biaya sendiri. Tapi karena sudah ada tekad bulat, biaya bukan jadi penghalang. Walhasil, beragam strategi penulis tempuh. Mulai menjadi broker iklan di suatu majalah hingga membuat proposal *ala* aktivis *koboy*, di samping tentu saja dengan menulis. *Alhamdulillah*, rupiah demi rupiah terkumpul.

Hingga SPP semester pertama terbayar. Lega sudah rasanya.

Namun rasa gundah dan gelisah kembali melanda. Bagaimana nanti dengan biaya SPP selanjutnya? Saat itulah, di tengah perjalanan menempuh semester pertama, ada peluang beasiswa dari *Building Professional Social Work* (BPSW) yang ada di Jakarta. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, segala syarat segera dipersiapkan untuk beasiswa tersebut. Dengan modal seadanya waktu itu saya berangkat ke Jakarta mengikuti seleksi. Dan akhirnya, dengan penuh rasa syukur yang mendalam setelah beberapa bulan menunggu saya menjadi salah satu penerima beasiswa. Untuk ini saya patut mengenang jasa baik Almarhum Ibu Cynthia Pattiasina, M.S.W. pengurus BPSW yang di usia mudanya telah mendahului kita semua. *Rest in peace*, istirahatlah dengan tenang bunda, jasamu pada pengembangan *social work* di Indonesia tak ternilai harganya. Sekalipun akhirnya memperoleh beasiswa, saya menemukan sebuah pelajaran bahwa pintu kehidupan yang lapang tidak akan pernah terbuka tanpa terlebih dahulu tangan kita sendiri yang pertama membukanya.

Sejak saat inilah saya bersinggungan dengan *social work*. Pertama kali mendengar ilmu ini memang masih bingung apa itu maksudnya. Namun karena mendengar sesuatu yang "*wow*" pada ilmu ini, saya pun tertarik. Pada awal-awal perkuliahan, saya mendapati masih minimnya referensi khususnya yang berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa asing saya kira UIN adalah surganya referensi *social work* ini. Datanglah ke perpustakaan, *alamak*... banyak nian buku asing tentang *social work*. Melihat kondisi ini, insting penulis saya muncul. Saya kumpulkan materi-materi kuliah, saya dalami di perpustakaan, dan saya sesuaikan dengan kurikulum di kampus-kampus yang mempelajari ilmu ini. *Eng ing eng*... terbitlah buku *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: sebuah*

Pengantar (2009). Tepat ketika saya masih menempuh semester 4. Buku itupun, sejauh yang saya tahu menjadi buku pertama yang mengulas secara generalis terhadap pekerjaan sosial. Menulis memang tidak semata-mata bermotif ekonomi. *Toh* royalti yang diperoleh penulis terhitung kecil. Tapi ada semacam kepuasan batin yang tak terukur.

Tahun 2009 jelang wisuda S2 saya memutuskan untuk menikahi Dewi Mahmudah, S.Pd.I. Perempuan yang saya cintai dan menjadi ibu dari anak saya, Kays Ghathfan al-Fayyadl (2011). Sebuah nama yang saya berikan dengan doa agar menjadi anak yang cerdas, sejahtera, dan dermawan. Seperti saat mendaftar S2, modalnya tetap nekad. Selain, buku *Meraih Sukses dengan Menjadi Aktivis Kampus* (2009) yang ditulis secara marathon (2 minggu) dan honor "beli putus"-nya saya jadikan modal menikah. Yang terus terkenang, hingga 5 bulan usia pernikahan kami hidup di kamar kos berukuran 3x4 meter. Tak ada dapur, tak ada toilet dalam, apalagi AC, hanya ruangan sempit yang sebenarnya cuma layak untuk 1 orang. Namun semua terasa lapang jika dijalani dengan ikhlas dan *happy*. Setelah 5 bulan, satu per satu pintu rejeki terbuka, hingga kami bisa mengontrak rumah hingga sekarang.

Tahun 2010 adalah titik balik kehidupan. Ternyata kuliah S2 bukan jaminan. Saya harus tetap hidup tanpa ada yang menggaji tiap bulan. Namun saya tidak menyesal telah menempuh S2. Kuliah adalah sarana menjalin relasi, memperkuat watak kedewasaan, dan meninggikan derajat. Maka tak memperoleh pekerjaan dengan ijazah yang dimiliki, bukan suatu masalah yang berarti. Karena rupanya pintu rejeki terbuka di mana-mana. Mulai saat itu, saya mengembangkan bisnis penerbitan dan percetakan (CV. Samudra Biru). Walaupun, sejak kuliah tak terfikir sama sekali untuk berwirausaha. Entah itu karena tak ada bakat atau karena tidak ada darah

wirausaha. Akan tetapi saya yakin inilah mungkin jalan hidup saya yang harus ditempuh.

Dengan berbisnis, saya akhirnya menyadari betul bahwa jalan rezeki itu tiada terkira luasnya. Hingga saya tak habis pikir dengan orang yang menganggur: tidur hingga larut malam karena ngopi di *warkop*, siang baru bangun lalu nonton tv, sore melamun, malam ngopi lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, mirip lirik lagu kocak mbah Surip yang terkenal itu. *"Bangun tidur, tidur lagi; bangun tidur, tidur lagi; bangun tiduuuuuuurr.... Tidur lagi!"* Bagaimana tidak, jika kita sudah menemukan jalan hidup, niscaya 24 jam dalam sehari rasanya tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan demi pekerjaan.

Lingkungan bisnis rupanya secara diam-diam membentuk watak materialistik. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang. Karena itu saya senang mengkaji wacana CSR hingga menulis buku *Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis* (2011). Dalam bisnis jarang bisa menemukan bentuk relasi yang tulus seperti dalam dunia pendidikan. Karena itulah akhirnya saya menerima tawaran mengajar di berbagai kampus (UIN, UGM, UNY). Tepatnya sebagai Dosen Luar Biasa (LB). Kalau dosen tetap (PNS) itu "biasa", namun ini dosen (bisa) terbang, jadi luar biasa, *hehehe....* Di dunia kampus ini saya baru benar-benar bisa merasakan kemanfaatan diri. Seolah ingin meneladani Hadits, "Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaat bagi orang lain" (HR. Bukhari). Mungkin ini hanyalah secuil kisah perjalanan hidup yang juga dimiliki oleh banyak orang. Semoga pembaca yang budiman dapat menorehkan sejarah kehidupan yang lebih baik dari kisah perjalanan hidup ini.*

CULTURAL DIPLOMACY AS A SOFT POWER TOOL:
Examining Indonesia-Malaysia Relations
FOREIGN POLICY REVIEW
Arie Peksi
EVALUASI PEMBELAJARAN EKONOMI DI ERA DIGITAL
(Konsep dan Implementasi)
Penerbit & Percetakan
SAMUDRA BIRU
Berdiri sejak 2010 Samudra Biru (Penerbit dan Percetakan) berkomitmen untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa dengan menyediakan buku-buku bacaan yang bermutu dengan menerbitkan buku-buku yang berwawasan ilmu pengetahuan.
BOOK NOW
0812-2607-5872
PROFESI KEGURUAN
PEMBERDAYAAN ZAKAT

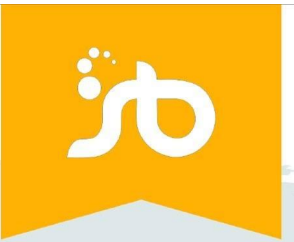

"Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian."

Pramoedya Ananta Toer

TEBITKAN BUKUMU DI SINI

Menerbitkan buku sejak 2010. Dipercaya oleh dosen, guru, peneliti dan penulis profesional lainnya dari seluruh Indonesia

Temukan kami di sini:

0811-264-4745 0812-2607-5872 samudrabiru_group Pod Samudra Biru

admin@samudrabiru.co.id www.samudrabiru.co.id

Secara khusus buku ini ditujukan untuk memenuhi referensi tentang mata kuliah teori kesejahteraan sosial. Walaupun, buku ini juga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami secara lebih jauh tentang ilmu kesejahteraan sosial, khususnya dalam konteks paradigma maupun teori. Paradigma maupun teori ini merupakan persoalan paling pokok dalam kesejahteraan sosial. Karena wilayah inilah yang menentukan model praktik pekerjaan sosial.

Pengetahuan-pengetahuan yang spesifik dan spesialis dalam ilmu kesejahteraan sosial belum banyak dibahas dalam sebuah buku utuh khususnya yang berbahasa Indonesia. Misalnya, advokasi, pendampingan sosial, penelitian kesejahteraan sosial, konseling, terapi kelompok, nilai dan etika, dan seterusnya. Mudah-mudahan buku ini disusul dengan penulisan buku-buku referensi lainnya yang tentu berguna bagi para pekerja sosial atau yang berminat terhadap ilmu kesejahteraan sosial.

Buku ini memang masih bersifat deskriptif dengan menggambarkan beberapa paradigma maupun teori yang sudah ada dan berkembang. Namun lebih dari itu buku ini juga dimaksudkan membuka alam pikiran pembaca agar kritis dengan dimungkinkan adanya perubahan dan perumusan paradigma maupun teori baru yang lebih relevan dengan konteks Indonesia. Sebab, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku ini ilmu kesejahteraan sosial yang berkembang [illegible] sedikit-banyak masih dipengaruhi oleh negara asalnya yang ada di Barat seperti di Inggris ataupun Amerika Serikat. Walhasil, paradigma maupun teori yang diimplementasikan di Indonesia lebih banyak tidak berhasil menyelesaikan masalah dengan sempurna. Ini disebabkan realitas sosial dan budaya di Indonesia berbeda dengan yang ada di Barat. Untuk itulah setidaknya buku ini dapat menjadi penggugah kesadaran bagi para pekerja sosial dalam rangka merumuskan ulang ilmu kesejahteraan sosial, khususnya dalam wilayah paradigmatis.

Penerbit Samudra Biru
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

ISBN 978-602-9276-09-1